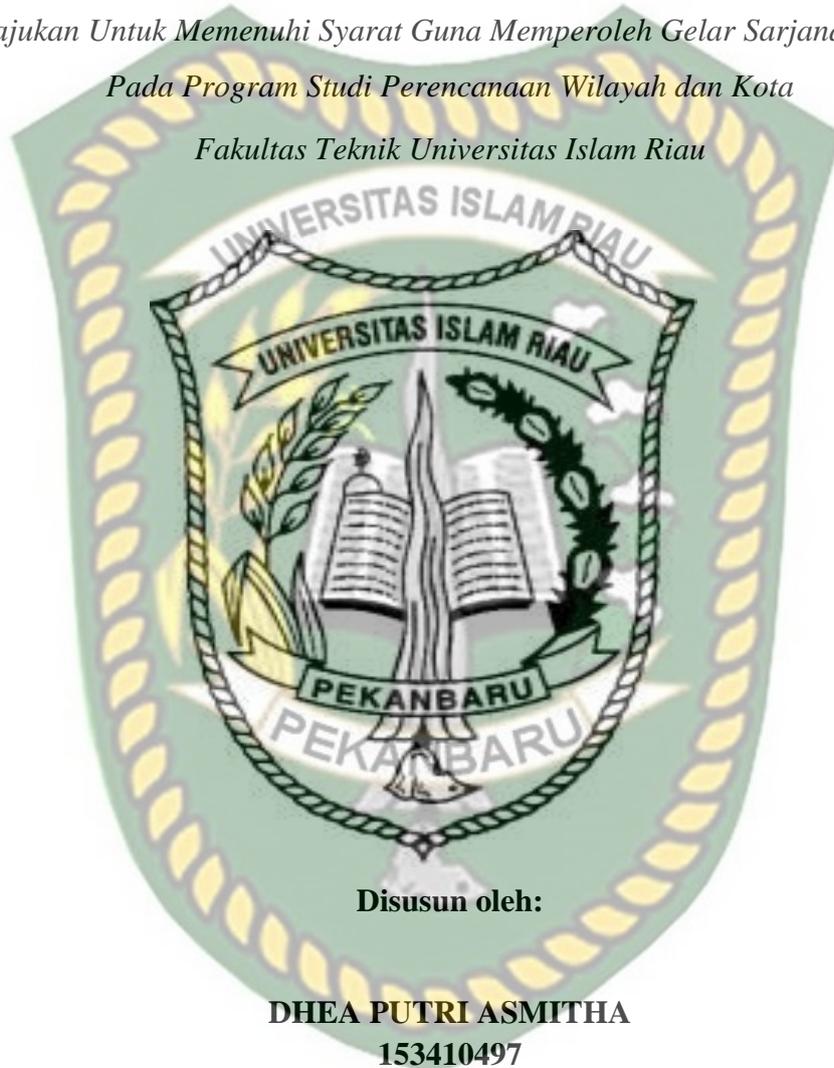


**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA
DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



Disusun oleh:

**DHEA PUTRI ASMITHA
153410497**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH KOTA DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh :

DHEA PUTRI ASMITHA

NPM : 153410497

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



FEBBY ASTERIANI., ST. MT

Disahkan Oleh :

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

KETUA PROGRAM STUDI



H. HABI RUDUS ZAINI., MT

PUJI ASTUTI, ST., MT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea Putri Asmitha
Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang Siantar/ 23 Maret 1998
Alamat : Asrama Kodim 0314 Kabupaten Indragiri Hilir

Adalah Mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada :

Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis adalah benar dan asli dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul :

**“Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan
Tembilahan Hulu”**

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan atau menuntut karena Tugas Akhir ini menggunakan sebagian hasil tulisan atau karya orang lain tanpa mencantumkan nama penulis yang bersangkutan, atau terbukti karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

Pekanbaru, 23 Oktober 2019




Dhea Putri Asmitha

NPM : 153410497

“STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU”

DHEA PUTRI ASMITHA
NPM: 153410497

ABSTRAK

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kelurahan Tembilaan Hulu ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir dengan kondisi rendahnya kualitas permukiman dan infrastruktur permukiman yang terkesan kumuh dan merusak citra kota, sehingga perlu dilakukan penanganan permukiman kumuh sesuai kondisi karakteristik lingkungan di Kelurahan Tembilaan Hulu dengan tujuan merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh kota di Kelurahan Tembilaan Hulu.

Metode dan analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan sistem pembobotan dalam proses perhitungan tingkat kekumuhan serta metode non probability sampling dengan jenis purposive sampling.

Hasil dari penelitian ini adalah kondisi eksisting infrastruktur permukiman kumuh belum sesuai standar teknis, dan hasil tipologi permukiman kumuh terdapat jenis tipologi permukiman kumuh dataran rendah dan permukiman kumuh tepi sungai, kemudian hasil tingkat kekumuhan yaitu kumuh sedang dengan legalitas lahan legal dan pertimbangan lain tinggi, adapun pola penanganan yang tepat berdasarkan hasil tipologi permukiman kumuh yaitu jenis permukiman kumuh tepi sungai memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah, sedangkan tipologi permukiman kumuh di dataran rendah memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah, dan pola penanganan yang tepat berdasarkan hasil tingkat kekumuhan sedang yaitu peremajaan.

Kata Kunci : Kawasan kumuh, Tingkat Kekumuhan, Strategi Penanganan.

“STRATEGY FOR HANDLING THE CITY SLUM AREAS IN TEMBILAHAN HULU SUB DISTRICT ”

DHEA PUTRI ASMITHA

NPM: 153410497

ABSTRACT

Slums are settlements that are not suitable for habitation because of building irregularities, high levels of building density, and the quality of buildings and facilities and infrastructure that do not meet the requirements. Tembilihan Hulu Urban Village is determined as a slum area in Indragiri Hilir Regency with the condition of low quality housing and settlement infrastructure that seems slum and damaging the image of the city, so it is necessary to handle slum settlements according to the environmental characteristics in Tembilihan Hulu Urban Village with the aim of formulating a slum settlement management strategy. town in Tembilihan Hulu Sub-district.

The method and analysis used are descriptive qualitative and quantitative analysis with a weighting system in the process of calculating the level of slums and non-probability sampling method with the type of purposive sampling.

The results of this study are the conditions of the existing slum infrastructure not in accordance with technical standards, and the results of the slum typology are typologies of lowland slum settlements and river bank slum settlements, then the results of slums are medium slums with legality of legal land and other high considerations, while appropriate handling patterns based on the results of the slum settlement typology, namely the type of slum settlement by the river pay attention to the carrying capacity of water edge land, tidal water and water and soil sustainability, while the typology of slum settlements in the lowlands pay attention to the characteristics of soil carrying capacity, soil type and soil sustainability , and appropriate handling patterns based on the results of the level of moderate slum that is rejuvenation.

Keywords: Slums, Slum Level, Handling Strategy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah! Robil'alamin puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul pembahasan "**Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan Tembilahan Hulu**". Sebagai memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Riau Pekanbaru Provinsi Riau.

Tugas akhir ini berisi tentang strategi penanganan kawasan permukiman kumuh, dimana untuk merumuskan strategi penanganan maka perlu mengetahui kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh, tipologi kawasan permukiman kumuh, kemudian menghitung tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh tersebut. Dimana penelitian ini merupakan bagian dari Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di wilayah studi penelitian.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan Tugas Akhir ini.

Penulis juga menyadari bahawa sepenuhnya begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Syafrinaldi SH. M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Ir. H. Abdul Kudus Zaini, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST. MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.
4. Bapak Muhammad Sofwan ST. MT selaku sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta sebagai penguji II yang telah memberi saran saat seminar proposal, seminar hasil, dan seminar komprehensif.
5. Ibu Febby Asteriani, ST. MT selaku pembimbing yang telah membimbing, mendukung, serta memberi saran dan arahan yang bermanfaat kepada penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Faizan Dalilla, ST. Msi selaku Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta penguji I yang telah memberi saran saat seminar proposal seminar hasil, dan seminar komprehensif.
7. Staf dan karyawan dilingkungan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
8. Ibu Lenny Sriayu Indriyati, ST sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.

9. Bapak Sumitro, SE sebagai Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
10. Abang Irfan, dan kawan-kawan selaku Fasilitator Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kabupaten Indragiri Hilir yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
11. Bapak Camat Kecamatan Tembilahan Hulu yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
12. Bapak Lurah Kelurahan Tembilahan Hulu serta Staf di Kelurahan yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
13. Bapak RT dan RW di Kelurahan Tembilahan yang telah memberikan dukungan dan arahan serta informasi yang dibutuhkan kepada penulis.
14. Kedua orangtua penulis, papa dan mama yang selalu memberikan dukungan, memberikan doa yang tiada hentinya, memberikan nasihat serta semangat dan kepercayaan kepada penulis hingga tugas akhir ini selesai. Tidak ada jasa yang terbaik selain mampu membanggakan kedua orangtua dengan memberikan segala yang terbaik dengan membawa nama baik kedua orang tua.
15. Adik-adik yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Kepada seluruh tante dan oom, serta keluarga lainnya yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Sehabat sepermainan dan seperjuangan Oci, Mpa, Yashmine yang selalu menerima keluh kesah dalam setiap H-1 seminar, yang selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Partner kelahi M.Helmi Setiawan yang selalu mau direpotkan dalam keadaan apapun, dan yang selalu memberikan semangat meski kelahi disaat penulis begadang dalam proses menyelesaikan skripsi.
19. Vatur yang membantu dalam proses pembuatan peta dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Cewelah isinya di Planologi 15 A yaitu Bela, Thesa, Rama, Ika, Riska, Syahri, Windy, Yashmine, Yolana, Yuchi yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan hadir mendukung serta mendoakan saat komprehensif.
21. Teman-teman Planologi 15 A yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan hadir mendukung serta mendoakan saat komprehensif.
22. Geng Semut SMA, Rizqok, Laura, Nisa, Dina, Ocek, Tata yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, menjadi ukuran bagi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Demikian dengan selesainya laporan tugas akhir ini, penulis mengharapkan semoga laporan tugas akhir ini berguna dan bermanfaat.

Pekanbaru, Oktober 2019

Dhea Putri Asmitha

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Pustaka	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Sasaran	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah	10
1.6.2 Ruang Lingkup Materi.....	13
1.7 Kerangka Berfikir.....	14
1.8 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1	Permukiman	18
2.1.1	Konsepsi Permukiman.....	18
2.1.2	Pola Persebaran Permukiman	22
2.2	Permukiman Kumuh.....	23
2.2.1	Pengertian Permukiman Kumuh	23
2.2.2	Indikator Permukiman Kumuh	24
2.2.3	Tingkat Kekumuhan	32
2.3	Tipologi Permukiman Kumuh	45
2.4	Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	47
2.4.1	Pengertian Program KOTAKU.....	47
2.4.2	Tujuan Program KOTAKU	48
2.4.3	Kaitan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dengan Perencanaan Wilayah dan Kota	49
2.5	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh	51
2.5.1	Pengertian Strategi	51
2.5.2	Bentuk dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh	51
2.6	Tinjaun Kebijakan	65
2.7	Sintesa Teori.....	66
2.8	Keaslian Penelitian.....	72

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	80
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	80
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	82
3.4 Metode Pengumpulan Data	84
3.5 Teknik Analisis Data.....	86
3.5.1 Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Kawasan	
Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu	86
3.5.2 Menganalisis Tingkat Kekumuhan Kawasan	
Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu	88
3.5.3 Mengidentifikasi Tipologi dan Pola Persebaran	
Kawasan Permukiman di Kelurahan Tembilahan Hulu .	88
3.5.4 Merumuskan Strategi Penanganan Kawasan	
Permukiman Kumuh di Tembilahan Hulu	92
3.6 Tahapan Penelitian.....	93
3.6.1 Pra Lapangan	93
3.6.2 Lapangan	95
3.6.3 Pasca Lapangan	96
3.7 Desain Survei	98
3.8 Bagan Alur Penelitian.....	103

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	104
4.1.1	Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir	104
4.1.2	Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hilir	106
4.2	Gambaran Umum Kecamatan Tembilahan Hulu	109
4.2.1	Letak Geografis Kecamatan Tembilahan Hulu	110
4.2.2	Penggunaan Lahan Kecamatan Tembilahan Hulu	113
4.2.3	Kependudukan Kecamatan Tembilahan Hulu.....	113
4.2.4	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kecamatan Tembilahan Hulu	114
4.3	Gambaran Umum Kelurahan Tembilahan Hulu	115
4.3.1	Sejarah Kelurahan Tembilahan Hulu	116
4.3.2	Letak Geografis Kelurahan Tembilahan Hulu	116
4.3.3	Kependudukan Kelurahan Tembilahan Hulu.....	118
4.3.4	Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kelurahan Tembilahan Hulu	118
4.3.4.1	Kondisi Sosial Kelurahan Tembilahan Hulu	119
4.3.4.2	Kondisi Budaya Kelurahan Tembilahan Hulu	119
4.3.4.3	Kondisi Ekonomi Kelurahan Tembilahan Hulu	119

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1	Mengidentifikasi Kondisi Eksisting	122
5.1.1	Bangunan Gedung	122
5.1.2	Jalan Lingkungan	127

5.1.3 Penyediaan Air Minum	130
5.1.4 Drainase Lingkungan	133
5.1.5 Pengelolaan Air Limbah.....	138
5.1.6 Pengelolaan Persampahan	141
5.1.7 Proteksi Kebakaran	146
5.1.8 Identifikasi Legalitas Tanah	157
5.1.9 Identifikasi Pertimbangan Lain	157
5.2 Mengidentifikasi Tipologi Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.....	158
5.3 Menganalisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh di Tembilihan Hulu	163
5.4 Merumuskan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tembilihan Hulu	174
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan.....	182
6.2 Saran	189

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Formulasi Penilaian Lokasi Permukiman Kumuh. 33
Tabel 2.2	Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh..... 42
Tabel 2.3	Klasifikasi Pola Penanganan Permukiman Kumuh..... 53
Tabel 2.4	Pola Penanganan Berdasarkan Tipologi Permukiman Kumuh 54
Tabel 2.5	Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh..... 62
Tabel 2.6	Tinjauan Produk Legal 65
Tabel 2.7	Sintesa Teori..... 67
Tabel 2.8	Penelitian Terdahulu 73
Tabel 3.1	Jadwal Waktu Penelitian 81
Tabel 3.2	Sumber dan Jenis Data Sekunder 84
Tabel 3.3	Rumus Perhitungan Tingkat Kekumuhan 90
Tabel 3.4	Desain Survei 99
Tabel 4.1	Luas dan Persentase Wilayah Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018..... 107
Tabel 4.2	Jenis Penggunaan Lahan Dan Luas Lahan di Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2018..... 113
Tabel 4.3	Data Kependudukan Berdasarkan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2018 114
Tabel 4.4	Data Kependudukan di Kelurahan Tembilahan Hulu Tahun 2018..... 118

Tabel 5.1	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu.....	121
Tabel 5.2	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu	147
Tabel 5.3	Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.....	163
Tabel 5.4	Database Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu	165
Tabel 5.5	Perhitungan Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh di Kawasan Kelurahan Tembilahan Hulu	171
Tabel 5.6	Pola Penanganan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya	176
Tabel 5.7	Hasil Formulasi Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu	180
Tabel 5.8	Penanganan Fisik Infrastruktur Menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	183

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Orientasi Kecamatan Tembilahan Hulu 11
Gambar 1.2	Peta Orientasi Kelurahan Tembilahan Hulu 12
Gambar 1.3	Kerangka berfikir 15
Gambar 3.1	Bagan Alur Penelitian 103
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir 108
Gambar 4.2	Peta Administrasi Kecamatan Tembilahan Hulu 112
Gambar 4.3	Peta Administrasi Kelurahan Tembilahan Hulu 117
Gambar 5.1	Kondisi Ketidakteraturan Bangunan 122
Gambar 5.2	Kondisi Tingkat Kepadatan Bangunan 123
Gambar 5.3	Kondisi Bangunan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis..... 125
Gambar 5.4	Peta Mapping Kondisi Eksisting Bangunan Gedung di Kelurahan Tembilahan Hulu 126
Gambar 5.5	Kondisi Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 127
Gambar 5.6	Kondisi Kualitas Jalan Lingkungan 128
Gambar 5.7	Peta Mapping Kondisi Eksisting Jalan Lingkungan di Kelurahan Tembilahan Hulu 129
Gambar 5.8	Akses Air Minum 130
Gambar 5.9	Peta Mapping Kondisi Eksisting Penyediaan Air Minum Di Kelurahan Tembilahan Hulu 132
Gambar 5.10	Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air 133
Gambar 5.11	Ketidaktersediaan Drainase 134

Gambar 5.12	Kualitas Kontruksi Drainase	136
Gambar 5.13	Peta Mapping Kondisi Eksisting Drainase Lingkungan di Kelurahan Tembilahan Hulu	137
Gambar 5.14	Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	138
Gambar 5.15	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis.....	139
Gambar 5.16	Peta Mapping Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Tembilahan Hulu	140
Gambar 5.17	Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah	142
Gambar 5.18	Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Tidak Sesuai	143
Gambar 5.19	Peta Mapping Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Tembilahan Hulu.....	145
Gambar 5.20	Kondisi Tipologi Permukiman Tepian Sungai/Parit	159
Gambar 5.21	Peta Tipologi Kawasan Tepi Air Permukiman Kumuh Kota Tembilahan Hulu.....	160
Gambar 5.22	Kondisi Tipologi Permukiman Dataran Rendah	161
Gambar 5.23	Peta Tipologi Kawasan Dataran Rendah Permukiman Kumuh Kota Tembilahan Hulu.....	162
Gambar 5.24	Grafik Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota adalah kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Untuk dapat mengoptimalkan perkembangan kota, maka pemanfaatan ruang wilayah kota perlu diarahkan dalam rencana tata ruang kota yang terdiri dari struktur ruang dan pola ruang. Sesuai dengan Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang tujuan dari penataan ruang dimaksudkan untuk mencapai kondisi aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dalam UU No 26 Tahun 2007 terdapat pola ruang yang didalamnya terdiri atas kawasan lindung dan budidaya, dalam hal ini salah satu kawasan budidaya yaitu permukiman/perumahan. Perumahan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan suatu wilayah, karena kehidupan suatu wilayah akan didukung dengan baik dan tidaknya kehidupan perumahan yang ada dalam wilayah tersebut (Asteriani 2011). Permukiman terbentuk dari kawasan perumahan yang di lengkapi dengan prasarana dan sarana dasar serta fasilitas penunjang lingkungan lainnya untuk menjamin terselenggaranya aktivitas kehidupan penduduknya (Bintang 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwasannya perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sedangkan Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Saat ini dengan berkembangnya permukiman kumuh di perkotaan, menuntut adanya upaya untuk dilakukannya suatu penanganan, dengan adanya upaya untuk melakukannya dan pembangunan kota yang berarti meningkatkan kualitas lingkungan kota, akan tetapi hal ini sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adanya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai upaya meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, maka dilakukan serangkaian kegiatan ditingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan/desa secara sinergis dengan *platform* kolaborasi.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis

komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya kemunculan kawasan permukiman kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas kota yang tinggi. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa (*non urban*) yaitu rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya pengembangan perekonomian dan makin berkurangnya lahan produktif. Kedua faktor tersebut mempengaruhi keinginan penduduk desa untuk berpindah ke kota yang menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah, yang berawal dari rendahnya pengetahuan, keterampilan, modal dan kesadaran yang mereka miliki. Kondisi ini mendorong timbulnya kawasan permukiman di daerah perkotaan.

Keberadaan kawasan permukiman kumuh di kota-kota besar dan berkembang telah menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah baik ditinjau dari aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial. Kondisi ini disebabkan oleh adanya budaya masyarakat yang suka hidup mengelompok dan kurang memperhitungkan ruang-ruang untuk fasilitas penunjang kawasan permukiman dalam melakukan pembangunan rumah. Akibatnya kawasan yang terbangun tidak memperhatikan aspek keruangan, lingkungan dan sosial yang berimplikasi memberikan gambaran suatu kawasan permukiman yang kumuh.

Pada umumnya daerah kumuh terbentuk sejalan dengan proses perkembangan dan kepadatan lingkungan kota. Lingkungan kumuh tidak hanya memberikan efek visual yang buruk, juga memberikan kontribusi yang tidak

baik bagi perkembangan fisik kota secara umum serta hanya membantu penduduk untuk sekedar tinggal tanpa memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang positif.

Dalam Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh memiliki 7 (tujuh) indikator perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Adapun Penanganan kawasan permukiman kumuh melalui upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Adapun bentuk pola-pola penanganan sebagaimana yang dimaksud dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu : a) pemugaran; b) peremajaan; atau c) pemukiman kembali.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi besar di Indonesia yang banyak mengalami permasalahan permukiman sehingga menyebabkan permukiman terlihat kumuh. Berdasarkan data Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Provinsi Riau tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh bahwasannya di Provinsi Riau memiliki 5 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh diantaranya yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Saat ini Kabupaten Indragiri Hilir kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu ini telah ditetapkan pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.583/VIII-HK Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas 129, 743 m². Akan tetapi belum ada penanganan sama sekali di Kelurahan Tembilihan Hulu ini, hingga pada tahun 2017 di tetapkan kembali Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 133/II-HK Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir bahwasannya ditetapkan Kecamatan Tembilihan Hulu sebagai kawasan permukiman kumuh yang berepatan di Kelurahan Tembilihan Hulu dengan luas 20,06 Ha.

Perkembangan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu sangat pesat sehingga perlu diantisipasi. Dalam upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terutama fasilitas sarana dan prasarana masyarakat seperti perumahan, kebutuhan infrastruktur dan kebutuhan lainnya, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan langkah awal dengan melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh melalui program kota tanpa kumuh ini.

Berdasarkan BPS Kecamatan Tembilihan Hulu Dalam Angka tahun 2018 bahwasannya luas wilayah Kecamatan Tembilihan Hulu adalah 183,60 Km² sedangkan Kelurahan Tembilihan Hulu mempunyai luas wilayah sebesar 10,00 Km² dengan 60 RT, dan 17 RW serta jumlah penduduk di Kelurahan Tembilihan Hulu sebanyak 26,888 jiwa yang merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Tembilihan Hulu.

Maka saat ini pemerintah daerah belum mampu untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat kekumuhan dengan kemampuan memperbaiki atau membangun rumah dari penduduk di Kelurahan Tembilihan Hulu. Ketidakmampuan ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak untuk membantu penduduk memperbaiki atau membangun rumah. Masih sangat sedikit program pemerintah daerah yang dilakukan untuk membantu proses penanganan pada kawasan permukiman kumuh perkotaan khususnya di Kelurahan Tembilihan Hulu. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas perlu dilakukan suatu kajian mengenai “Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan Tembilihan Hulu”

1.2 Rumusan Masalah

Kecamatan Tembilihan Hulu merupakan kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh dengan satu kelurahan yaitu di Kelurahan Tembilihan Hulu. Adapun permasalahan yang dimiliki permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu ini melalui 7 (tujuh) indikator tersebut terdiri dari bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Maka dari itu permasalahan yang terjadi di kelurahan ini dari aspek bangunan gedung yaitu kondisi bangunannya terdapat banyak rumah tidak layak huni, aspek jalan lingkungan yang saat ini memiliki masalah yaitu sebagian dari jalan lingkungan yang kurang layak dikarenakan kondisi jalan hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 (dua) saja, dari aspek drainase lingkungan

dimana masih banyak drainase lingkungan belum terbangun, lalu dari aspek penyediaan air minum masyarakat dikawasan permukiman ini masih bergantung pada air hujan, air sungai serta membeli air minum isi ulang.

Aspek air limbah di kawasan permukiman ini masih terdapat rumah yang belum terpenuhi sarana dan prasarana air limbah rumah tangga, terutama permukiman yang di pinggir parit/sungai. aspek persampahan yang kurang dilayani angkutan sampah perkotaan sehingga hampir seluruh masyarakat mengolah sampah dengan cara di bakar atau dibuang ke sungai. Kemudian terakhir aspek proteksi kebakaran ini belum adanya sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang memadai.

Dari permasalahan tujuh indikator permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu tersebut, dengan ini melalui adanya program kota tanpa kumuh (KOTAKU) belum ada penanganan yang optimal dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga menyebabkan kawasan permukiman di kelurahan ini sampai saat ini terkesan kumuh yang berdampak merusak citra kota dikarenakan Kelurahan Tembilahan Hulu ini merupakan Ibu Kota Kecamatan Tembilahan Hulu.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan yang dapat dijadikan bahan studi dalam penyusunan tugas akhir ini, yaitu **“Bagaimana Penanganan Permukiman Kumuh Yang Sesuai Dengan Kondisi Karakteristik Lingkungan di Kelurahan Tembilahan Hulu?”**

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang mendasari pemikiran dalam penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu Tersusunnya Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kelurahan Tembilihan Hulu.

1.4 Sasaran

Dalam penelitian ini untuk mencapai tujuan maka adanya proses secara sistematis yaitu berupa sasaran, adapun sasaran dalam penelitian ini yaitu :

1. Teridentifikasinya kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.
2. Teridentifikasinya tipologi kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu
3. Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.
4. Merumuskan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Tembilihan Hulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya suatu tujuan, adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah :

1. Manfaat bagi instansi/pemerintahan.

Penelitian mengenai Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan Tembilihan Hulu dengan indikator yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase

lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Tentunya dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah atau instansi terkait di Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan tingkat kekumuhan permukiman di Kecamatan Tembilahan Hulu sehingga dapat membantu pemerintah untuk menyusun dan merumuskan kebijakan strategi dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di Kelurahan Tembilahan Hulu.

2. Manfaat bagi peneliti/akademis

Penelitian ini sebagai memperoleh wawasan secara teoritis dan praktikal terhadap ilmu perencanaan wilayah dan kota mengenai Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan Tembilahan Hulu

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan referensi untuk membuat penelitian selanjutnya.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ruang lingkup studi yang mencakup masalah-masalah yang dibahas dalam studi dan ruang lingkup wilayah dan yang dijadikan objek studi.

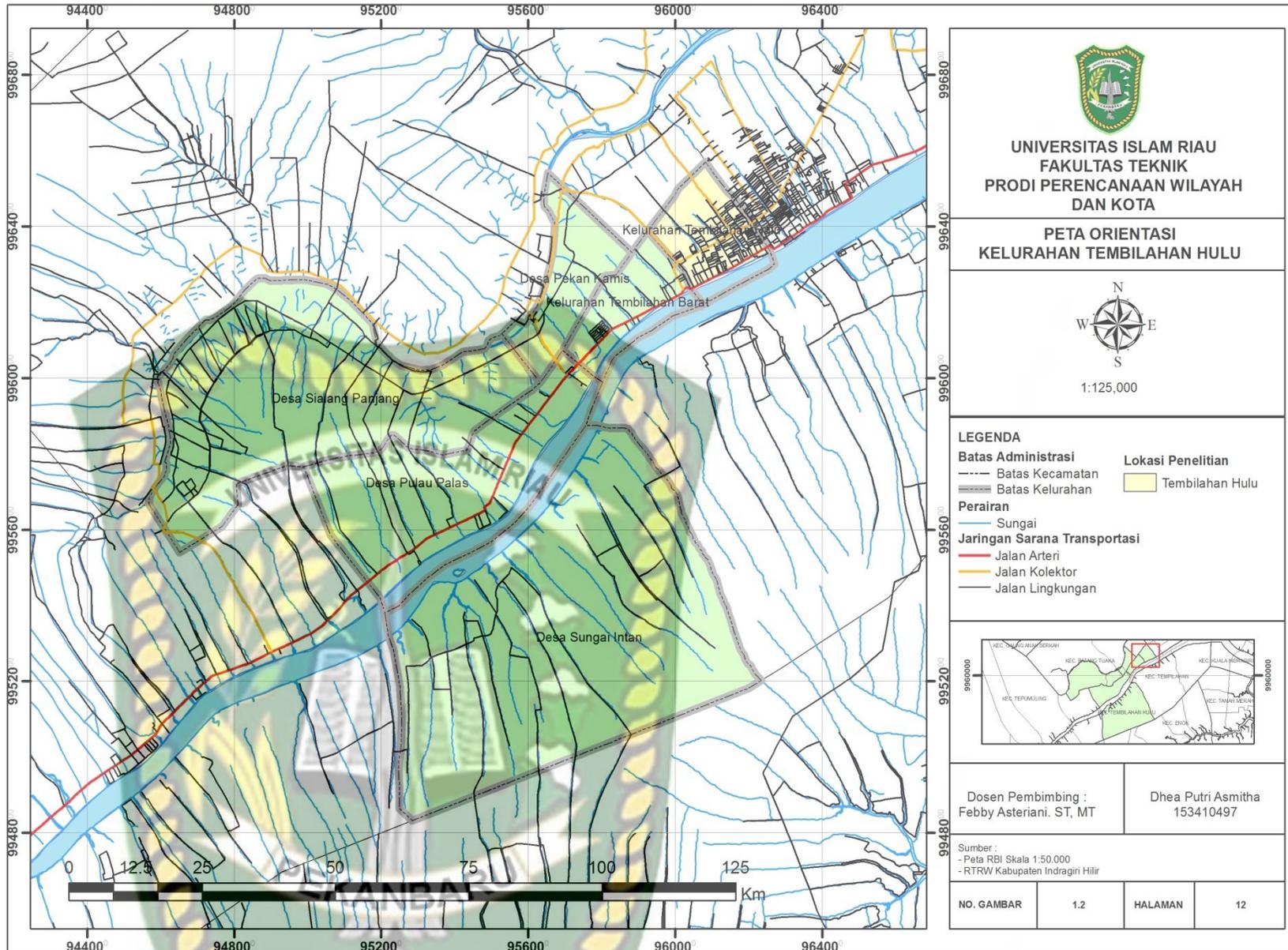
1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi wilayah Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Kecamatan Tembilihan Hulu ini memiliki luas sebesar 183,60 Km², dan secara geografis Kecamatan Tembilihan Hulu berbatasan dengan;

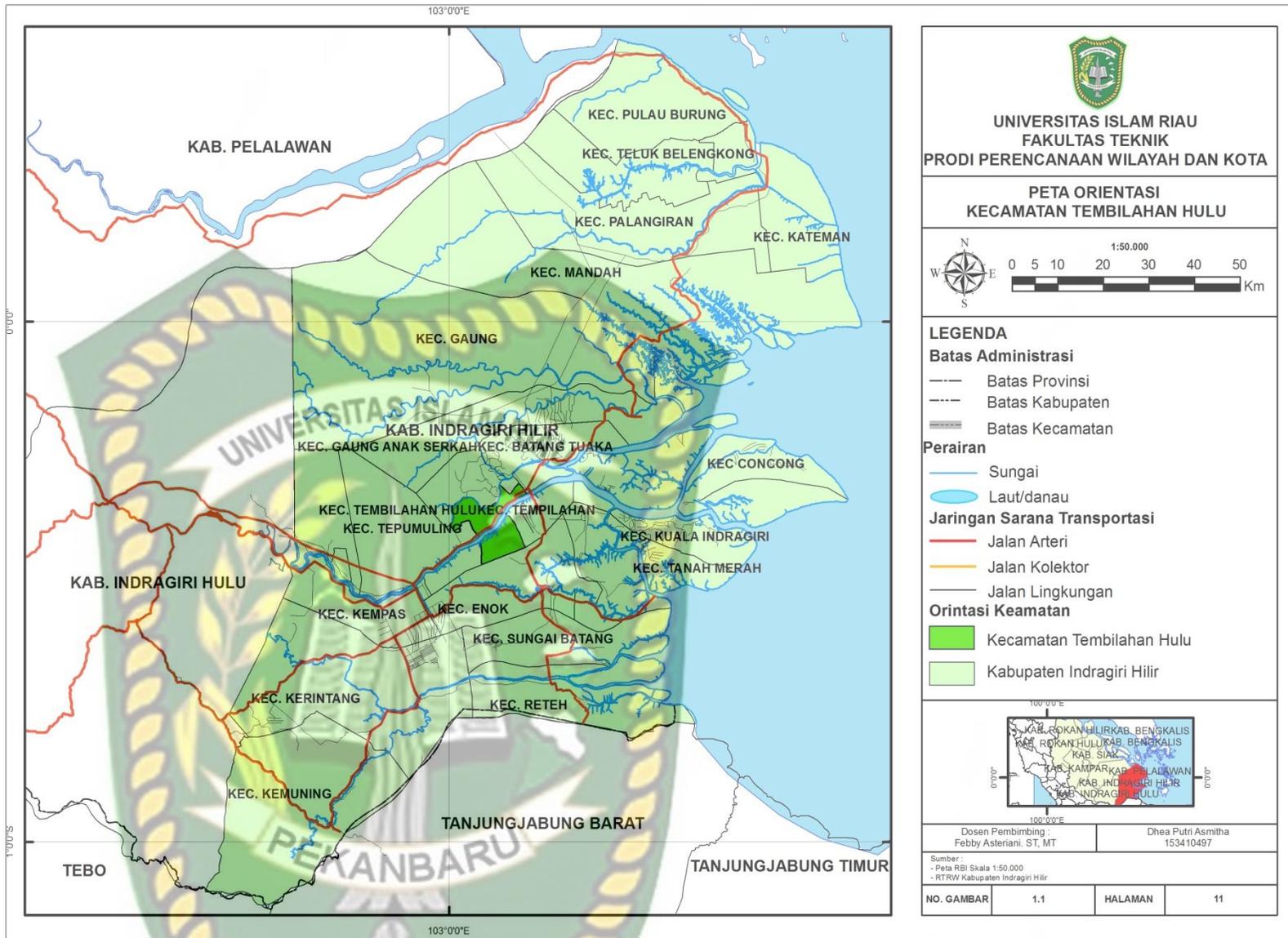
- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tempuling.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tembilihan.

Sedangkan luas Kelurahan Tembilihan Hulu dengan luas sebesar 10,00 Km² dan secara geografis Kelurahan Tembilihan Hulu berbatasan dengan;

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tembilihan Barat.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pekanbaru, Kecamatan Tembilihan.
- d) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Enok.



Gambar 1.1 Peta Orientasi Kecamatan Tembilaan Hulu



Gambar 1.2 Peta Orientasi Kelurahan Tembilahan Hulu

1.6.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi merupakan batasan cakupan penelitian dengan tujuan agar penelitian ini lebih terarah, efektif juga efisien terhadap output penelitian yaitu strategi penanganan kawasan permukiman kumuh kota di Kelurahan Tembilahan Hulu. Dalam penelitian ini memiliki batasan penelitian yaitu:

- a) Penelitian ini berfokus pada identifikasi kondisi eksisting kawasan kumuh, tipologi kawasan kumuh, dan analisis tingkat kekumuhan adengan fokus kajiannya terhadap aspek fisik dan non fisik kriteria kawasan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh.
- b) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan teknik penelitian berupa observasi sesuai kriteria kawasan permukiman kumuh dan wawancara, dengan jangka waktu penelitian dimulai dari bulan Mei hingga bulan Agustus Tahun 2019.
- c) Penelitian ini menghasilkan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh dengan berpedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016.
- d) Pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu membentuk arahan bentuk design visual terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.

1.7 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan langkah kerja untuk mencapai output yang diharapkan. Berikut gambar 1.3 kerangka berpikir dalam penelitian ini :



INPUT

Latar Belakang :

- Rendahnya kualitas permukiman di Kelurahan Tembilaan Hulu
- Kelurahan Tembilaan Hulu ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Nomor 583 Tahun 2014 tetap belum adanya penanganan maka ditetapkan kembali melalui SK Nomor 133 Tahun 2017
- Rendahnya program pemerintah daerah dalam membantu proses penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilaan Hulu

Kebijakan Produk Legal :

- UU No 26 Tahun 2017
- UU No 1 Tahun 2011
- PermenPU No 2 Tahun 2016
- SK Bupati Nomor 583 Tahun 2014
- SK Bupati Nomor 133 Tahun 2017

Rumusan Masalah :

- Infrastruktur permukiman di Kelurahan Tembilaan Hulu yang belum memadai
- Kawasan permukiman di Kelurahan Tembilaan Hulu terkesan kumuh dan merusak citra kota

Pertanyaan Penelitian :

“Bagaimana Penanganan Permukiman Kumuh Yang Sesuai Dengan Kondisi Karakteristik Lingkungan di Kelurahan Tembilaan Hulu?”

Tujuan :

Tersusunnya Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kelurahan Tembilaan Hulu

Sasaran :

- Identifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh kota di Kelurahan Tembilaan Hulu.
- Identifikasi tipologi kawasan permukiman kumuh kota di Kelurahan Tembilaan Hulu.
- Analisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh kota di Kelurahan Tembilaan Hulu.
- Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kelurahan Tembilaan Hulu.

PROSES

Tinjauan Pustaka

- Konsep Permukiman
- Indikator Permukiman Kumuh
- Tipologi Permukiman Kumuh
- Tingkat Kekumuhan
- Tujuan Program KOTAKU
- Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Data :

- Kebijakan
- Data primer (observasi, wawancara)
- Data Sekunder (data instansi)

Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kelurahan Tembilaan Hulu

Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kelurahan Tembilaan Hulu

Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kelurahan Tembilaan Hulu

F E E D B A C K

OUTPUT

“Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kelurahan Tembilaan Hulu”

Kesimpulan dan Saran

Gambar 1.3 Kerangka berfikir
Sumber : Hasil Analisis 2019

1.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan Tembilahan Hulu”

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan, kerangka pikir serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kumpulan teori yang berkaitan dengan studi penelitian yaitu mengenai definisi/teori permukiman, teori konsepsi permukiman, pengertian permukiman kumuh, indikator permukiman kumuh, tingkat permukiman kumuh, legalitas lahan, tipologi permukiman kumuh, pola persebaran permukiman, pengertian program kota tanpa kumuh, strategi penanganan permukiman kumuh, tinjauan kebijakan permukiman kumuh, dan penelitian terdahulu terkait permukiman kumuh.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis data dan sumber data, teknik analisis data, tahapan penelitian, desain survei, dan bagan alur penelitian yang digunakan dalam merumuskan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan Tembilahan Hulu.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, sejarah, letak geografis, penggunaan lahan, kependudukan, serta kondisis sosial ekonomi dan budaya Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Hulu.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil analisis, kondisi eksisiting permukiman kumuh, tipologi permukiman kumuh, tingkat kekumuhan permukiman kumuh, dan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari tahap pembahasan dan analisis mengenai strategi penanganan kawasan permukiman kumuh kota di Kecamatan Tembilahan Hulu.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

2.1.1 Konsep Perumahan dan Permukiman

a. Perumahan

Perumahan dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Terkait dengan pembangunan perumahan, sering didengar istilah perumahan rakyat. Perumahan rakyat adalah sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum, maupun fasilitas sosial yang dibangun bagi kepentingan rakyat. Perumahan rakyat dapat

diartikan sebagai sekumpulan rumah yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah. (Muta'ali 2015)

Perumahan tidak sama dengan permukiman. Permukiman merupakan lingkungan tempat tinggal manusia dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung perikehidupan dan penghidupan para penghuninya. Perumahan lebih tepat didefinisikan sebagai sekelompok atau sekumpulan rumah. Dalam SNI 03-6981-2004 perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang dengan prasarana dan sarana lingkungan. Sebagai sekelompok rumah, perumahan dapat menjadi bagian dari permukiman. Perbedaan yang nyata antara perumahan dan permukiman terletak pada fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghuninya. Lingkungan perumahan hanya berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penghuninya dan tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah. (Muta'ali 2015).

Dalam pandangan islam selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Dimana dijelaskan dalam *Q.S An Nahl Ayat 80* yaitu :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ
مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ
إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا
وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

Terjemahnya :

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu). (Q.S An Nahl Ayat 80)

Menurut tim Mujamma' Raja Fahd arahan Syaikh al-Allamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh: Allah menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai istirahat dan tempat tinggal bersama keluarga kalian, sedang kalian bermukim di pemukiman yang menetap. Dia menjadikan bagi kalian, saat safar, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang ringan kalian bawa pada waktu bepergian, dan ringan untuk kalian dirikan pada waktu kalian bermukim setelah menempuh perjalanan. Dia menjadikan untuk kalian dari bulu domba, onta dan kambing, sebagai perkakas bagi kalian berupa selimut, pakaian, penutup, permadani dan perhiasan, yang kalian nikmati hingga waktu tertentu (Tafsir al-Muyassar).

b. Permukiman

Terdapat perbedaan pengertian antara pemukim, pemukiman, dan permukiman. Permukiman berasal dari kata pemukim. Dari asal katanya terdapat tiga istilah penting dalam permukiman yang berbeda maknanya, yaitu pemukim, pemukiman, permukiman. (Muta'ali 2015)

- Pemukim

Pemukim adalah penghuni suatu tempat atau rumah. Pemukim memiliki arti seseorang yang menghuni suatu tempat tinggal.

- Pemukiman

Pemukiman berasal dari kata pemukim dengan akhiran –an. Secara ilmu bahasa, kata pemukiman tergolong ke dalam kata kerja yang dengan *to settle*. Dari pembentukan katanya, permukiman memiliki arti tindakan memukimkan. Artinya, permukiman adalah suatu tindakan untuk memukimkan seseorang pada suatu lokasi atau tempat tinggal tertentu.

- Permukiman

Secara ilmu bahasa, kata permukiman tergolong ke dalam kata benda. Dalam bahasa Inggris, permukiman dikenal sebagai *human settlement*, yaitu suatu kumpulan manusia baik di kota maupun desa, lengkap dengan aspek-aspek sosial, spiritual, dan nilai-nilai budaya yang menyertainya. Beberapa konsep yang menyangkut permukiman, menurut Finch (1957 dalam Muta'ali 2015) dalam Nugroho (2010).

2.1.2 Pola Persebaran Permukiman

Pola persebaran permukiman secara jelas dipengaruhi oleh variasi penggunaan lahan, kondisi topografi, ketinggian tempat dan faktor aksesibilitas daerah kondisi sosial – ekonomi penduduk maupun fasilitas sosial – ekonomi, yang dalam perkembangannya akan sangat mempengaruhi pola maupun persebaran permukiman di suatu daerah. Pola permukiman menunjukkan tempat bermukim manusia dan bertempat tinggal menetap dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari-harinya. Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah dimana penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya. Pengertian pola dan sebaran permukiman memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Dwi Ari dan Antariksa (2005) pola permukiman membicarakan persebaran permukiman dengan kata lain pola permukiman secara umum merupakan persebaran permukiman

Pengertian pola permukiman dan persebaran (*dispersion*) permukiman mempunyai hubungan yang erat. Persebaran permukiman membicarakan hal dimana terdapat permukiman dan dimana tidak terdapat permukiman disuatu daerah permukiman. Dengan kata lain persebaran permukiman berbicara tentang lokasi permukiman, disamping itu juga membahas cara terjadinya persebaran permukiman, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap persebaran tersebut. Pola permukiman membicarakan sifat dari persebaran permukiman tersebut. Dengan kata lain, pola permukiman secara umum merupakan susunan sifat

persebaran permukiman dan sifat hubungan antara faktor-faktor yang menentukan terjadinya sifat persebaran permukiman tersebut.

Pola persebaran permukiman dibagi menjadi tiga tipe, yaitu pola bergerombol atau mengelompok (*cluster pattern*), pola acak (*random pattern*) dan pola tersebar (*scatter pattern*). Pola persebaran permukiman mengelompok terjadi jika dari unit permukiman mengelompok secara kompak, sedangkan pola persebaran permukiman menyebar terjadi jika jarak antar unit permukiman satu dengan yang lainnya cukup panjang dalam satu kelompok unit permukiman (Hagget, 2001).

2.2 Permukiman Kumuh

2.2.1 Pengertian Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016).

Menurut (Undang–Undang No. 1 pasal 1 ayat 13 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman) dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Menurut (Rindrojono 2013) Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang

diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.

Berdasarkan pendapat (Arharya 2010 dalam Muta'ali 2015), kawasan kumuh di definisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya ketersediaan fisik (ruang terbuka hijau/RTH, drainase, suplai air bersih, jaringan komunikasi, dan lain-lainnya) dan fasilitas sosial (organisasi, sosial kesehatan dan sebagainya). Sedangkan menurut (Suparlan 2004 dalam Muta'ali 2015) mengartikan kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat dikawasan tersebut sangat buruk.

2.2.2 Indikator Permukiman Kumuh

Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan infrastruktur keciptakaryaan pada suatu lokasi. Identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku, serta standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan secara nasional berdasarkan beberapa kriteria yang sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 yaitu;

1) Bangunan Gedung

Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung ini mencakup sebagai berikut :

a. Ketidakteraturan bangunan

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang :

- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan
- Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.

b. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan :

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan/atau
- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

c. Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung

Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:

- Pengendalian dampak lingkungan;
- Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau dibawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana atau sarana umum;
- Keselamatan bangunan gedung;
- Kesehatan bangunan gedung;
- Kenyamanan bangunan gedung; dan
- Kemudahan bangunan gedung.

Dalam hal Kabupaten/Kota belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara. Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

2) Jalan Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup sebagai berikut:

- a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

b. Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

3) Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup sebagai berikut :

a. Ketidakterediaan akses aman air minum

Ketidakterediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kesehatan yaitu yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.

b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

4) Drainase Lingkungan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan mencakup sebagai berikut :

a. Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan

genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

b. Ketidaktersediaan drainase

Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia.

c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

d. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- Pemeliharaan rutin; dan/atau
- Pemeliharaan berkala.

e. Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

5) Pengelolaan Air Limbah

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup sebagai berikut :

- a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

- b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:

- Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; dan
- Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

6) Pengelolaan Persampahan

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup sebagai berikut:

- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:

- Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;

- Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) pada skala lingkungan;
- Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
- Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Pewadahan dan pemilahan domestik;
- Pengumpulan lingkungan;
- Pengangkutan lingkungan; dan
- Pengolahan lingkungan.

c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:

- Pemeliharaan rutin; dan/atau
- Pemeliharaan berkala

7) Proteksi Kebakaran

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan sebagai berikut:

a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya :

- Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air dan hidran);
- Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi;
- Sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemadam kebakaran; dan/atau
- Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi :

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- Kendaraan pemadam kebakaran;
- Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau
- Peralatan pendukung lainnya.

2.2.3 Tingkat Kekumuhan

Identifikasi satuan permukiman merupakan tahap identifikasi untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman swadaya dari setiap lokasi. Penentuan satuan permukiman untuk permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif, dimana penentuan satuan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun tetangga. Identifikasi kondisi kekumuhan merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukan permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Berikut penilaian lokasi berdasarkan aspek permasalahan kekumuhan terdiri atas klasifikasi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016). Berikut tabel 2.1 Formulasi Penilaian Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh.

Tabel 2.1 Formulasi Penilaian Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN						
1.	Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan • 51-75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan • 25-50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 	5 3 1	Dokumen RDTR dan RTBL, Format isian dan Observasi
		Tingkat Kepadatan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; • KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; • Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha - Untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan • 51-75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan • 25-50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	5 3 1	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian dan Peta Lokasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian dampak lingkungan • Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umu • Keselamatan bangunan gedung • Kesehatan bangunan gedung • Kenyamanan bangunan gedung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis • 51-75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis • 25-50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, dan Observasi
2.	Kondisi Jalan Lingkungan	Cangkupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 51-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 25-50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, dan Observasi
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk • 51-75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan • 25-50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, dan Observasi
3.	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan akses aman air minum	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % populasi tidak dapat mengakses air • 51-75% populasi tidak dapat mengakses air • 25-50% populasi tidak dapat mengakses air 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60	• 76-100 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, dan

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			liter/orang/hari	<ul style="list-style-type: none"> • 51-75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya • 25-50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3 1	Observasi
4.	Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan Limpasan Air	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area Terjadigenangan >30 cm, > 2 jam dan >2 x setahun • 51-75% area Terjadigenangan >30 cm, > 2 jam dan >2 x setahun • 25-50% area Terjadigenangan >30 cm, > 2 jam dan >2 x setahun 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Ketidakterseediaan Drainase	Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area tidak tersedia drainase lingkungan • 51-75% area tidak tersedia drainase lingkungan • 25-50% area tidak tersedia drainase lingkungan 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya • 51-75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya • 25-50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan rutin; dan/atau • Pemeliharaan berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau • 51-75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau • 25-50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Kualitas Konstruksi Drainase	Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki kualitas konstruksi kualitas drainase buruk • 51-75% area memiliki kualitas konstruksi kualitas drainase buruk • 25-50% area memiliki kualitas konstruksi kualitas drainase buruk 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
5.	Kondisi PengelolaAn Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 51-75% area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standar teknis • 25-50% area memiliki system air limbah yang tidak sesuai standar teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> • Kloset leher angsa tidak terhubung 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki sarpras air limbah tdak sesuai persyaratan teknis • 51-75% area memiliki sarpras 	5 3	Wawancara, Format Isian, dan Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
		Sesuai dengan Persyaratan Teknis	dengan tangki septik; <ul style="list-style-type: none"> • Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat 	air limbah tdk sesuai persyaratan teknis <ul style="list-style-type: none"> • 25-50% area memiliki sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis 	1	
6.	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • Tempat pengumpulan sampah (tps) atau tps 3r (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; • Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan • Tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) pada skala lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki sarpras pengelolaan persampahan limbah tdk sesuai persyaratan teknis • 51-75% % area memiliki sarpras pengelolaan persampahan limbah tdk sesuai persyaratan teknis • 25-50% % area memiliki sarpras pengelolaan persampahan limbah tdk sesuai persyaratan teknis 	5 3 1	Wawancara, Format Isian, dan Observasi
		Sistem Pengelolaan Persampahan yang Tidak Sesuai Standar Teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Pevadahan dan pemilahan domestik; • Pengumpulan lingkungan; • Pengangkutan lingkungan; • Pengolahan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki system persampahan tidak sesuai standar • 51-75% area memiliki system persampahan tidak sesuai standar • 25-50% area memiliki system persampahan tidak sesuai standar 	5 3 1	
		Tidak Terpeliharanya	Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • 76-100 % area memiliki sarpras persampahan yang 	5	

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
			atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah.			
		Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/peremukiman sesuai RTR • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan tanah, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(+) (-)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN						
1	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada: <ul style="list-style-type: none"> • Fungsi strategis kabupaten/kota; atau • Bukan fungsi strategis kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota • Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kabupaten/kota 	5 1	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi
		Kependudukan	Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • Sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151– 200 jiwa/ha; • Tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201–400 jiwa/ha; • Sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; 	Untuk Metropolitan & Kota Besar <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha Untuk Kota Sedang & Kota Kecil <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar 151 - 200 	5 3	Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi

No	Aspek	Kriteria	Indikator	Parameter	Nilai	Sumber Data
				Jiwa/Ha • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha	1	
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: • Potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan; • Potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; • Potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.	• Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau dipelihara • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara	5 1	Wawancara, Format Isian, Observasi

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016



Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2 Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh

Nilai	Keterangan	Kalsifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71-95	Kumuh Berat	x	x	x	x	x	x												
45-70	Kumuh sedang							x	x	x	x	x	x						
19-44	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
Legalitas Tanah																			
(+)	Status Tanah Legal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
(-)	Status Tanah Tidak Legal		X		x		x		x		x		x		x		x		x
Pertimbangan Lain																			
11-15	Pertimbangan Lain Tinggi	xx			xx			xx			xx			xx			xx		
6-10	Pertimbangan Lain Sedang		xx			xx			xx			xx			xx			xx	
1-5	Pertimbangan Lain Rendah			xx			xx			xx			xx			xx			xx
Skala Prioritas Penanganan =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - A. Kumuh berat bila memiliki nilai 71-95;
 - B. Kumuh sedang bila memiliki nilai 45 - 70;
 - C. Kumuh ringan bila memiliki nilai 19 - 44;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - A. Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - B. Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - C. Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - A. Status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);
 - B. Status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status tanah tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status tanah tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah legal;

18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

2.3 Tipologi Permukiman Kumuh

Kawasan kumuh memiliki tipologi berdasarkan berbagai macam aspeknya. Menurut (UN-Habitat 2003 dalam Muta'ali 2015) penilaian terhadap tipologi kawasan kumuh dapat dilihat dari dua perspektif umum, yaitu proses pembentukan dan jenis spasialnya. Maka secara umum mengenai perbedaan antara kawasan kumuh yang disebabkan oleh degradasi kawasan pada kawasan zona lama di pusat kota dengan kawasan baru sebagai akibat perkembangan permukiman *squatter* yang menempati lahan-lahan kota secara ilegal.

Pada dasarnya maksud pembentukan lokasi kawasan kumuh mengurangi *cost* atau biaya transportasi. Hal ini juga sebagai *multiplier effect* terhadap pesatnya perkembangan pusat kota yang tidak bisa dikendalikan oleh pusat pemerintah. Bila dilihat dari asal usul dan umurnya, kawasan kumuh terlihat jelas pada sisi sejajar pembentukan pusat kota. Pembentukan kawasan modern saat ini lebih cenderung menjauh atau memisahkan diri dari kota asalnya. Hal ini justru menimbulkan kesenjangan, terutama dalam hal penyediaan layanan dasar sehingga berdampak besar pada penurunan kondisi fisik kawasan tersebut karena faktor konsolidasi dan subdivisi lahan secara informal.

Berdasarkan lokasi atau letaknya kawasan kumuh dibedakan menjadi kawasan kumuh di pusat kota dan kawasan kumuh di pinggiran kota. Berdasarkan legalitas dan kerentanannya, kawasan kumuh dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh legal (formal) dan kawasan kumuh ilegal (informal). Kawasan kumuh legal lebih mudah dijumpai dalam kawasan permukiman kampung tradisional yang memadat dan menjadi kumuh. Sedangkan kawasan kumuh ilegal dapat ditemui di beberapa kawasan yang tidak memiliki status tanah dan bangunan serta berlokasi di kawasan non permukiman. Kawasan kumuh informal tentu memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap penggusuran. (Muta'ali 2015).

Ditinjau dari pemetaan kondisi dan permasalahan lingkungan permukiman secara spasial, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 terdiri atas beberapa tipologi permukiman kumuh yaitu:

1) Permukiman kumuh di atas air

Permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.

2) Permukiman kumuh di tepi air

Permukiman kumuh yang berada tepi badan air seperti (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

3) Permukiman kumuh di dataran rendah

Permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng $< 10\%$.

4) Permukiman kumuh di perbukitan

Permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng $> 10\%$ dan $< 40\%$.

5) Permukiman kumuh di daerah rawan bencana

Permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

2.4 Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

2.4.1 Pengertian Program KOTAKU

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. (Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi *platform* kolaborasi yang mendukung penanganan permukiman kumuh secara bertahap di seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh. (Pedoman Umum program KOTAKU).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

2.4.2 Tujuan Program KOTAKU

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di

permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah. Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

2.4.3 Kaitan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dengan Perencanaan Wilayah dan Kota

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu upaya strategis untuk mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh di Indonesia dengan memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman menjelaskan bahwa permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Maka dengan adanya program KOTAKU melalui penanganan akses infastruktur disuatu permukiman memiliki keterkaitan dalam perencanaan wilayah dan kota terdiri atas:

1. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana dan prasarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan dikawasan perkotaan maupun perdesaan, kawasan permukiman merupakan kawasan budidaya yang diatur dalam penataan ruang, salah satu permasalahan di kawasan permukiman ialah permukiman kumuh yang proses penanganannya diatur dalam program kota tanpa kumuh sebagai upaya pemerintah untuk penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Dengan demikian program kota tanpa kumuh dalam kawasan permukiman berperan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang perkotaan.

2.5 Strategi Penanganan Permukiman Kumuh

2.5.1 Pengertian Strategi

Pengertian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan.

2.5.2 Pola Penanganan Permukiman Kumuh

Dalam upaya penanganan atau peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Bentuk-bentuk peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan dengan pola-pola penanganan meliputi (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016):

a. Pemugaran

Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Pemugaran merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.

b. Peremajaan

Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan

penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

c. Pemukiman Kembali

Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Sehingga dari pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh diatas maka direncanakan dengan mempertimbangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 yaitu:

- a) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- f) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Seperti pada tabel 2.3 klasifikasi pola penanganan permukiman kumuh berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi Pola Penanganan Permukiman Kumuh

No	Tingkat Kekumuhan	Status Lahan	Pola Penanganan Permukiman Kumuh
1	Kekumuhan Berat	Legal	Peremajaan
2	Kekumuhan Berat	Ilegal	Permukiman Kembali
3	Kekumuhan Sedang	Legal	Peremajaan
4	Kekumuhan Sedang	Ilegal	Permukiman Kembali
5	Kekumuhan Ringan	Legal	Pemugaran
6	Kekumuhan Ringan	Ilegal	Permukiman Kembali

Sumber : Permen Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016

Adapun beberapa penanganan berdasarkan tipologi dan pola-pola penanganan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu sebagai berikut pada tabel 2.4 pola penanganan berdasarkan tipologi permukiman kumuh.

Tabel 2.4 Pola Penanganan Berdasarkan Tipologi Permukiman Kumuh

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
1	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	<p>Membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak atau pondasi dalam sesuai karakteristik bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku • Memanfaatkan bahan bangunan, khususnya untuk pondasi, 	<p>Pondasi jalan dengan sistem cerucuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan material jalan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal • Dilengkapi dengan bangunan: bronjong bangunan pemecah ombak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem drainase lokal dilengkapi dengan pintu air • Memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, pasangan batu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka: pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau • Pipa sambungan berada di bawah air dan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan secara floating; atau di bawah air memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air • Unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka: • Pipa sambungan dipasang menempel 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air • Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi air

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		yang punya ketahanan terhadap daya rusak air				<p>pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pipa sambungan berada di bawah air dan memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air 		
2	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun rumah dengan konsep <i>waterfront housing</i>, menjadikan kawasan perairan sebagai halaman depan 	<p>Pondasi jalan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada sisi perairan dengan sistem cerucuk • Pada sisi daratan dengan sistem konvensional • Memanfaatkan material jalan yang punya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem drainase lokal • Jika permukaan daratan lebih tinggi dari air, maka dilengkapi dengan pintu air; atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada sisi perairan, 	<p>Unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara <i>floating</i> memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas air • Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku • Memanfaatkan bahan bangunan, khususnya untuk pondasi, yang punya ketahanan terhadap daya rusak air 	<p>ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada jalan yang berbatasan dengan perairan dilengkapi dengan bangunan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bronjong 2. Bangunan pemecah ombak 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika permukaan daratan lebih rendah dari air, maka dilengkapi pula oleh pompa air • Memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, pasangan batu) atau dengan perkerasan kaku (beton) 	<p>pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau</p> <p>2. Pada sisi daratan, pipa sambungan berada di bawah tanah</p>	<p>air; atau di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka: • Pada sisi perairan, pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau pada sisi daratan pipa sambungan 	air	i air

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
				sesuai dengan karakteristik lokal		berada di bawah tanah		
3	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan pondasi dangkal untuk bangunan sederhana dan pondasi dalam untuk bangunan tingkat Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Memanfaatkan bahan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Pondasi jalan dengan sistem konvensional Memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa Memanfaatkan material saluran drainase Pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah Pada tekstur tanah yang sangat 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah Unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		sesuai dengan daya dukung tanah		jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu				
4	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana • Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku • Memanfaatkan bahan bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pondasi jalan dengan sistem konvensional • Memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah • Dilengkapi dengan bangunan penahan longsor 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan bangunan terjunan • Memanfaatkan material saluran drainase • Pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah • Pada tekstur tanah yang sangat jelek 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka pipa sambungan berada di bawah tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: • Secara <i>floating</i> memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau • Di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah • Unit pemipaan jika 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah • Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		sesuai dengan daya dukung tanah		(gambut) adalah saluran perkuatan kayu <ul style="list-style-type: none"> • Pada daerah curam adalah saluran pasangan batu atau beton 		menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan berada di bawah tanah		
5	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi umpak untuk bangunan sederhana • Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan 	Pondasi jalan: <ul style="list-style-type: none"> • Pada kawasan kerawanan banjir (di atas air / di tepi air) dengan sistem cerucuk • Pada sisi daratan dengan sistem konvensional • Memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem drainase lokal dilengkapi dengan bangunan tertentu sesuai kerawanan bencana: • Banjir: berupa gorong-gorong dilengkapi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka peletakan pipa sambungan disesuaikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan unit pengolahan air limbah setempat sesuai dengan kerawanan bencananya: • Rawan banjir dan tsunami: di bawah air, di atas air, atau di dalam tanah dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah • Unit pengangkutan sampah disesuaikan dengan lokasinya: • Di perairan menggunakan moda 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
		<p>dengan ketentuan yang berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung lahan terhadap kerawanan bencana • Pada kondisi tertentu membutuhkan rekayasa teknologi bangunan 	<p>dukung lahan terhadap kerawanan bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan bangunan pelengkap tertentu sesuai dengan kerawanan bencana 1. Banjir: dilengkapi dengan bronjong 2. Tsunami: dilengkapi dengan bronjong dan bangunan pemecah ombak 3. Longsor: dilengkapi dengan bangunan penahan longsor 	<p>bronjong dan pintu air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsunami: berupa gorong-gorong dilengkapi dengan bronjong • Longsor: berupa bangunan terjunan • Memanfaatkan material saluran drainase • Pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah • Pada tekstur tanah yang 	<p>dengan kerawanan bencananya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawan banjir dan tsunami: sistem jaringan pipa dalam tanah 2. Rawan longsor: sistem jaringan pipa di atas tanah dan menempel pada tiang-tiang penyangga 	<p>memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rawan longsor: di atas tanah dengan memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah yang dapat didukung dengan bangunan pelindung tertentu • Unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, 	<p>transportasi air</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di daratan menggunakan moda transportasi darat 	

No	Tipologi	Bangunan dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Proteksi Kebakaran
				sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu <ul style="list-style-type: none"> • Pada daerah curam adalah saluran pemasangan batu atau beton 		maka peletakan pipa sambungan disesuaikan dengan kerawanan bencananya: <ul style="list-style-type: none"> • Rawan banjir dan tsunami: di dalam tanah • Rawan longsor: di atas tanah 		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016



Tabel 2.5 Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
1	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi bangunan gedung agar fungsi dan massa bangunan kembali sesuai kondisi saat awal dibangun 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung 	Pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampungnya
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi jalan untuk mengembalikan kondisi kemantapan jalan saat awal dibangun, seperti perbaikan struktur jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung 	Pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang
3	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit penyediaan air minum untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen pada unit-unit air baku, 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi Peningkatan jangkauan 	Penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		unit produksi dan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan	
4	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi sarana dan prasarana drainase untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian komponen gorong-gorong, perbaikan struktur drainase 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang 	Pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase
5	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan air limbah untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun/disediakan, seperti penggantian 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S Peningkatan 	Pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
		komponen pada SPAL-T seperti komponen pemipaan, penggantian komponen pada SPAL-S seperti tangki septik, cubluk, biofiter dan komponen sejenis.	jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T	limbah
6	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit pengelolaan persampahan untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah 	Pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor Pengelolaan persampahan
7	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi unit proteksi kebakaran untuk mengembalikan kondisi sesuai dengan persyaratan teknis saat awal dibangun, seperti penggantian sarana dan prasarana proteksi kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan 	Pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Pemugaran	Bentuk-Bentuk Peremajaan	Bentuk-Bentuk Permukiman Kembali
			kendaraan pemadam kebakaran.	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016

2.6 Tinjauan Produk Legal

Produk legal merupakan produk yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum (KBBI). Berikut tabel 2.6 tinjauan produk legal.

Tabel 2.6 Tinjauan Produk Legal

No	Jenis Produk Legal	Keterangan
1	Undang - Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Pemukiman merupakan salah satu kawasan budidaya, dan dalam undang-undang tentang penataan ruang menyatakan bahwa kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
	Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kebijakan umum pembangunan perumahan diarahkan untuk: 1. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; 2. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang

No	Jenis Produk Legal	Keterangan
		berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; 3.Mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna; 4.Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan 5.Mendorong iklim investasi asing.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Pola-pola penanganan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh diatas maka direncanakan dengan mempertimbangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 yaitu: a) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; b) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali; c) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; d) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali; e) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; f) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Sumber : Produk Legal

2.7 Sintesa Teori

Dari teori-teori yang dijelaskan diatas akan dirangkum dalam satu tabel sebagai kemudahan pengambilan kesimpulan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7 Sintesa Teori

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
1	Permukiman	Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman	- Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan-kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
		Muta'ali 2015	- Pemukiman berasal dari kata pemukim dengan akhiran –an. Secara ilmu bahasa, kata pemukiman tergolong ke dalam kata kerja yang dengan <i>to settle</i> . Dari pembentukan katanya, pemukiman memiliki arti tindakan memukimkan. Artinya, pemukiman adalah suatu tindakan untuk memukimkan seseorang pada suatu lokasi atau tempat tinggal tertentu.
		Nugroho (2010)	Permukiman adalah kelompok satuan-satuan tempat tinggal atau kediaman manusia yang mencakup fasilitas seperti bangunan rumah, jalur jalan, dan fasilitas lain yang digunakan sebagai sarana pelayanan manusia tersebut.
2	Perumahan	Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman	- Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
		SNI 03-6981-2004.	- Perumahan didefinisikan sebagai kelompok rumah yang dengan prasarana dan sarana lingkungan
4	Permukiman Kumuh	(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016).	- Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
		Menurut Undang–Undang No. 1 pasal 1 ayat 13 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman,	- Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat dan perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
5	Kawasan Kumuh	Rindrojono (2013)	- Kumuh adalah gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan rendah. Dengan kata lain, kumuh dapat di artikan sebagai tanda atau cap yang diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan.
		(Arharya 2010 dalam Muta'ali 2015),	- Kawasan kumuh di definisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena tidak adanya ketersediaan fisik (ruang terbuka hijau/RTH, drainase, suplai air bersih, jaringan komunikasi, dan lain-lainnya) dan fasilitas sosial (organisasi, sosial kesehatan dan sebagainya
		(Suparlan 2004 dalam Muta'ali 2015	- Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat dikawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi, persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta fasilitas sosial lainnya. Kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknik maupun nonteknis.
6	Indikator Permukiman Kumuh	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi bangunan dengan faktor kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Ketidakaturan bangunan b) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi c) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 2) Kondisi jalan lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Jalan lingkungan tidak melayani permukiman b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk 3) Kondisi drainase lingkungan dengan faktor kriteria sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan b) Ketidaktersediaan drainase c) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan d) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
			<p>di dalamnya</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk <p>4) Kondisi penyediaan air minum dengan faktor kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketidaktersediaan akses aman air minum b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku <p>5) Kondisi pengelolaan air limbah dengan faktor kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis <p>6) Kondisi pengelolaan persampahan dengan faktor kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis c) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan <p>7) Kondisi pengamanan kebakaran dengan faktor kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran b) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran
7	Tingkat Kekumuhan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Permukiman Kumuh Tinggi, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 76% - 100% b. Tingkat Permukiman Kumuh Sedang, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 51% - 75% c. Tingkat Permukiman Kumuh Rendah, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 26% - 50% d. Tingkat Permukiman Bukan Kumuh, merupakan tingkatan dimana indikator permukiman kumuh terpenuhi pada rentan 0% - 25%

No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
8	Legalitas Lahan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016	1) Status lahan legal; dan 2) Status lahan tidak legal.
9	Tipologi Permukiman Kumuh	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016	1) Permukiman kumuh di atas air 2) Permukiman kumuh di tepi air 3) Permukiman kumuh di dataran rendah 4) Permukiman kumuh di perbukitan 5) Permukiman kumuh di daerah rawan bencana
10	Pola Persebaran Permukiman Kumuh	(Hagget, 2001).	- Pola persebaran permukiman dibagi menjadi tiga tipe, yaitu pola bergerombol atau mengelompok (<i>cluster pattern</i>), pola acak (<i>random pattern</i>) dan pola tersebar (<i>scatter pattern</i>). Pola persebaran permukiman mengelompok terjadi jika dari unit permukiman mengelompok secara kompak, sedangkan pola persebaran permukiman menyebar terjadi jika jarak antar unit permukiman satu dengan yang lainnya cukup panjang dalam satu kelompok unit permukiman
11	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	- Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
12	Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Pedoman Teknis Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	- Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
13	Penanganan Permukiman Kumuh	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016)	a) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; b) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

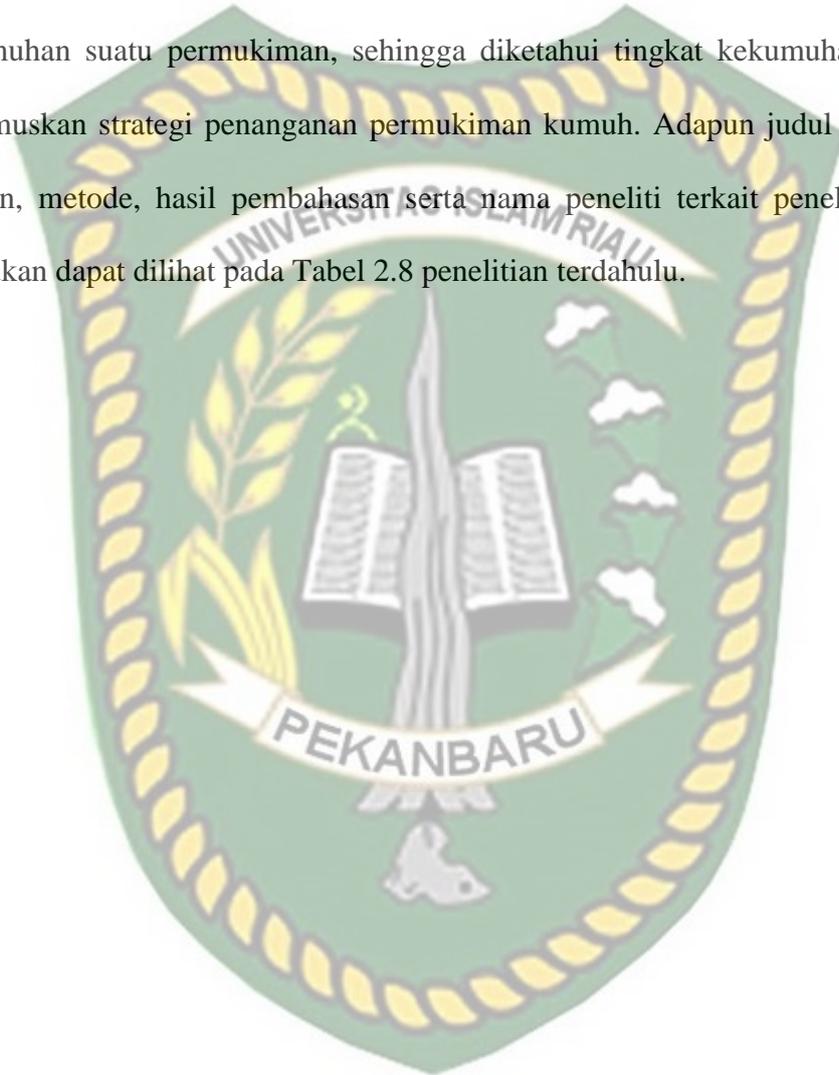
No.	Tinjauan Pustaka	Sumber Pustaka	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> c) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; d) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali; e) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; f) Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Sumber : Hasil Analisis, 2019



2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan penanganan permukiman kumuh telah dilakukan oleh beberapa peneliti di masing-masing daerah yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut menggunakan analisis dengan pembahasan mengetahui tingkat kekumuhan suatu permukiman, sehingga diketahui tingkat kekumuhan mampu merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh. Adapun judul penelitian, sasaran, metode, hasil pembahasan serta nama peneliti terkait penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.8 penelitian terdahulu.



Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Elpidia Agatha Crysta, Yanto Budisusanto, 2017, Tugas Akhir Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Analisis tingkat kekumuhan dan pola penanganannya pada lokasi permukiman. (studi kasus: kelurahan keputih, surabaya)	Mengetahui klasifikasi tingkat kekumuhan dan pola penanganan	1. Tingkat kekumuhan 2. Pola sebaran kawasan kumuh 3. Pola penanganan kawasan kumuh	Metode analisis skoring dengan teknik analisis data kuantitatif	Tingkat kekumuhan di kelurahan keputih, kota surabaya dan pola penanganannya yang sesuai dengan hasil penetapan lokasi kawasan kumuh di kelurahan keputih, Kota Surabaya.
2	Amos Setiadi, 2014, Jurnal Tata Loka Undip.	Tipologi dan pola penanganan permukiman kumuh di kota bontang	Mengetahui tipologi dan pola penanganan kawasan permukiman kumuh	1. Vitalitas non ekonomi, 2. Vitalitas ekonomi kawasan, 3. Status kepemilikan tanah, 4. Keadaan prasarana dan sarana, 5. Komitmen pemerintah kabupaten/kota 6. Prioritas penanganan.	Metode analisis skoring dengan teknik analisis data kuantitatif	Dapat diidentifikasi tipologi permukiman kumuh kota bontang, yang dibedakan menjadi tiga (3) yaitu: kekumuhan tinggi, kekumuhan sedang, dan kekumuhan rendah. Dan pola penanganan yaitu perbaikan, peremajaan, permukiman kembali, land sharing, Land consolidation
3	Raisya Nursyahbani dan Bitta Pigawati, 2015, Jurnal Teknik Pwk.	Kajian karakteristik kawasan pemukiman kumuh di kampung kota	Mengetahui karakteristik kawasan pemukiman kumuh yang terdapat di	1. Karakteristik masyarakat permukiman kumuh 2. Tingkat kekumuhan	Metode analisis skoring dengan teknik analisis data kuantitatif	Diketahui bahwa karakteristik pemukiman kumuh yang terdapat di kampung gandekan ini, dari karakteristik penghuninya adalah merupakan warga campuran antara pribumi dengan etnis tionghoa yang

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
	Undip.	(studi kasus: kampung gandekan semarang)	kampung gandekan semarang beserta tingkat kekumuhannya			sebagian besar memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan ekonomi yang masih rendah, dari karakteristik huniannya sebagian besar masih tergolong jenis hunian yang belum layak huni, dari karakteristik sarana prasarana terutama untuk kepentingan privat masih belum memadai sedangkan dari karakteristik lingkungannya diketahui bahwa kondisi lingkungan didalamnya cenderung tidak teratur dan masih belum memenuhi standar kebutuhan pemukiman seperti tidak adanya keberadaan ruang terbuka hijau maupun non hijau yang dapat digunakan untuk kegiatan aktifitas bersama. Adapun hasil dari analisis tingkat kekumuhannya, kampung gandekan memiliki kategori yang terbagi menjadi dua jenis tipologi tingkat kekumuhan yakni tingkat kumuh sedang dan tingkat kumuh rendah.
4	Donata Edsadova, Ir. Haryani, M.T, Ezra Aditia, S.T, M.Sc, 2016,	Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di nagari painan selatan	Mengetahui bentuk tipologi serta strategi penanganan yang di lakukan pada kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tipooigi kekumuhan 2. Tingkat kekumuhan (bangunan gedung, jalan lingkungan, 	Metode analisis seperti metode deskriptif dan metode kuantitatif	Hasil penilaian menunjukkan bahwa di kawasan studi memiliki kategori tipologi kekumuhan sedang. Berdasarkan kategori tingkat kekumuhan tersebut, penaganan yang akan dilakukan akan di buat

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
	Jurnal Universitas Bung Hatta, Padang	Kecamatan jurai iv	permukiman kumuh.	air minum, drainase lingkungan, air limbah, persampahan, ekonomi masyarakat, status tanah)	(analisis skoring)	menjadi dua proses penanganan yang akan dilakukan pada kawasan studi yaitu bentuk penanganan permukiman kembali di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah illegal dengan skema pembangunan rumah susun sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan yang terdampak bersedia menjual bangunanya dengan harga murah dan sipemilik bangunan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa dengan harga murah dan bentuk penanganan peremajaan di kawasan permukiman kumuh dengan status tanah legal melalui program perbaikan kampung.
5	Eka Dahlan Uar, 2016, Jurnal Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon	Strategi dan tantangan Penanganan kawasan kumuh di kota ambon	Mengetahui bentuk dan kondisi Kawasan kumuh di kota ambon serta bagaimana pola penanganan kawasan kumuh	- Karakteristik masyarakat - Penanganan permukiman kumuh	Metode analisis deskriptif-kualitatif	Penanganan kawasan kumuh di ambon yakni pembangunan sarana prasarana Lingkungan pemukiman, seperti pembangunan dan perbaikan drainase lingkungan, Penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan. Selain itu pembangunan berbagai Sarana prasarana pengelolaan air limbah seperti septi tank komunal,

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
						mandi cuci kakus (mck) serta instalasi pengolahan limbah terpadu (iplt).
6	Gerald Mingki, Veronica Kumurur & Esli Takumansang, 2015, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado	Analisis tingkat kekumuhan permukiman masyarakat di Kelurahan tanjung merah kota bitung	Menganalisis tingkat kekumuhan di daerah permukiman yang terletak di kelurahan tanjung merah, kecamatan matuari, Kota bitung, provinsi sulawesi utara	Tingkat kekumuhan	Metode analisis deskriptif dan scoring/ pembobotan	Hasil nya diperoleh bahwa daerah kelurahan tanjung merah Memiliki tingkat kekumuhan sedang, dengan aspek drainase dan sampah Memperoleh bobot yang tinggi.
7	Febri Rahman, Ir Hamdi Nur, Harne Julianti Tou, 2015, Jurnal Universitas Bung Hatta, Padang	Identifikasi dan penanganan kawasan permukiman Kumuh melalui upaya peremajaan (studi kasus kelurahan pasar baru dan kelurahan balai-balai Kota padang panjang)	Mengetahui bentuk penanganan kawasan permukiman kumuh melalui upaya peremajaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria vitalitas non ekonomi - Kriteria vitalitas ekonomi, kriteria status tanah, kriteria - Kondisi prasarana serta komitmen pemerintah (daerah) 	Metode analisis dekriptif-kuantitatif dengan sistem pembobotan	Hasil penilaian menunjukkan bahwa di kelurahan pasar baru memiliki kategori tingkat kekumuhan sedang, dan memiliki kategori tingkat kekumuhan ringan. Berdasarkan kategori tingkat kekumuhan tersebut, penanganan melalui upaya peremajaan yang sesuai dimasing-masing kelurahan yaitu pada kelurahan pasar baru melalui skema penanganan kawasan kumuh yaitu pembangunan rumah susun sewa oleh pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan/lahan bersedia

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
						menjual lahannya dengan harga murah dan sipemilik bangunan/lahan diberi keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan rusunawa sedangkan di kelurahan balai-balai melalui program perbaikan kampung
8	Elpidia Agatha Crysta, 2016, Jurnal Institut Teknologi Sepuluh Nopember.	Analisis tingkat kekumuhan dan pola penanganannya (studi kasus: kelurahan keputih, surabaya)	Menganalisis tingkat kekumuhan dan merumuskan pola penanganan permukiman kumuh	- Tingkat kekumuhan - Pola sebaran kawasan kumuh - Pola penanganan kawasan kumuh	Metode analisis dekriptif-kuantitatif skoring	Hasil penelitian menunjukkan di kelurahan keputih hanya menghasilkan dua klasifikasi tingkat kekumuhan, 14 rt termasuk dalam bukan kawasan kumuh dengan luas total wilayah permukiman 39,839 ha dan 10 rt termasuk dalam kawasan kumuh ringan dengan luas total wilayah permukiman 21,137 ha. Sedangkan dari rencana pola penanganan didapatkan, 2 wilayah rt perlu pemugaran, 6 wilayah rt dilakukan permukiman kembali dan 2 wilayah rt perlu dilakukan pemugaran dan permukiman kembali.
9	Muhajir Syam, 2017, Tugas Akhir, UIN Alauddin Makassar	Identifikasi kawasan kumuh dan strategi penanganannya Pada permukiman di Kelurahan Rangas	Mengetahui tingkat kekumuhan dan strategi penanganan permukiman kumuh	- Tingkat kekumuhan - Strategi penanganan	Metode analisis dekriptif-kuantitatif skoring	Tingkat kekumuhan termasuk kategori kumuh sedang, dan strategi Penanganan yaitu dengan melakukan peremajaan. Program penataan berupa Program fisik dan non fisik

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
		Kecamatan Banggae Kabupaten Majene				
10	Arie Ramadhan Wijaya, 2018, Tugas Akhir, Universitas Pasundan Bandung.	Kajian penanganan permukiman kumuh Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung	Merumuskan penanganan yang tepat sesuai dengan karakteristik kekumuhannya di Kota Bandung.	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi eksisting - Tingkat kekumuhan - Pola penanganan yang sesuai dengan karakteristik kekumuhan. 	Metode analisis dekriptif-kuantitatif skoring	Lokasi blok permukiman di kelurahan babakan surabaya memiliki tingkat kekumuhan sedang, dengan pola penanganan yang akan dilakukan dengan cara peremajaan dan juga permukiman kembali. Hal ini disebabkan karena pada lokasi tersebut terdapat tanah yang memiliki status legal dan juga illegal, model yang dapat dipergunakan dalam penanganan permukiman kumuh di blok permukiman ada dua strategi. Dimana strategi ini dipilih dengan kesesuaian antara kondisi eksisting dan kriteria atau parameter berlaku, program ini dipilih dengan dua turunan yaitu land sharing untuk kawasan dengan status lahan pribadi dan land consoladition untuk kawasan dengan status lahan negara.
9	Hartuti Purnaweni, 2017, Journal Department of Public	Revitalization of slum area in semarang city with thematic village program a	Aiming at parts of solving this problem, Semarang municipal	Program Of thematic village.	Research was done by interview and secondary data. It is found	Semarang by promoting vary themes, as what it had been Selecting and implementing ever since, such as kampung seni (art village), kampung jawi (java

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
	Administrati on Diponegoro University	case study in bandarharjo village, indonesia	government responding with program of Thematic village		That perception about this program is varied, ranging from Positive to skeptical.	village), kampung bandeng (milkfish village), kampung batik (batik village), and Kampung pelangi (rainbow village). The latter had even been A globally viral topic featured by some international news Agencies. In particular bandarharjo, this area had been promoted as a kampung kuliner (culinary village)
10	Alexandra Aguiar Pedroa , Alfredo Pereira Queiroz, 2019, Journal Geography Department, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil	Slum: comparing municipal and census basemaps	Identification, spatial delimitation, sample and data collection periods.	The census and the municipal basemaps and orthophotos were Overlaid in a geographic information system (gis)	The census and the municipal basemaps and orthophotos were Overlaid in a geographic information system (gis) to evaluate their similarities and differences, the reasons for Inconsistencies between them	High: 28 edsas from ibge (41%) presented boundaries similar to pmsp favelas; • partial: 12 edsas (18%) presented boundaries partially similar to favelas (with empty areas or public facilities – not residential use – within the edsas); • low: 25 edsas (37%) presented poor boundaries similarity to favelas; • absent: 3 edsas are not considered favelas by pmsp (4%)

Sumber: Hasil Analisis 2019

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deduktif. Penelitian ini digolongkan dalam pendekatan deduktif karena peneliti mengkaji permasalahan yang umum berdasarkan pengujian suatu teori yang terdiri dari variabel-variabel, untuk menentukan apakah pengaruh antar variabel-variabel dalam merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh kota (Sugiyono, 2017).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Metode campuran adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif (Cresswel, 2013).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

a) Lokasi penelitian

Penelitian ini berada di Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir.

b) Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk lebih jelas tercantum dalam tabel 3.1 jadwal waktu penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2019															
		April		Mei				Juni				Juli				Agustus	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pra Lapangan																	
1	Persiapan data penelitian																
	Pembuatan form wawancara																
	Studi pustaka/literatur																
Lapangan																	
2	Wawancara ke instansi terkait dan pengajuan permohonan data																
	Cek kondisi eksisting lokasi penelitian																
	Menghitung pembobotan tingkat kekumuhan																
	Observasi lapangan																
	Dokumentasi lapangan																
Pasca Lapangan																	
4	Pengumpulan data primer dan sekunder																
	Proses pengolahan data primer dan sekunder																

Sumber : Hasil Pemikiran 2019

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Hal yang penting dalam persiapan suatu penelitian yaitu dengan penyusunan kebutuhan data dan informasi. Dalam penelitian ini menjelaskan jenis data dan sumber data.

1) Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara deskriptif tentang lokasi penelitian secara umum. Jenis data kualitatif yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Data kondisi fisik wilayah, yang mencakup letak geografis, kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- Data pola penggunaan lahan, mencakup pola penggunaan lahan Kecamatan Tembilahan Hulu.
- Data karakteristik wilayah permukiman yaitu :
 - Aspek fisik berupa kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran.
 - Aspek non fisik berupa nilai strategis lokasi, potensi sosial ekonomi, dan budaya.
 - Aspek legalitas lahan berupa status tanah, dan kesesuaian RTR.

b. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui nilai yang diinginkan. Data kuantitatif yang dimaksud adalah :

- Data demografi, seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kepadatan penduduk, dan jumlah kepala keluarga.
- Data jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
- Data jumlah KK penggunaan air
- Data jumlah KK penggunaan aspek air limbah
- Data jumlah KK pengelolaan persampahan
- Data jumlah bangunan yang memiliki status tanah legal dan ilegal.

2) Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini :

a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi lapangan dan wawancara seperti data yang diperoleh dari responden melalui observasi langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif obyek studi. Jenis data yang dimaksud meliputi :

- Observasi (pengamatan langsung) dilakukan berdasarkan from dalam ketentuan Permen PU No 2 Tahun 2019 dengan populasi berdasarkan rumah di lokasi studi, adapun variabel yang akan di lakukan observasi yaitu kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase

lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan, kondisi proteksi kebakaran.

- Wawancara mengenai kejelasan status tanah (SHM) dan potensi sosial ekonomi, dan budaya.
- b) Data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari instansi yang terkait dengan studi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk kegiatan analisis. Selain itu, data sekunder lainnya adalah studi literatur untuk mendapatkan literatur yang berkaitan dengan studi. Berikut tabel 3.2 sumber dan jenis data sekunder.

Tabel 3.2 Sumber dan Jenis Data Sekunder

No	Instansi	Jenis Data
1	BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir	- Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tembilahan Hulu - RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RTRW Kabupaten Indragiri Hilir
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	- SK Lokasi Permukiman Kumuh - Profil Permukiman Kumuh Kabupaten Indragiri Hilir
4	Kantor Kecamatan Tembilahan Hulu	Demografi Kecamatan Tembilahan Hulu
5	Kantor Kelurahan Tembilahan Hulu	Demografi Kelurahan Tembilahan Hulu

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi lapangan

Observasi lapangan dilakukan berdasarkan from observasi yang tercantum dalam lampiran Permen PU No 2 Tahun 2016 untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sekaligus membandingkan atau mencocokkan data dari instansi terkait, berdasarkan dengan data yang sebenarnya di lapangan seperti:

- Data tentang kondisi fisik bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran di Kawasan kumuh Kelurahan Tembilihan Hulu.
- Data karakteristik tipologi permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.

2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud yaitu mendengarkan tanggapan ataupun informasi penting tentang lokasi penelitian seperti kejelasan status tanah, kondisi sosial ekonomi dan budaya, serta kebijakan dan pembiayaan terhadap penanganan kawasan kumuh dilokasi penelitian.

3. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber – sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan seminar atau jurnal.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa seperti, berbentuk tulisan , foto-foto, atau karya-karya dari seseorang.

3.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan sasaran dalam penelitian strategi penanganan permukiman kumuh ini melalui tahap analisa data dengan membandingkan, menghitung serta mempertimbangkan data yang telah ada untuk menghasilkan perumusan usulan yang sistematis dan tepat sasaran serta mengambil kesimpulan suatu masalah untuk tujuan akhir perencanaannya. Adapun jenis teknik analisa diantaranya yaitu:

- Analisis kualitatif
- Analisis kuantitatif

3.5.1 Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu

Dalam teknik analisis ini menggunakan analisis deskriptif yaitu:

- Analisis Deskriptif-Kualitatif

Metode penelitian deskriptif-kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan menjelaskan keadaan yang ada di objek penelitian berdasarkan faktor dan data yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis (Sugiyono, 2017). Maka dalam analisis ini mendeskripsikan suatu fenomena kondisi eksisting permukiman kumuh di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu berdasarkan 7 (tujuh) kriteria indikator tersebut yaitu :

- a) Bangunan gedung (ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, ketidak sesuaian dengan persyaratan teknis bangunan)
- b) Jalan lingkungan (cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan)

- c) Penyediaan air minum (ketidaksediaan akses aman air minum, tidak terpenuhi kebutuhan air minum)
- d) Drainase lingkungan (ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidakterediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase, kualitas konstruksi drainase, kualitas konstruksi drainase)
- e) Pengelolaan air limbah (sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis)
- f) Pengelolaan persampahan (prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standar teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana)
- g) Proteksi kebakaran (ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran, ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran)
- h) Legalitas tanah (kejelasan status penguasaan tanah, dan kesesuaian RTR)
- i) Pertimbangan lain (nilai strategis lokasi, kependudukan, dan kondisi sosial ekonomi, dan budaya)

Sehingga dari indikator-indikator diatas yang disesuaikan dalam kebijakan Permen PU Nomor 2 Tahun 2016 dengan tujuan untuk mengetahui kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh tersebut.

3.5.2 Mengidentifikasi Tipologi Kawasan Permukiman di Kelurahan Tembilahan Hulu

Dalam menganalisis tipologi kawasan kumuh ini memiliki beberapa indikator tipologi permukiman kumuh yaitu :

- a) Permukiman kumuh di atas air
- b) Permukiman kumuh di tepi air
- c) Permukiman kumuh di dataran rendah
- d) Permukiman kumuh di perbukitan
- e) Permukiman kumuh di daerah rawan bencana

Dari indikator tersebut merupakan kondisi atau keadaan tipologi permukiman kumuh tersebut menggunakan analisis deskriptif.

3.5.3 Menganalisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu

Dalam menganalisis tingkat kekumuhan ini menggunakan analisis tingkat kekumuhan melalui analisis skoring dengan pembobotan. Dalam proses analisis tingkat kekumuhan ini menggunakan beberapa variabel yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016. Dalam penelitian ini terdapat beberapa model analisis hubungan antara variabel. Variabel-variabel tersebut melalui analisis skoring tingkat kekumuhan dengan dilakukan analisis tingkat kekumuhan untuk mengetahui tingkat kekumuhan yang terdapat di Kelurahan Tembilahan Hulu. Selanjutnya dilakukan kriteria untuk melakukan analisis skoring terhadap tingkat kekumuhan yang terdapat di wilayah penelitian.

Analisis skoring dilakukan dengan menilai kondisi kondisi eksisting terhadap kriteria/indikator yang di tetapkan oleh peneliti berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016 mengenai penanganan kawasan permukiman kumuh yang telah dijabarkan sebelumnya. Nilai bobot tersebut akan mencerminkan tingkat kekumuhan pada masing-masing variabel yang digunakan. Masing-masing variabel dalam analisis skoring ini memiliki parameter. Penilaian akan dilakukan melalui observasi penelitian dengan skala penilaian tiap-tiap variabel adalah 5,3, dan 1.

- **Analisis Skoring (Pembobotan)**

Berikut ini merupakan berbagai macam perhitungan yang digunakan untuk melakukan skoring (pembobotan) pada setiap aspek yang dilakukan melalui observasi lapangan oleh peneliti. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016 terdapat beberapa perhitungan pada setiap aspek di setiap kriteria dan nilai numeriknya untuk menghitung tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh pada tabel 3.3 rumus perhitungan tingkat kekumuhan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumus Perhitungan Tingkat Kekumuhan

No	Aspek	Kriteria	Nilai Numerik	Satuan	Perhitungan Persentasi (%)
1	Bangunan gedung	Ketidakteraturan bangunan	Jumlah bangunan tidak memiliki keteraturan	Unit	$\frac{\Sigma \text{ Bangunan tidak teratur (unit)}}{\Sigma \text{ Bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
		Tingkat kepadatan bangunan	Luas kawasan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	Ha	$\frac{\text{Luas kawasan } 200/250 < \text{unit/Ha}}{\text{Luas kawasan kumuh}} \times 100\%$
		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	Jumlah bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Unit	$\frac{\text{Jumlah bangunan tidak sesuai persyaratan teknis (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$
2	Jalan lingkungan	Cakupan pelayanan jalan lingkungan	Panjang jalan ideal (m) - Panjang jalan eksisting (m)	M	$\frac{\text{Panjang jalan ideal (m)} - \text{Panjang jalan eksisting (m)}}{\text{Panjang jalan ideal (m)}} \times 100\%$
		Kualitas permukaan jalan lingkungan	Panjang jalan rusak	M	$\frac{\text{Panjang jalan rusak}}{\text{Panjang jalan ideal}} \times 100\%$
3	Penyediaan air minum	Ketidaksediaan akses aman air minum	Σ kk tidak terakses air minum aman	KK	$\frac{\Sigma \text{ KK tidak terakses air minum aman}}{\Sigma \text{ KK keseluruhan}} \times 100\%$
		Tidak terpenuhi kebutuhan air minum	Σ kk tidak terakses air minum cukup	KK	$\frac{\Sigma \text{ KK tidak terakses air minum aman}}{\Sigma \text{ KK keseluruhan}} \times 100\%$
4	Drainase lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air	Luas kawasan yang terkena genangan	Ha	$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$
		Ketidaktersediaan drainase	Panjang drainase ideal (m) - Panjang drainase eksisting (m)	M	$\frac{\text{Panjang drainase ideal (m)} - \text{Panjang drainase eksisting (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times 100\%$
		Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan	Panjang drainase akses ke sistem kota	M	$\frac{\text{Panjang drainase penghubung}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times 100\%$
		Tidak terpeliharanya drainase	Panjang drainase tidak terpelihara	M	$\frac{\text{Panjang sistem drainase tidak terpelihara}}{\text{Panjang drainase total}} \times 100\%$
		Kualitas konstruksi drainase	Panjang drainase rusak	M	$\frac{\text{Panjang drainase yang buruk}}{\text{Panjang drainase total}} \times 100\%$

No	Aspek	Kriteria	Nilai Numerik	Satuan	Perhitungan Persentasi (%)
5	Pengelolaan air limbah	Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah kk dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sistem air limbah tdk sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
		Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis	Jumlah kk dengan prasarana dan sarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
6	Pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana persampahan tidak sesuai standar teknis	Jumlah kk dengan Sarana dan prasarana pengeolahan sampah tidak sesuai persyaratan teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sarpras pengolahan sampah yg tdk sesuai persyaratan teknis}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
		Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai standar teknis	Jumlah kk dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
		Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah kk dengan Sarana dan prasarana pengelolaan sampah tidak terpelihara	KK	$\frac{\text{Jumlah KK dgn sarpras pengolahan sampah tdk terpelihara}}{\text{Jumlah KK Keseluruhan}} \times 100\%$
7	Proteksi kebakaran	Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit	$\frac{\text{Jumlah bangunan tdk terlayani sarana proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah bangunan Keseluruhan}} \times 100\%$
		Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Unit	$\frac{\text{Jumlah bangunan tdk terlayani prasarana proteksi kebakaran}}{\text{Jumlah bangunan Keseluruhan}} \times 100\%$

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016

Setelah melakukan penilaian numerik dan persentase numerik pada setiap kriteria sesuai rumus pada tabel diatas. Maka selanjutnya dilakukan penilaian skor/pembobotan untuk setiap kriteria kekumuhan. Adapun nilai skor/pembobotan sebagai berikut :

Keterangan :

Hasil : Tingkat Kekumuhan :

- 71-95 Kumuh Berat
- 45-70 Kumuh Sedang
- 19-44 Kumuh Ringan
- 0-18 Bukan Kumuh

Hasil : Status Tanah :

- (+) Tanah Legal
- (-) Tanah Ilegal

Jumlah Nilai : Petimbangan Lain :

- 11-15 Petimbangan Lain Tinggi
- 6-10 Petimbangan Lain Sedang
- 1-5 Petimbangan Lain Rendah

3.5.4 Merumuskan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di

Kelurahan Tembilahan Hulu

Dalam proses perumusan strategi penanganan ini menggunakan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian sasaran pada poin satu sampai poin tiga yaitu (mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu, mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman

kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu dan menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu) sehingga dapat di sesuaikan strategi apa yang tepat sesuai dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016.

3.6 Tahapan Penelitian

3.6.1 Pra Lapangan

Tahapan penelitian pra lapangan ini ialah tahapan yang dilakukan sebelum turun langsung kelapangan. Dalam tahapan pra lapangan ada beberapa yang harus di persiapkan yaitu:

- a) Persiapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam melakukan pengerjaan laporan penelitian maka ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilakukan demi menyempurnakan pengerjaan dan menyempurnakan data yang akan diperoleh agar menjadi lebih akurat dan valid. Beberapa tahapan atau persiapan awal yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Pencarian data awal

Data awal yang dibutuhkan merupakan data yang didapatkan dari dinas permukiman kumuh, sebagai data referensi pertama dalam pengerjaan tugas sehingga dengan data awal ini akan lebih mempermudah dan memperjelaskan lagi segala kekurangan yang ada pada data awal ini yang selanjutnya akan dilengkapi dengan pencarian data langsung atau survei ke lokasi studi kasus yang telah ditentukan.

2. Ceklis data

Mengkonsep rencana atau program yang akan dilaksanakan pada kegiatan survei penelitian terhadap penanganan permukiman kumuh dengan membuat ceklis data. Adapun tujuan lokasi studinya adalah di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Hulu.

3. Pengurusan surat izin survei

Maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada tahapan pertama diatas, survey ke lokasi studi kasus menjadi bagian yang harus dilakukan untuk penyempurnaan data. Kemudian melakukan pengurusan surat izin survei untuk izin pencarian data di Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu, surat izin survei ini ditujukan kebeberapa instansi terkait yang digunakan untuk pengambilan beberapa data yang dibutuhkan dari instansi tersebut seperti Kantor Lurah, Kantor Camat, BAPPEDA, PUPR Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan lain-lain.

b) Pembuatan pertanyaan wawancara

Pembuatan pertanyaan wawancara ini merupakan pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan data yang ingin dicari yang diajukan pada instansi-instansi pemerintahan dan masyarakat-masyarakat setempat di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu atau disekitarnya guna untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan akurat dan mempermudah dalam proses pengerjaan laporan tugas akhir ini.

a) Studi pustaka atau literatur

Studi pustaka atau literatur merupakan bagian dalam penelitian yang menunjang kelancaran penelitian berupa dokumen penunjang berupa buku-buku, jurnal, publikasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian. Studi literatur yaitu merupakan pengambilan data-data pendukung pengerjaan awal sebelum melakukan survei atau observasi di lapangan secara langsung, data-data studi literatur merupakan data yang berisi tentang penanganan permukiman kumuh, dengan tujuan pendalaman awal dan data tersebut didapatkan dari literatur-literatur yang telah ada, seperti buku-buku maupun pencarian di web-web terkait. Tujuan dari pencarian data literatur ini adalah guna untuk pendalaman awal studi kasus dan dan meletakkan dasar yang kuat dalam melakukan kajian permasalahan.

3.6.2 Lapangan

Tahapan penelitian lapangan ini ialah, tahapan yang dilakukan turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap kondisi dilapangan, setelah pra lapangan selesai dibuat, dalam tahapan penelitian lapangan ini ada beberapa yang harus dilakukan dilapang yaitu:

- a. Wawancara ke instansi terkait dan pengajuan permohonan data yang di perlukan dalam penelitian.
- b. Cek kondisi eksisting lokasi permukiman kumuh sesuai indikator permukiman kumuh dalam Permen PU No 2 Tahun 2016.

- c. Wawancara dengan masyarakat terkait kondisi legalitastanah, dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- d. Menghitung pembobotan tingkat kekumuhan sesuai indikator permukiman kumuh dalam Permen PU No 2 Tahun 2016.
- e. Observasi sesuai form pada lampiran II Permen PU No 2 Tahun 2016.
- f. Dokumentasi lapangan.

3.6.3 Pasca Lapangan

Tahapan penelitian pasca lapangan ini ialah, tahapan yang dilakukan untuk mengolah data yang di dapat setelah turun kelapangan langsung, dalam tahap penelitian pasca lapangan yang harus dilakukan yaitu:

- Pengumpulan semua data yang didapat.

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengerjaan yang dapat membantu penyelesaian laporan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan maksud agar memperoleh input data yang selanjutnya akan digunakan dalam proses analisis. Proses pengumpulan data ini merupakan proses pengumpulan beberapa data yang didapat kan dengan beberapa cara diantaranya :

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Proses pencarian data primer ini dengan melakukan survei di lokasi studi kasus atau pengamatan langsung dilapangan, yang selanjutnya juga akan dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat setempat atau yang berada disekitarnya.

Pencarian data primer ini dilakukan dengan beberapa teknik-teknik tertentu diantaranya sebagai berikut :

a) Observasi

Observasi merupakan bagian dari kegiatan survei secara langsung di lapangan dan melihat secara langsung bagaimana kondisi eksisting tingkat kekumuhan di kawasan permukiman di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu. Kemudian melihat kejadian-kejadian tertentu lainnya yang mampu mendukung pengakuratan data lalu mencatatnya.

b) Wawancara

Merupakan proses pengerjaan dengan cara wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada masyarakat dan skateholder di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh di wilayah ini serta kepada pihak-pihak lainnya terkait dengan tujuan guna mendapatkan data yang lebih valid dan menyempurnakan hasil pengerjaan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, merupakan kebalikan dari data primer yang didapatkan secara langsung, data sekunder didapatkan melalui media perantara atau melalui instansi-instansi terkait yang memungkinkan memiliki data-data yang dicari seperti BPS, baik BPS Provinsi atau Kabupaten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,

Bappeda, PUPR, dan instansi dalam kecamatan seperti Kantor Camat, Kantor Lurah dan lain-lain, adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan data sekunder antara lain yaitu :

a) Studi literatur

Studi literatur yaitu merupakan pengambilan data-data pendukung pengerjaan awal sebelum melakukan survei atau observasi di lapangan secara langsung, data-data studi literatur merupakan data yang berisi tentang sejarah dan hal-hal penting di Kecamatan Tembilahan Hulu Kelurahan Tembilahan Hulu pendalaman awal dan data tersebut didapat kan dari literatur-literatur yang telah ada, seperti buku-buku maupun pencarian di web-web terkait. Tujuan dari pencarian data literatur ini adalah guna untuk pendalaman awal studi kasus dan dan meletakkan dasar yang kuat dalam melakukan kajian permasalahan.

b) Instansi

Pengambilan data sekunder di instansi merupakan pengambilan beberapa data yang dimiliki secara lengkap di instansi-instansi terkait seperti pencarian data di BPS, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bappeda, PUPR, dan Instansi terkait lainnya. Tujuan dari pengambilan data dari instansi-instansi ini adalah guna untuk melengkapi data yang telah ada sebelumnya.

3.7 Desain Survei

Desain survei merupakan skema pencapaian tujuan penelitian yang dimuat dalam tabel agar mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian. Adapun tabel 3.4 desain survei sebagai berikut.

Tabel 3.4 Desain Survei

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
1	Teridentifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.	Kondisi eksisting	a) Bangunan gedung (ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, ketidak sesuaian dengan persyaratan teknis bangunan) b) Jalan lingkungan (pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan) c) Air minum (tidak tersedia akses aman air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum) d) Drainase lingkungan (tidak mampu mengalirkan limpasan air, tidak tersedia drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan) e) Pengelolaan air limbah (sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai	a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir b) Masyarakat c) Kantor Camat Tembilahan Hulu d) Kantor Lurah Tembilahan Hulu e) Fasilitator KOTAKU f) BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir	a) Observasi b) Wawancara c) Data sekunder	Analisis deskriptif kualitatif	Kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.

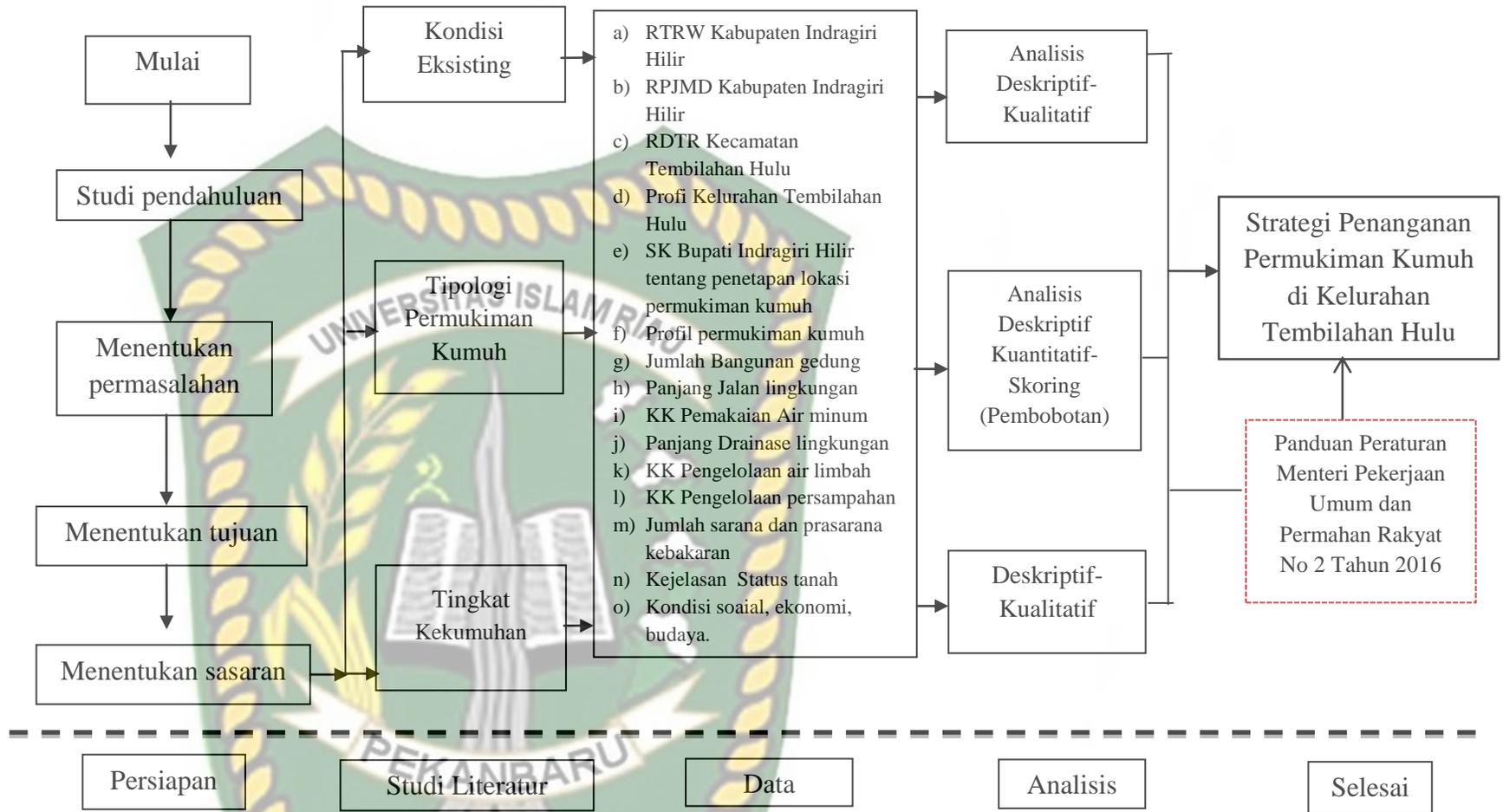
No	Sasaaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
			standar teknik) f) Pengelolaan persampahan (prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai standar teknis, sistem pengelolaan sampah tidak sesuai standar teknis) g) Proteksi kebakaran (tidak tersedia prasarana proteksi kebakaran, tidak tersedia sarana proteksi kebakaran) h) Legalitas tanah (kejelasan status penguasa tanah, kesesuaian RTR) i) Pertimbangan lain (nilai strategis lokasi, kependudukan, kondisi sosial,ekonomi dan budaya)				

No	Sasaaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
2	Teridentifikasi ya tipologi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu	Tipologi permukiman kumuh	Tipologi kawasan permukiman kumuh : a) Permukiman kumuh di atas air b) Permukiman kumuh di tepi air . c) Permukiman kumuh di dataran rendah d) Permukiman kumuh di perbukitan e) Permukiman kumuh di daerah rawan bencana	a) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir b) Masyarakat c) Kantor Camat Tembilihan Hulu d) Kantor Lurah Tembilihan Hulu	a) Observasi	Analisis deskriptif	Tipologi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu
3	Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.	Tingkat kekumuhan	a) Bangunan gedung b) Jalan lingkungan c) Air minum d) Drainase lingkungan e) Pengelolaan air limbah f) Pengelolaan persampahan g) Proteksi kebakaran h) Legalitas tanah i) Pertimbangan lain (nilai strategis lokasi, kependudukan, kondisi sosial, ekonomi dan budaya)	a) Masyarakat kecamatan Tembilihan Hulu b) Masyarakat kelurahan Tembilihan Hulu c) Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Indragiri Hilir d) BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir e) Fasilitator KOTAKU Kabupaten Indragiri Hilir	a) Wawancara b) Observasi c) Data sekunder	Analisis skoring (pembobotan)	Tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu

No	Sasaaran	Variabel	Indikator	Sumber Data	Cara Pengambilan Data	Analisis	Hasil
4	Menyusun strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.	Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh	a) SK Bupati Indragiri Hilir tentang penetapan lokasi permukiman kumuh di kecamatan tembilahan hulu b) Kondisi eksisiting permukiman kumuh c) Tipologi permukiman kumuh d) Tingkat kekumuhan	a) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir b) Masyarakat c) Kantor Camat Tembilahan Hulu d) Kantor Lurah Tembilahan Hulu	a) Data sekunder b) Wawancara	Hasil analisis sasaran 1 sampai sasaran 3 dengan sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 2 Tahun 2016.	Strategi penanganan kawasan permukiman kumuh kota di Kelurahan Tembilahan Hulu

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.8 Bagan Alur Penelitian



Gambar 3.1
Bagan Alur Penelitian
Sumber : Hasil Analisis,2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dan berada di pesisir timur Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tangannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pesisir timur Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dengan luas total wilayah 18.812,94 Km² yang terdiri dari wilayah daratan 11.605,97 Km², wilayah perairan umum 888,97 Km² dan perairan laut 6.318 Km² sehingga Kabupaten Indragiri Hilir memiliki wilayah perairan sekitar 38,31 % dari luas wilayah dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau.

4.1.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu kabupaten di Indonesia dimana kalau dilihat dari sejarah kabupaten Indragiri mengalami perubahan pemerintahan dari priode ke priode, seperti priode sebelum penjajahan kolonial belanda (sebelum tahun 1945).

Berdasarkan undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 dibentuk Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam provinsi Sumatera Tengah dan Diralisi denan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah pada tanggal 9 November 1948 nomor 10/GM/T.49, kemudian dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 dibentuk daerah Otonomi

dalam Provinsi Sumatera Tengah termasuk Kabupaten Indragiri. Kabupaten Indragiri pada waktu itu terdiri dari 4 Kewedanan, 17 Kecamatan yaitu Kewedanan Indragiri Hilir Selatan, Indragiri Hulu Utara, Indragiri Hulu dan Kewedanan Kuantan Singingi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1963 status kewedanan dihapus bersama dengan penghapusan empat kewedanan dalam Kabupaten Indragiri. Dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 dibentuk Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru yang terdiri dari lima daerah tingkat II masing-masing Kabupaten Kampar, Indragiri, Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Dengan dibentuknya Provinsi Riau dan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 maka timbul didua kewedanan tersebut yaitu kewedanan Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dengan perjuangan yang disalurkan melalui Panitia Persiapan Pembentukan kabupaten Indragiri Hilir dan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Kabupaten Indragiri ternyata hasrat tersebut mendapat dukungan dari DPRD Riau dan DPR RI pusat. Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 maka terjadilah pemekaran Kabupaten Indragiri menjadi tiga kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan, terdiri dari delapan kecamatan, sekarang 11 kecamatan.
2. Kabupaten Indragiri hulu dengan Ibukotanya Rengat, terdiri dari Kecamatan.
3. Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan terdiri dari 6 kecamatan.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatera. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal ditanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pantai Timur pesisir Pulau Sumatera, maka Kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km² dan luas perairan laut meliputi 6.318 Km² atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah.

Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 00 36' LU – 10 07' LS dan 1040 10' – 1020 32' BT. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

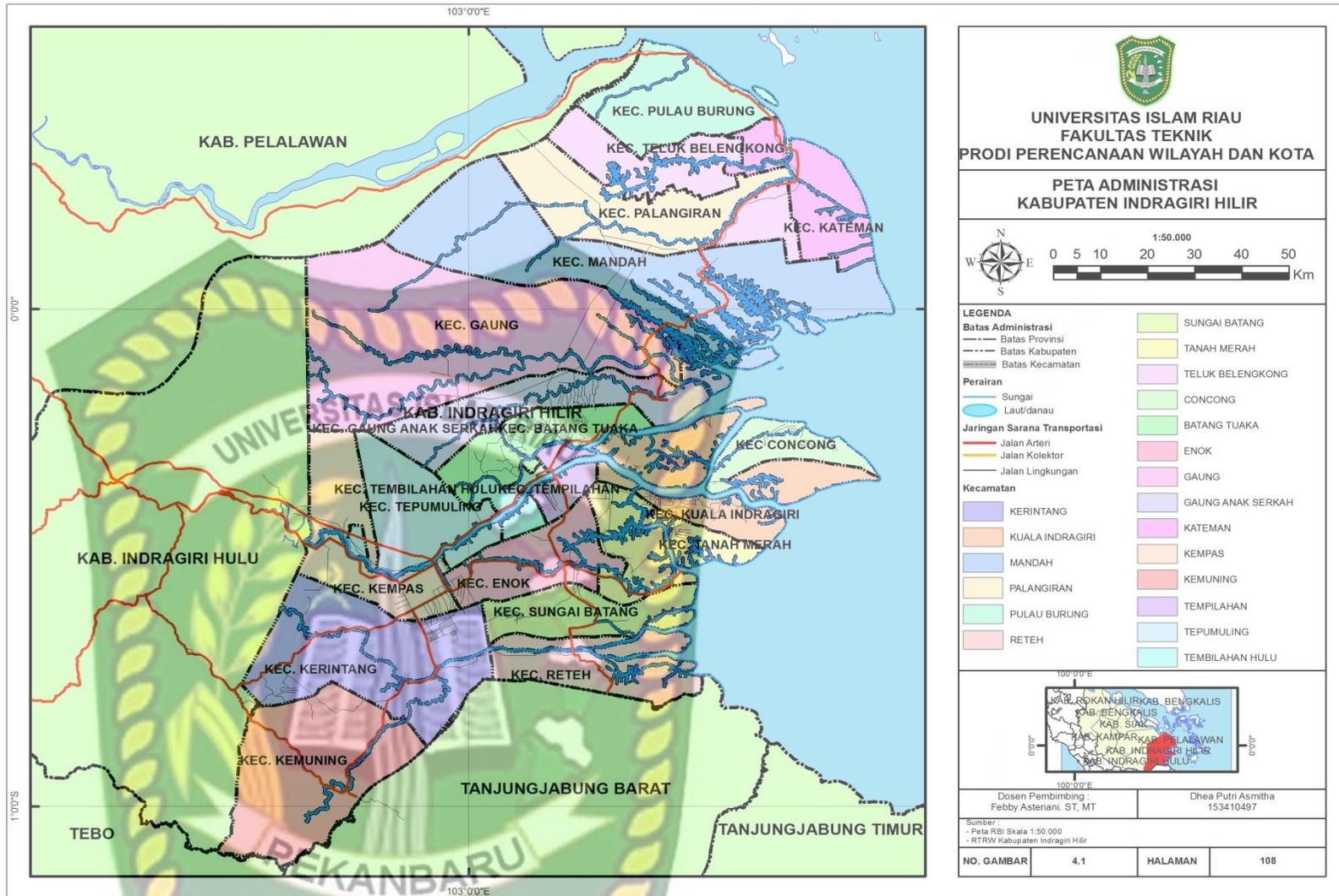
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi);
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).

Luas wilayah daratan Kabupaten Indragiri Hilir menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.2 Luas dan Persentase Wilayah Daratan Menurut Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Keritang	543,45	4,68
2	Kemuning	525,48	4,53
3	Reteh	407,75	3,51
4	Sungai Batang	145,99	1,26
5	Enok	880,86	7,59
6	Tanah Merah	721,56	6,22
7	Kuala Indragiri	511,63	4,41
8	Concong	160,29	1,38
9	Tembilahan	197,37	1,70
10	TembilahanHulu	180,62	1,56
11	Tempuling	691,19	5,96
12	Kempas	364,49	3,14
13	BatangTuaka	1.050,25	9,05
14	GaungAnakSerka	612,75	5,28
15	Gaung	1.479,24	12,75
16	Mandah	1.021,74	8,80
17	Kateman	561,09	4,83
18	Pelangiran	531,22	4,58
19	TelukBelengkong	499,00	4,30
20	PulauBurung	520,00	4,48
	Jumlah	11.605,97	100,00

Sumber : Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka Tahun 2018



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tembilahan Hulu

Kecamatan Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tembilahan berdasarkan SK Gubernur Riau tanggal 14 Agustus 1999 Nomor: Kpts.402.a/VIII/1999 dengan Ibu Kota Kelurahan Tembilahan Hulu. Pada awalnya Kecamatan Tembilahan Hulu terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 3 (tiga) Desa. Kemudian pada Tahun 2011 berubah menjadi 2 kelurahan dan 4 desa.

Dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat agar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Pemerintah Kecamatan Tembilahan Hulu telah membentuk dan menata kembali susunan organisasi pemerintahan Kecamatan Tembilahan Hulu berdasarkan struktur organisasi pola minimal sesuai dengan Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan. Adapun jumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu menjadi 2 kelurahan dan 4 desa yaitu :

1. Kelurahan Tembilahan Hulu
2. Desa Sialang Panjang
3. Desa Pekan Kamis
4. Desa Pulau Palas
5. Kelurahan Tembilahan Barat (Pemekaran Kelurahan Tembilahan Hulu)
6. Desa Sungai Intan (Pemekaran Desa Pulau Palas)

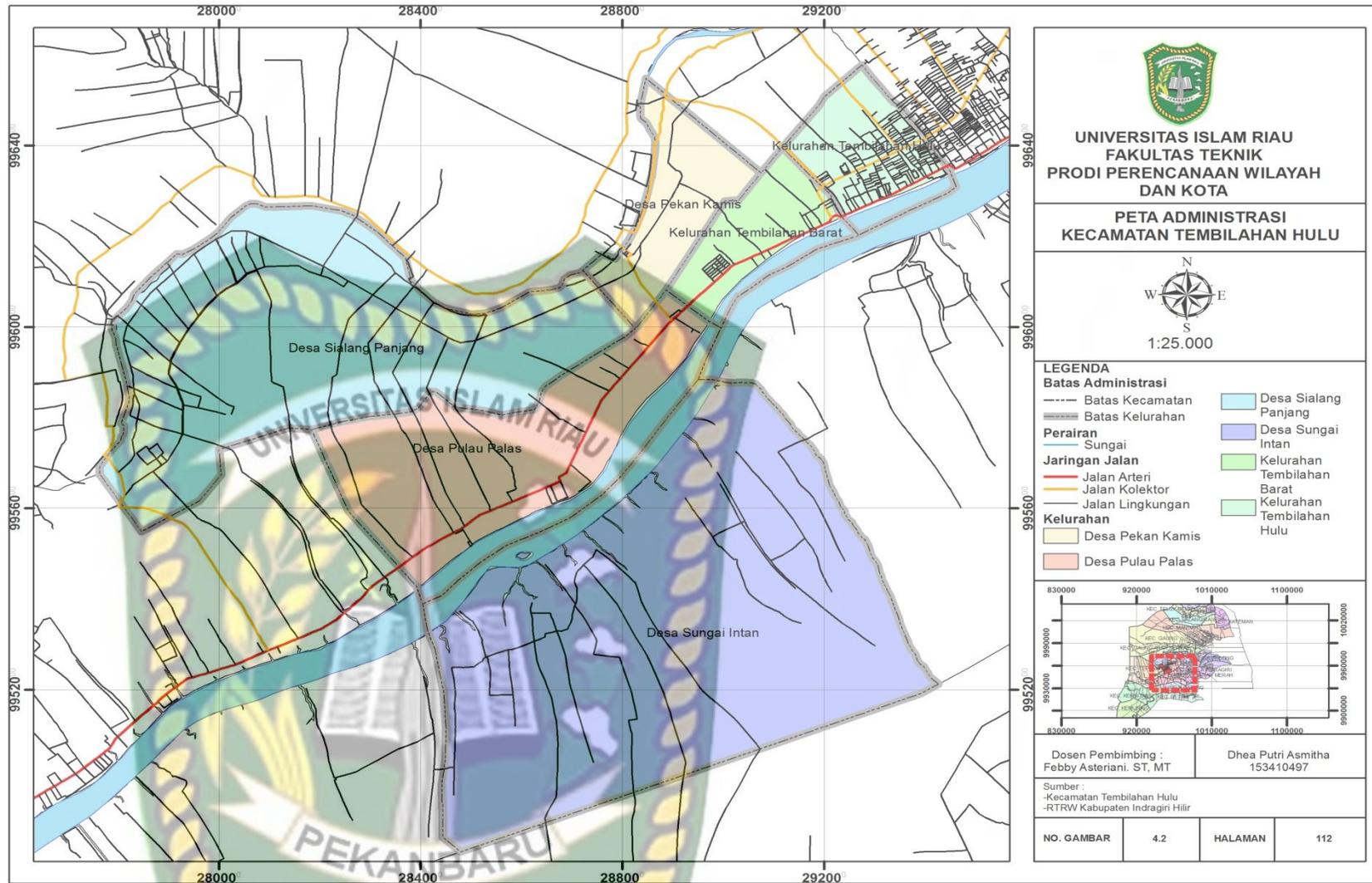
4.2.1 Letak Geografis Kecamatan Tembilahan Hulu

Secara geografis Luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah 183,60 Km². Wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu berbatasan dengan :

- a) Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka
- b) Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
- c) Sebelah Barat dengan Kecamatan Tempuling
- d) Sebelah Timur dengan Kecamatan Tembilahan

Adapun keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Keadaan tanah seperti ini menyebabkan masyarakat yang membangun tempat tinggal harus berupaya dengan berbagai proses untuk memadatkan tanah sebelum dibangun rumah permanen (dinding tembok). Keadaan air pasang surut yang sering terjadi menyebabkan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya dan Kecamatan Tembilahan Hulu pada khususnya lebih memilih membangun rumah panggung.

Di Kecamatan Tembilahan Hulu banyak terdapat hewan *reptile* biawak sebagaimana di kecamatan lain di kabupaten ini. Tinggi wilayah pusat pemerintahan Kecamatan Tembilahan Hulu mempunyai ketinggian 1 (satu) hingga 4 (empat) meter dari permukaan laut. Daerah pinggiran sungainya banyak ditumbuhi pohon nipah. Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan daerah gambut, maka daerah ini digolongkan daerah beriklim tropis basah. Pada Tahun 2018, curah hujan tertinggi di Kecamatan Tembilahan Hulu terjadi pada bulan November yaitu sebesar 182 mm (hari hujan 20 hari) dan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 20 mm (hari hujan 10 hari). Namun jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebanyak 20 hari dan yang paling sedikit adalah pada bulan Juni dan Juli sebesar 10 hari.



Gambar 4.2 Peta Administrasi Kecamatan Tembilahan Hulu

4.2.2 Penggunaan Lahan Kecamatan Tembilahan Hulu

Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu pada Tanaman Pangan Lahan Basah seluas 0.24 Ha, sedangkan Kawasan Pengembangan Perumahan seluas 476.88 Ha, dan Perkebunan Rakyat 3,277 Ha. Berikut tabel jenis penggunaan lahan dan luas lahan di kecamatan tembilahan hulu tahun 2018.

1.1.1.1.1 Tabel 4.2 Jenis Penggunaan Lahan Dan Luas Lahan di Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Tanaman Pangan Lahan Basah	0.24
2	Kawasan Pengembangan Perumahan	476.88
3	Perkebunan Rakyat	3,277
Jumlah		480,397

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2038

4.2.3 Kependudukan Kecamatan Tembilahan Hulu

Penduduk asli daerah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Indragiri Hilir, jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan Hulu pada tahun 2018 adalah 46.921 jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 11.323 rumah tangga. Jumlah Penduduk Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan terbesar keempat se-Kabupaten Indragiri Hilir setelah Kecamatan Tembilahan,

Keritang, dan Kateman. Desa/kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Tembilahan Hulu yakni 26.888 jiwa. Desa yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Desa Pekan Kamis yakni hanya 1.266 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan *sex ratio* sebesar 101. Berarti setiap 100 penduduk perempuan juga terdapat 101 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki yaitu 23.582 jiwa dan penduduk perempuan 23.339 jiwa.

Tabel 4.3 Data Kependudukan Berdasarkan Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Laki-Laki	Perempuan	Kepadatan Penduduk (Jiwa /km ²)
1.	Desa Pulau Palas	32,78	6331	1506	3273	3058	193
2.	Desa Sialang Panjang	62,38	2940	732	1443	1497	47
3.	Desa Pekan Kamis	19,38	1266	306	669	597	65
4.	Desa Sungai Intan	7,00	3220	732	1694	1526	460
5.	Kelurahan Tembilahan Hulu	10,00	26888	6148	13309	13579	2689
6.	Kelurahan Tembilahan Barat	52,06	6276	1960	3194	3082	121
Jumlah		183,60	46921	11384	23582	2339	256

Sumber : Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka Tahun 2018

4.2.4 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kecamatan Tembilahan Hulu

Penduduk asli daerah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah suku Melayu dan seiring di sebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain

yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembaruan atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Sedangkan kondisi sosial ekonomi penduduk yang berada di daerah Kecamatan Tembilahan Hulu pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang Pertanian pangan, perkebunan dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Kecamatan Tembilahan Hulu memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun luas bukan lahan sawah, diantaranya:

1. Pertanian tanaman hortikultura merupakan pertanian tanaman hortikultura dirinci dari luas tanam, luas panen serta produksinya meliputi komoditi tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.
2. Pertanian tanaman perkebunan merupakan pertanian tanaman perkebunan dirinci dari luas areal perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang, dan kopi. Selain pertanian, Kecamatan Tembilahan Hulu juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan.

4.3 Gambaran Umum Kelurahan Tembilahan Hulu

Kelurahan Tembilahan Hulu merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia.

4.3.1 Sejarah Kelurahan Tembilihan Hulu

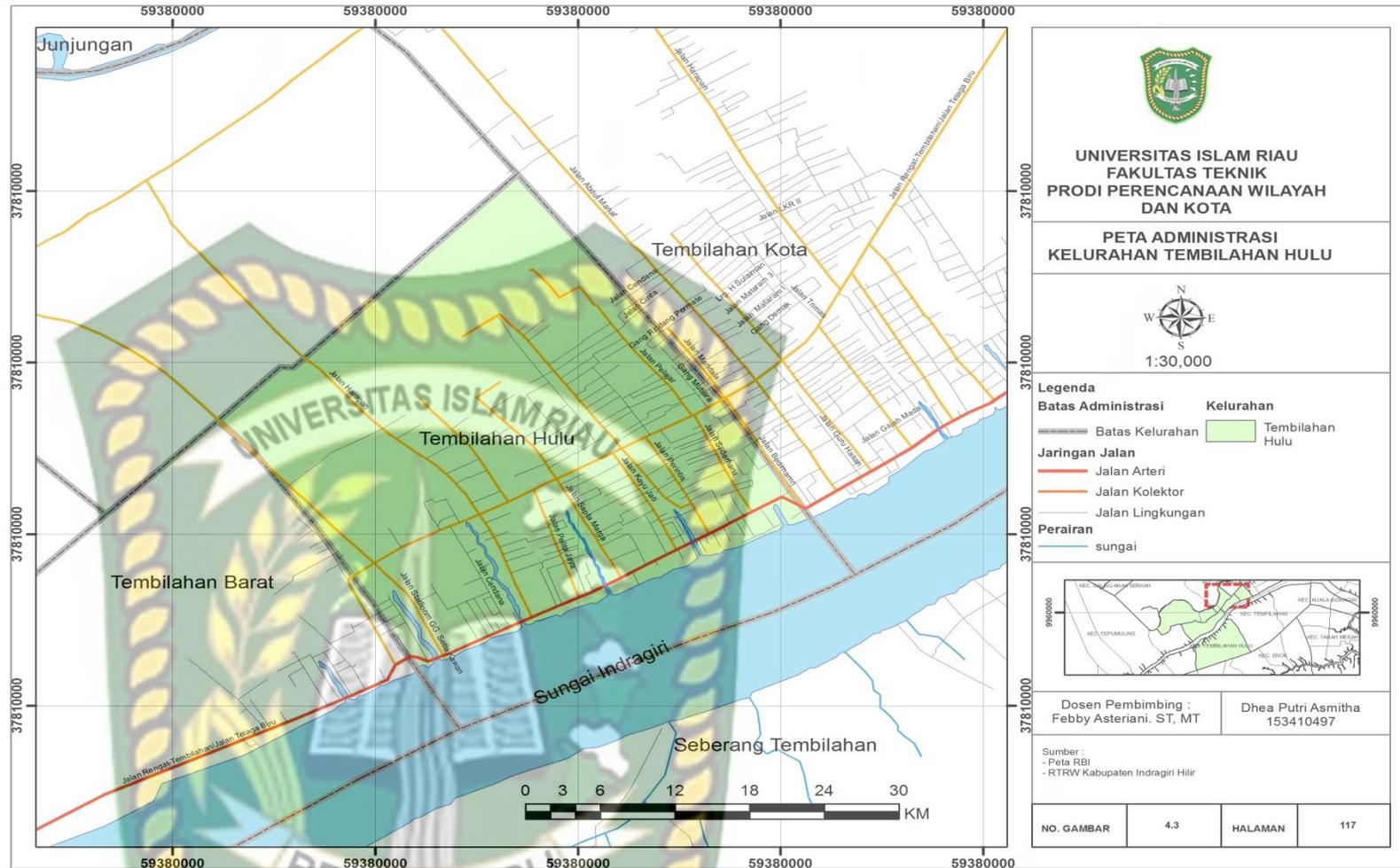
Kelurahan Tembilihan Hulu adalah salah satu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di tepian sungai Indragiri, yang menjadi ibu kota Kecamatan Tembilihan Hulu yang juga merupakan salah satu pintu gerbang menuju kota kabupaten Indragiri Hilir.

Kelurahan Tembilihan Hulu berdiri pada Tahun 1981, dan merupakan pemekaran wilayah dari Tembilihan Kota Kecamatan Tembilihan. Kelurahan Tembilihan Hulu saat ini adalah merupakan Ibu Kota Kecamatan Tembilihan Hulu. Yang disahkan berdirinya Kelurahan Tembilihan Hulu dengan keluarnya Perda Kabupaten Indragiri Hilir, yang dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur pada Tahun 1981.

4.3.2 Letak Geografis Kelurahan Tembilihan Hulu

Luas Kelurahan Tembilihan Hulu dengan luas sebesar 10,00 Km² dan kondisi geografis nya adalah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s.d. 1,75 M dari permukaan laut atau sungai, sering terjadi banjir musiman apabila air pasang dalam disertai curah hujan yang cukup tinggi, sehingga secara geografis Kelurahan Tembilihan Hulu berbatasan dengan;

- e) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan.
- f) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tembilihan Barat.
- g) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pekanbaru, Kecamatan Tembilihan.
- h) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Enok.



Gambar 4.3 Peta Ad ministrasi Kelurahan Tembilahan Hulu

4.3.3 Kependudukan Kelurahan Tembilihan Hulu

Penduduk asli daerah Kelurahan Tembilihan Hulu adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kelurahan Tembilihan Hulu pada tahun 2018 adalah 26.888 jiwa. Jumlah rumah tangga sebesar 6082 rumah tangga. Sedangkan Jumlah penduduk laki-laki yaitu 13.309 jiwa dan penduduk perempuan 13.579 jiwa.

Tabel 4.4 Data Kependudukan di Kelurahan Tembilihan Hulu Tahun 2018

No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Laki- Laki	Perempu an	Kepadatan Penduduk (Jiwa/k m ²)
1	Kelurahan Tembilihan Hulu	10,00	26888	6148	13309	13579	2689
	Jumlah	10,00	26888	6087	13309	13579	2689

Sumber : Data Kantor Lurah Tembilihan Hulu Tahun 2019

4.3.4 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kelurahan Tembilihan Hulu

4.3.4.1 Kondisi Sosial Kelurahan Tembilihan Hulu

Di kawasan perkotaan Kelurahan Tembilihan Hulu keadaan sosial masyarakat Tembilihan Hulu ini masih memiliki keakraban melalui sosialisasi dengan adanya gotong royong dengan baik, dan kegiatan wirid hal ini disampaikan oleh beberapa ketua RT di kawasan ini, akan tetapi tidak semua RT yang rutin melakukan kegiatan tersebut.

4.3.4.2 Kondisi Budaya Kelurahan Tembilihan Hulu

Kawasan Kelurahan Tembilihan Hulu mayoritas penduduknya merupakan suku Melayu Riau, dan lainnya merupakan suku-suku pendatang, seperti suku Jawa, suku Banjar, dan suku Bugis. Suku-suku Melayu, khususnya yang berada di daerah Riau mempunyai sistem kekerabatan yang sifatnya parental, dan umumnya memeluk agama Islam. Dengan mayoritas penduduknya yang merupakan suku Melayu Riau, tentu nilai-nilai kebudayaan yang erat dijaga adalah kebudayaan Melayu.

4.3.4.3 Kondisi Ekonomi Kelurahan Tembilihan Hulu

Keadaan perekonomian kawasan perkotaan Kelurahan Tembilihan Hulu tidak lepas dari kondisi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan, kawasan ini merupakan pusat aktivitas berbagai sektor jasa, juga sebagai pusat dan terminal perdagangan berbagai hasil pertanian dari berbagai wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir. Peranan kawasan perkotaan Tembilihan Hulu sebagai sentra karakteristik perekonomian terkait dengan kegiatan perekonomian yang dominan pada kawasan permukiman prioritas perdagangan ini menyebabkan kondisi perekonomian kawasan ini memiliki ketergantungan secara timbal balik dengan kondisi perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan aktivitas bisnis di kawasan perkotaan Tembilihan Hulu, juga didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.133/II-HK Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir bahwasannya Kawasan permukiman kumuh perkotaan Tembilahan Hulu terletak di Kecamatan Tembilahan Hulu tepatnya di Kelurahan Tembilahan Hulu. Secara spesifik kawasan permukiman kumuh Kelurahan Tembilahan Hulu terdiri dari 3 (tiga) spot kawasan yang terletak di tepian parit 9, parit 10 dan parit 11 sebanyak 10 RT. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi lapangan lokasi kawasan permukiman kumuh Kelurahan Tembilahan Hulu saat ini memiliki perbedaan di SK yaitu terdapat 8 jumlah RT yang bertambah dari SK yang sebelumnya didalam SK hanya ada 10 RT hingga sekarang berjumlah sebanyak 18 RT dengan luas total kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu adalah seluas $\pm 20,06$ Ha dengan rinci kawasan permukiman kumuh Parit-11 seluas $\pm 17,32$ Ha, kawasan permukiman kumuh Parit-10 seluas $\pm 1,32$ Ha dan kawasan permukiman kumuh Parit-9 seluas $\pm 1,40$ Ha. Berikut tabel 5.1 lokasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.

Tabel 5.1 Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilihan Hulu

No	Lokasi Sesuai SK Permukiman Kumuh	Lokasi Hasil Survey
1	RT.01/RW.01	RW.01/RT.01
2	RT.01/RW.02	RW.01/RT.02
3	RT.02/RW.02	RW.01/RT.03
4	RT.03/RW.02	RW.02/RT.01
5	RT.01/RW.03	RW.02/RT.02
6	RT.01/RW.05	RW.02/RT.03
7	RT.01/RW.07	RW.03/RT.01
8	RT.01/RW.12	RW.03/RT.02
9	RT.03/RW.10	RW.03/RT.03
10	RT.01/RW.15	RW.05/RT.01
11		RW.05/RT.02
12		RW.05/RT.03
13		RW.07/RT.01
14		RW.07/RT.02
15		RW.07/RT.03
16		RW.10/RT.02
17		RW.10/RT.03
10		RW.12/RT.01
Jumlah	10 RT/RW	18 RT/RW

Sumber : Hasil Analisis 2019

5.1 Identifikasi Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu

5.1.1 Bangunan Gedung

a) Ketidakteraturan Bangunan

Ketidakteraturan bangunan dilihat berdasarkan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman kumuh di lokasi penelitian apabila tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Berdasarkan hasil observasi lapangan ketidakteraturan bangunan di lokasi penelitian yaitu terdapat ketidaksesuaian yang ditinjau dari **bentuk dan peletakan bangunan** dimana *didalam RDTR Kecamatan Tembilihan Hulu tercantum bahwasannya bentuk bangunan rumah tunggal seharusnya peletakkannya di kawasan kepadatan rendah, sedangkan kondisi eksisting nya bentuk bangunan rumah tunggal terletak di kepadatan tinggi, sehingga hal tersebut menyebabkan bangunan di lokasi penelitian tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR Kecamatan Tembilihan Hulu dengan jumlah ketidakteraturan sebanyak 834 unit bangunan.* Berikut gambar 5.1 kondisi ketidakteraturan bangunan.



Gambar 5.1

Kondisi Ketidakteraturan Bangunan

Sumber: Hasil Survei Primer 2019

b) Tingkat Kepadatan Bangunan

Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang berdasarkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Berdasarkan regulasi dalam RDTR Kecamatan Tembilahan Hulu diketahui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 60%, dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yaitu 1,2. Maka hasil observasi lapangan dilakukan perhitungan KDB dengan persentase perbandingan luas seluruh lantai dasar dengan luas lahan dan menghasilkan KDB rata-rata yaitu 75% sedangkan KLB yaitu membandingkan luas lahan dengan luas tanah bangunan dan menghasilkan KLB yaitu 1,5. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa KDB dan KLB di lokasi penelitian **tidak sesuai** dalam ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kemudian berdasarkan perhitungan kepadatan bangunan yaitu membandingkan jumlah bangunan dengan luas kawasan menghasilkan **kepadatan tinggi** sebesar 76%. Berikut gambar 5.2 kondisi tingkat kepadatan bangunan.



Gambar 5.2
Kondisi Tingkat Kepadatan Bangunan

Sumber: Hasil Survei Primer 2019

c) Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi bangunan pada permukiman apabila tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan terdiri atas **standar kesehatan bangunan dan standar kenyamanan bangunan.**

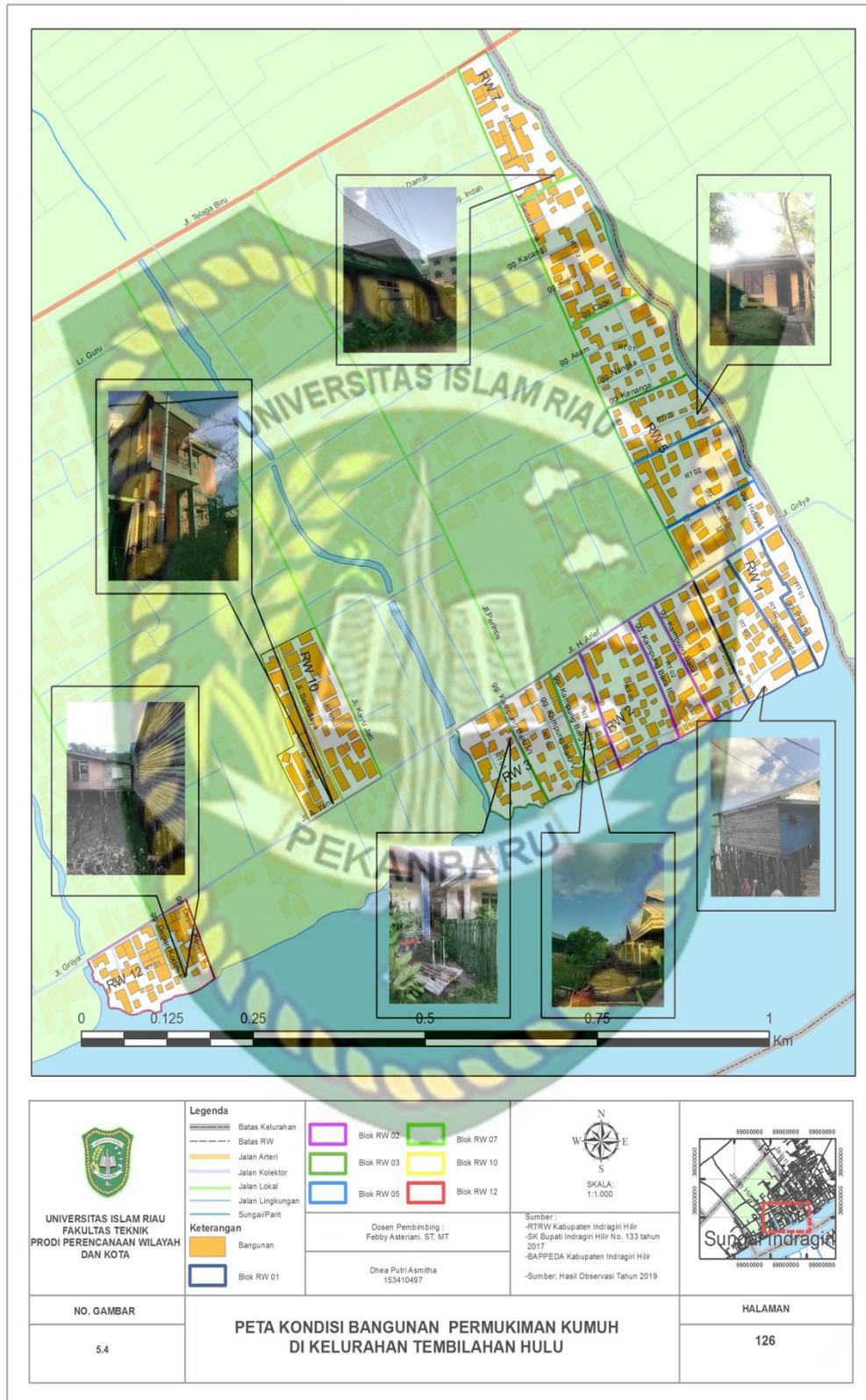
Berdasarkan hasil observasi ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan **belum sesuai** di tinjau dari standar **kesehatan bangunan** yaitu dari segi **pencahayaan rumah** belum memiliki standar yang benar yaitu *belum meratanya jenis pencahayaan di permukiman lokasi studi yang disebabkan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sehingga tidak terdapatnya ruang yang menghasilkan cahaya alami saat pagi hingga sore hari.* Kemudian standar teknis kesehatan yaitu **sanitasi yang sesuai dalam SNI** terdiri atas *sistem pengolahan limbah, drainase dan persampahan permukiman, dilokasi penelitian sanitasinya belum terkelola dengan baik karena air limbah yang belum memiliki septitank, serta ketidakersediaan drainase, dan tidak terdapatnya pengolahan sampah*

dengan pemilahan domestik skala rumah tangga. Sedangkan standar teknis **kenyamanan bangunan** yaitu *tidakterdapatnya ruang gerak antar ruang dikarenakan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, yang menyebabkan kebisingan, ketidaknyamanan udara dan temperatur ruang, serta ketidaknyamanan hak pribadi terganggu* di lokasi studi. Oleh karena itu bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan diatas ialah sebanyak 681 unit bangunan. Berikut gambar 5.3 kondisi bangunan tidak sesuai persyaratan teknis.



Gambar 5.3
Kondisi Bangunan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sumber: Hasil Survei Primer 2019



Gambar 5.4
Peta Mapping Kondisi Eksisting Bangunan Gedung di Kelurahan Tembilaan Hulu

5.1.2 Jalan Lingkungan

a) Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

Cakupan pelayanan jalan lingkungan dapat dilihat dari dua indikator yaitu perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman skala wilayah dan perlunya keterhubungan antar jalan dalam perumahan dalam skala kawasan. Berdasarkan hasil survei lapangan bahwasannya jalan lingkungan yang ada di lingkungan kawasan Tembilahan Hulu terdapatnya permukiman yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dikarenakan panjang jalan lingkungan eksisting di lokasi studi permukiman kumuh Kelurahan Tembilahan Hulu dengan panjang 5090 meter, sedangkan idealnya panjang jalan di lokasi studi yaitu 5516 meter, sehingga persentase selisih panjang jalan tersebut ialah sepanjang 8%. Berikut gambar 5.5 kondisi cakupan pelayanan jalan lingkungan.



Gambar 5.5
Kondisi Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan

Sumber: Hasil Survei Primer 2019

b) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan

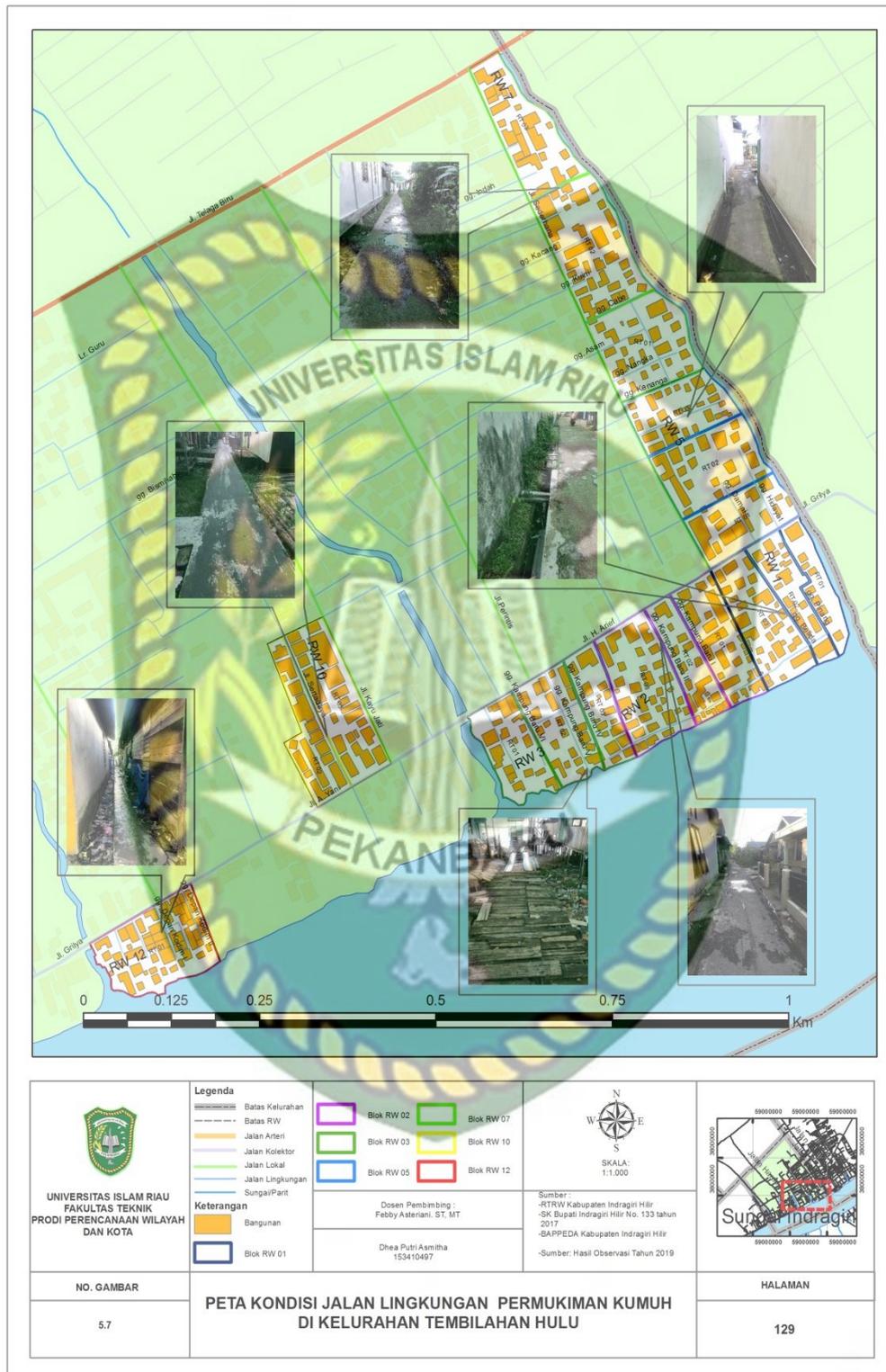
Kualitas permukaan jalan lingkungan merupakan kondisi jenis perkerasan jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Tembilahan Hulu. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya kualitas jalan lingkungan di Kelurahan Tembilahan Hulu ini berupa aspal, beton dan semenisasi akan tetapi terdapatnya jalan lingkungan dengan kondisi permukaan jalan papan yang terletak khusus permukiman tepi sungai. Sehingga permukaan jalan lingkungan dengan jenis perkerasan semenisasi dan aspal memiliki kerusakan dengan panjang jalan yang kualitas permukaan jalan rusak yaitu sepanjang 1810 meter dari total jalan di lokasi studi sepanjang 5090 meter. Sehingga persentase jalan yang rusak dengan total jalan yang ada ialah **35%**. Berikut gambar 5.6 kondisi kualitas jalan lingkungan.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Gambar 5.6
Kondisi Kualitas Jalan Lingkungan
Sumber: Hasil Survei Primer 2019



Gambar 5.7
Peta Mapping Kondisi Eksisting Jalan Lingkungan di Kelurahan Tembilaan Hulu

5.1.3 Penyediaan Air Minum

a) Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman air minum ialah apabila **tercapainya akses jaringan distribusi air minum** kepada masyarakat dengan standar air minum sesuai syarat kesehatan air minum yang terdiri atas *persyaratan fisik, persyaratan mikrobiologis, dan persyaratan kimiawi*.

Berdasarkan hasil observasi di lokasi studi bahwasannya **belum maksimalnya ketersediaan akses aman air minum** karena hanya minoritas masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) melalui PDAM yaitu sebanyak 633 KK, akan tetapi akses aman air minum tersebut belum sesuai standar kesehatan karena kualitas air PDAM yaitu berbau, berwarna, dan keruh. Sedangkan mayoritas masyarakat di lokasi studi masih menggunakan air bersumber dari sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) yaitu sumur bor, air sungai, dan air hujan dengan jumlah KK sebanyak sebanyak 892 KK. Berikut gambar 5.8 sumber air minum.



Gambar 5.8
Sumber Air Minum

b) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum apabila **tidak tercapainya kebutuhan air minum dengan kebutuhan minimal yaitu 60 liter/orang/hari**. Adapun kebutuhan air minum dapat dipenuhi melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) dan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP).

Berdasarkan data sekunder dan primer bahwasannya hasil kebutuhan air minum setiap individu masyarakat permukiman di lokasi penelitian Kelurahan Tembilahan Hulu yang tidak mencapai minimal 60 liter/orang/hari dengan jumlah KK yang tidak terpenuhinya kebutuhan air minum yaitu sebanyak **770 KK**.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Gambar 5.9
Peta Mapping Kondisi Eksisting Penyediaan Air Minum Di Kelurahan
Tembilahan Hulu



5.1.4 Drainase Lingkungan

a) Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air

Drainase lingkungan yang tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan akan menimbulkan genangan. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya saluran drainase di kawasan Kelurahan Tembilihan Hulu banyak yang belum terbangun, sedangkan saluran drainase yang sudah terbangun tidak mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan kondisinya banyak tersumbat yang disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah, aliran air di drainase tidak mengalir, dan sedimentasi saluran, sehingga luas kawasan yang terkena genangan ialah sebesar **12,4 Ha**. Berikut gambar 5. 10 drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air.



Gambar 5.10
Drainase Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air
Sumber: Hasil Survei Primer 2019

b) Ketidaktersediaan Drainase

Berdasarkan hasil observasi di kawasan permukiman kumuh di lingkungan Kelurahan Tembilihan Hulu terdapat banyak lingkungan perumahan yang tidak terbangunnya saluran drainase dikarenakan jarak antar bangunan rapat dan membantasi ruang untuk drainase, sehingga jumlah drainase eksisting di lokasi studi di Kelurahan Tembilihan Hulu ialah hanya sepanjang 1793 meter sedangkan panjang idealnya drainase tersebut sepanjang 7959, maka persentase selisih drainase yang ada dengan drainase ideal ialah 77%. Berikut gambar 5.11 ketidakterediaan drainase.



Gambar 5.11
Ketidakterediaan Drainase
Sumber: Hasil Survei Primer 2019

c) Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan

Ketidakterhubungan sistem drainase apabila saluran drainase lokal tidak terhubung dengan hirarki saluran drainasenya. Berdasarkan hasil observasi bahwasannya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu dengan kondisi eksisting drainase terdapat banyak jaringan jalan yang tidak memiliki saluran drainase, sehingga menyebabkan menimbulkan genangan di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.

d) Tidak Terpeliharanya Drainase

Pemeliharaan saluran drainase perkotaan mencakup bentuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan dengan tujuan menjaga fungsi sistem saluran drainase yang ada. Untuk itu diperlukan pemeliharaan sistem drainase diperkotaan yang dapat dikategorikan menjadi pemeliharaan rutin, berkala, khusus, dan rehabilitasi.

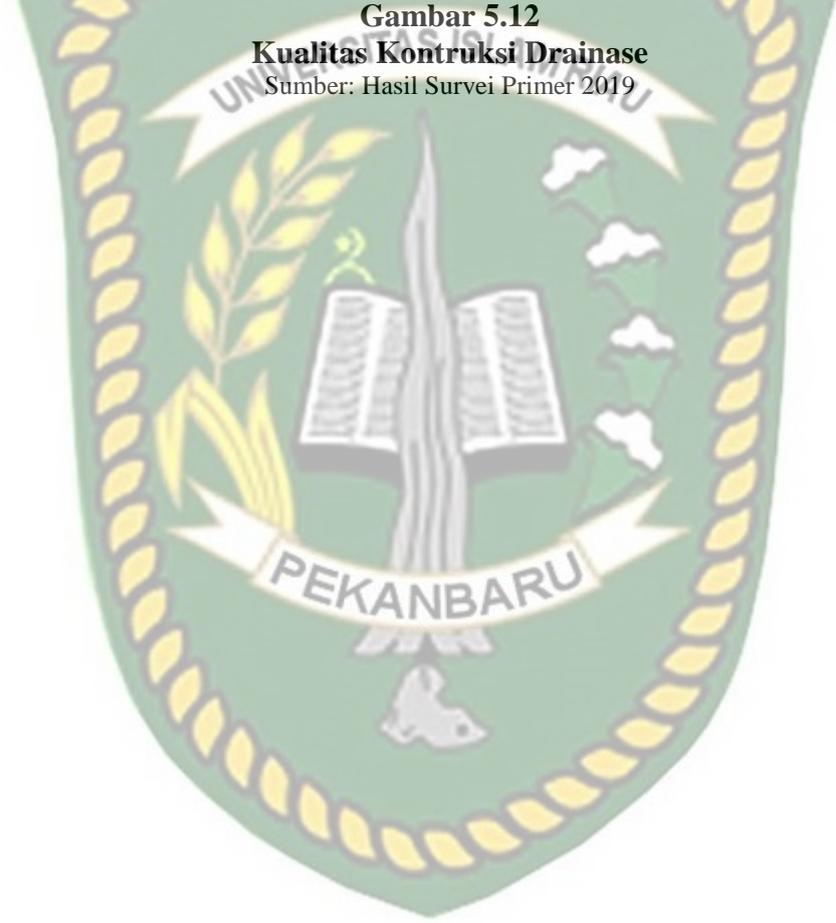
Berdasarkan hasil observasi di lokasi penelitian *saluran drainase yang sudah terbangun saat ini masih terdapat saluran drainase yang tidak terawat dan banyaknya tumpukan sampah yang berdampak aliran air di drainase tidak mengalir, dikarenakan tidak terdapatnya program pemeliharaan saluran drainase baik itu pemerliharanaan rutin, berkala, khusus dan rehabilitasi, sehingga dengan kondisi drainase yang ada saat ini sepanjang 1793 meter, maka drainase yang tidak terpelihara ialah sepanjang 300 meter. Adapun selisih persentase drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisiting ialah 26%.*

e) Kualitas Kontruksi Drainase

Kualitas kontruksi drainase merupakan kondisi material saluran drainase tersebut. Berdasarkan hasil survei primer hanya *sebagian kecil saluran drainase yang sudah terbangun dengan kualitas kontruksi saluran drainase yang baik, dimana kualitas kontruksi drainase di lokasi penelitian permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup dan sebagian adanya kerusakan lapisan meterial drainasenya.* Berikut gambar 5.12 kualitas kontruksi drainase.



Gambar 5.12
Kualitas Kontruksi Drainase
Sumber: Hasil Survei Primer 2019





Gambar 5.13
Peta Mapping Kondisi Eksisting Drainase Lingkungan di Kelurahan Tembilaan Hulu

5.1.5 Pengelolaan Air Limbah

a) Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis apabila kondisi pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem air limbah yang memadai, **ditinjau dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septi tank baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.**

Berdasarkan hasil survei lapangan di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu dimana rumah yang menggunakan *kakus/kloset yang terhubung dengan septik tank yaitu hanya rumah dengan kondisi permanen sedangkan rumah dengan kondisi semi dan non permanen kondisi kakus/klosetnya tidak terhubung dengan septik tank, dimana pembuangan air limbah yang langsung ke sungai*, hal ini menyebabkan pengelolaan air limbah permukiman **tidak sesuai standar teknis**. Adapun jumlah KK dengan pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis ialah sebanyak **880 KK**. Berikut gambar 5.13 air limbah tidak sesuai standar teknis.



Gambar 5.14
Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis

Sumber: Hasil Survei Primer 2019

b) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar

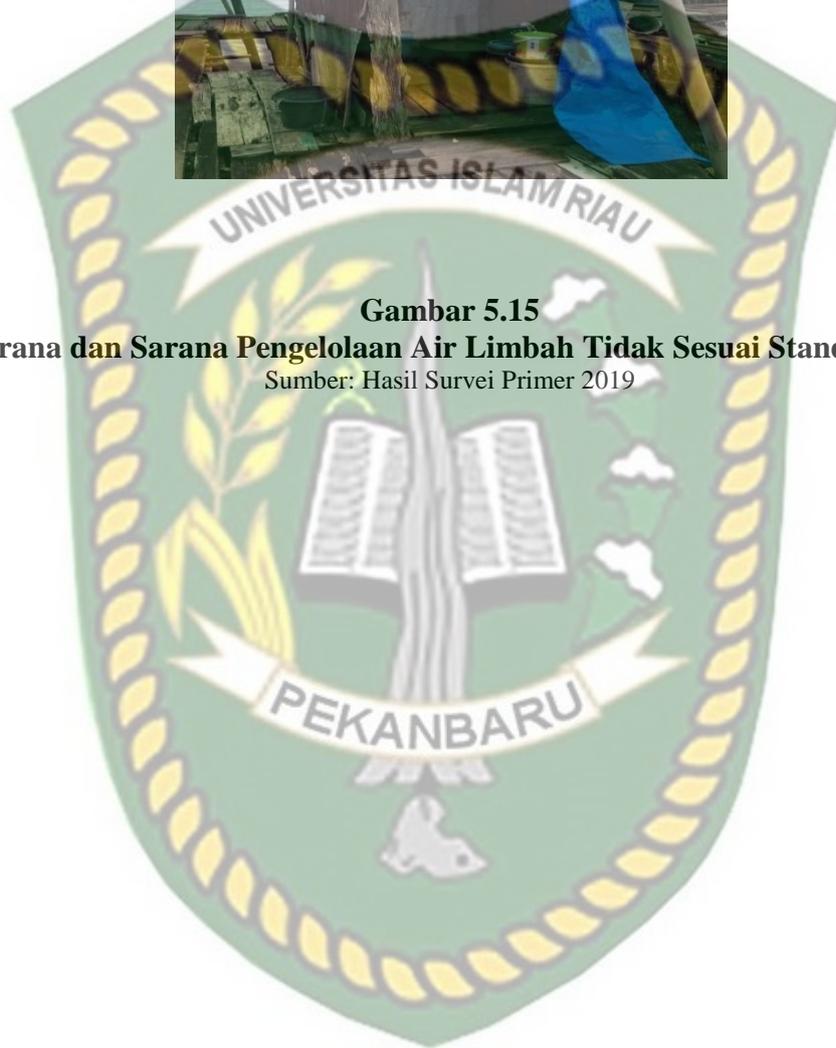
Teknis

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis apabila *kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septitank, dan tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.*

Berdasarkan hasil survei lapangan di lokasi studi bahwasannya kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah **tidak sesuai standar teknis** karena terdapatnya *rumah dengan kondisi struktur bangunan semi dan non permanen tidak memiliki prasarana dan sarana yang sesuai standar yaitu dengan tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septitank, lalu struktur bangunan rumah permanen hanya tersedia sistem pengolahan limbah setempat.* Oleh karena itu sebanyak **782 KK** saat ini di lokasi studi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis. Berikut gambar 5.14 prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis.



Gambar 5.15
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis
Sumber: Hasil Survei Primer 2019



5.1.6 Pengelolaan Persampahan

a) Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis **apabila tidak terpenuhinya prasarana dan sarana sampah yang terdiri atas tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan, dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.**

Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwasannya di lokasi studi kondisi prasarana dan sarana persampahan **tidak sesuai persyaratan teknis** karena *tidak ditemukan tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, hanya terdapat 2 (dua) TPS yang tersedia di lingkungan lokasi studi, tidak ditemukan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), hanya ada truk sampah pada skala lingkungan, dan tidak adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di lokasi studi.* Adapun total KK dengan sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu tidak adanya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga sebanyak **878 KK**. Berikut gambar 5.17 kondisi tidak tersedianya tempat sampah



Gambar 5.17
Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah
Sumber: Hasil Survei Primer 2019

b) Sistem Pengolahan Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis ditinjau dari **sistem pengolahan sampah saling terintegrasi** dengan standar yaitu terdapatnya *pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir*.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan sistem pengolahan sampah di kawasan kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu ini **tidak sesuai persyaratan teknis**, karena :

- *Tidak terdapatnya pewadahan dan pemilahan domestik bagi permukiman tepi sungai yaitu dengan membuang sampah langsung ke sungai yang membuat kawasan lingkungan permukiman terlihat kumuh, sedangkan permukiman yang jauh dari tepi sungai sudah ada pewadahan tetapi belum ada pemilahan domestik.*
- *Jenis pengumpulan sampah dalam skala lingkungan hanya terdapat 2 TPS di lokasi studi dan TPS tersebut belum mampu menampung kapasitas sampah yang ada, maka timbul TPS ilegal disekitar lokasi dengan didukung*

kebiasaan masyarakat mengumpulkan sampah pada tiap-tiap gang, dan tidak ditemukannya TPS 3R yaitu reduce, reuse, recycle.

- Jenis pengangkutan sampah yaitu hanya terdapat truk sampah yang hanya melayani pengangkutan sampah yang berada di jalan kolektor, dan tidak adanya gerobak sampah yang melayani pengangkutan sampah di jalan lingkungan pada tiap rumah tangga.

- Tidak ditemukan pengolahan sampah lingkungan berdasarkan reduce, reuse, recycle.

Oleh karena itu jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis ialah sebanyak **912 KK**. Berikut gambar 5.18 kondisi pengelolaan sampah yang tidak sesuai.



Gambar 5.18
Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Tidak Sesuai

Sumber: Hasil Survei Primer 2019

c. Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengolahan Persampahan

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa pemeliharaan secara rutin dan

pemeliharaan secara berkala. Berdasarkan hasil data sekunder dan primer bahwasannya di lokasi penelitian memiliki jumlah KK yang tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampahnya sebanyak **899 KK** karena *tidak adanya bentuk pemeliharaan pengolahan persampahan baik secara rutin maupun berkala.*



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :



Gambar 5.19
Peta Mapping Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Tembilaan Hulu

5.1.7 Proteksi Kebakaran

a. Tidak Tersedianya Prasarana Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi lapangan **tidak ditemukan prasarana proteksi kebakaran** seperti bangunan pos kebakaran, pasokan air yang lebih, jalan lingkungan yang tidak bisa dilalui mobil kebakaran, dan tidak adanya data sistem proteksi kebakaran lingkungan.

b. Tidak Tersedianya Sarana Proteksi Kebakaran

Berdasarkan hasil observasi lapangan **tidak ditemukan sarana proteksi kebakaran** seperti alat pemadam api ringan (APAR), mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilaan Hulu ini tidak ada sarana dan prasarana kebakaran.

Maka berdasarkan 7 indikator kawasan permukiman kumuh diatas dapat dilihat lebih detail dalam tabel 5.2 tabel hasil observasi kondisi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilaan Hulu.

Tabel 5.2 Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
1	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	Berdasarkan hasil observasi lapangan ketidakteraturan bangunan di lokasi penelitian yaitu terdapat ketidaksesuaian yang ditinjau dari bentuk dan peletakan bangunan dimana didalam RDTR Kecamatan Tembilahan Hulu tercantum bahwasannya bentuk bangunan rumah tunggal seharusnya peletakkannya di kawasan kepadatan rendah, sedangkan kondisi eksisting nya bentuk bangunan rumah tunggal terletak di kepadatan tinggi, sehingga hal tersebut menyebabkan bangunan di lokasi penelitian tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR Kecamatan Tembilahan Hulu dengan jumlah ketidakteraturan sebanyak 834 unit bangunan.	
		Tingkat Kepadatan Bangunan	Berdasarkan regulasi dalam RDTR Kecamatan Tembilahan Hulu diketahui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 60%, dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yaitu 1,2. Maka hasil observasi lapangan dilakukan perhitungan KDB dengan persentase perbandingan luas seluruh lantai dasar dengan luas lahan dan menghasilkan KDB rata-rata yaitu 75% sedangkan KLB yaitu membandingkan luas lahan dengan luas tanah bangunan dan menghasilkan KLB yaitu 1,5. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa KDB dan KLB di lokasi penelitian tidak sesuai dalam ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kemudian	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
		Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis Bangunan	<p>berdasarkan perhitungan kepadatan bangunan yaitu membandingkan jumlah bangunan dengan luas kawasan menghasilkan kepadatan tinggi sebesar 76%.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan belum sesuai di tinjau dari standar kesehatan bangunan yaitu dari segi pencahayaan rumah belum memiliki standar yang benar yaitu belum meratanya jenis pencahayaan di permukiman lokasi studi yang disebabkan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sehingga tidak terdapatnya ruang yang menghasilkan cahaya alami saat pagi hingga sore hari. Kemudian standar teknis kesehatan yaitu sanitasi yang sesuai dalam SNI terdiri atas sistem pengolahan limbah, drainase dan persampahan permukiman, dilokasi penelitian sanitasinya belum terkelola dengan baik karena air limbah belum memiliki septitank, serta ketidakterediaan drainase, dan tidak terdapatnya pengolahan sampah melalui pemilahan domestik skala rumah tangga. Sedangkan standar teknis kenyamanan bangunan yaitu tidak terdapatnya ruang gerak antar ruang dikarenakan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, yang menyebabkan kebisingan, ketidaknyamanan udara dan temperatur ruang, serta ketidaknyamanan hak pribadi terganggu di lokasi studi. Oleh karena itu bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan diatas ialah sebanyak 681 unit bangunan.</p>	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
2	Jalan Lingkungan	Cangkupan Pelayanan Jalan Lingkungan	Berdasarkan hasil observasi bahwasannya jalan lingkungan yang ada di lingkungan kawasan Tembilahan Hulu terdapatnya permukiman yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dikarenakan panjang jalan lingkungan eksisting di lokasi studi permukiman kumuh Kelurahan Tembilahan Hulu dengan panjang 5090 meter, sedangkan idealnya panjang jalan di lokasi studi yaitu 5516 meter, sehingga persentase selisih panjang jalan tersebut ialah sepanjang 8%.	
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	Berdasarkan hasil observasi kualitas jalan lingkungan di Kelurahan Tembilahan Hulu ini berupa aspal, beton dan semenisasi tetapi masih ada jalan lingkungan dengan kondisi permukaan jalan papan yang terletak khusus permukiman tepi sungai. Sehingga permukaan jalan lingkungan dengan jenis perkerasan semenisasi dan aspal memiliki kerusakan dengan panjang jalan yang kualitas permukaan jalan rusak yaitu sepanjang 1810 meter dari total jalan di lokasi studi sepanjang 5090 meter. Sehingga persentase jalan yang rusak dengan total jalan yang ada ialah 35%.	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
3	Ketersediaan Air Minum	Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	Berdasarkan hasil observasi di lokasi studi bahwasannya belum maksimalnya ketersediaan akses aman air minum karena hanya minoritas masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) melalui PDAM yaitu sebanyak 633 KK, akan tetapi akses aman air tersebut belum sesuai standar kesehatan karena kualitas air PDAM yaitu berbau, berwarna, dan keruh. Sedangkan mayoritas masyarakat di lokasi studi masih menggunakan air bersumber dari sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) yaitu sumur bor, air sungai, dan air hujan dengan jumlah KK sebanyak sebanyak 892 KK.	
		Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	Berdasarkan hasil observasi kebutuhan air minum setiap individu masyarakat permukiman di lokasi penelitian Kelurahan Tembilahan Hulu yang tidak mencapai minimal 60 liter/orang/hari dengan jumlah KK yaitu sebanyak 770 KK.	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilihan Hulu	Dokumentasi
4	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	Berdasarkan hasil observasi bahwasannya saluran drainase di kawasan Kelurahan Tembilihan Hulu banyak yang belum terbangun, sedangkan saluran drainase yang sudah terbangun tidak mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan kondisinya banyak yang tersumbat disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah, dan sedimentasi saluran, sehingga luas kawasan yang terkena genangan ialah sebesar 12,4 Ha.	
		Ketidakterseediaan Drainase	Berdasarkan hasil observasi terdapatnya banyak lingkungan perumahan yang tidak terbangunnya saluran drainase dikarenakan jarak antar bangunan rapat dan membantasi ruang untuk drainase, sehingga jumlah drainase eksisting di lokasi studi di Kelurahan Tembilihan Hulu ialah hanya sepanjang 1793 meter sedangkan panjang idealnya drainase tersebut sepanjang 7959, maka persentase selisih drainase yang ada dengan drainase ideal ialah 77%.	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
		Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan	Berdasarkan hasil observasi bahwasannya lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu dengan kondisi eksisting dimana terdapatnya banyak jaringan jalan yang tidak tersedianya saluran drainase sehingga menyebabkan menimbulkan genangan di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.	
		Tidak Terpeliharanya Drainase	Berdasarkan hasil observasi saluran drainase yang sudah terbangun saat ini sangat tidak terawat dan banyaknya tumpukan sampah yang berdampak aliran air di drainase tidak mengalir, dikarenakan tidak terdapatnya program pemeliharaan saluran drainase baik itu pemerliharaan rutin, berkala, khusus dan rehabilitasi, sehingga dengan kondisi drainase yang ada saat ini sepanjang 1793 meter, maka drainase yang tidak terpelihara ialah sepanjang 300 meter. Adapun selisih persentase drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisiting ialah 26%.	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
		Kualitas Konstruksi Drainase	Berdasarkan hasil observasi hanya sebagian kecil saluran drainase yang sudah terbangun dengan kualitas konstruksi saluran drainase yang baik yaitu dimana kualitas konstruksi drainase di lokasi penelitian permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup dan sebagian adanya kerusakan lapisan meterial drainasenya.	
5	Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	Berdasarkan hasil survei lapangan di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu rumah yang menggunakan kakus/kloset yang terhubung dengan septik tank yaitu hanya rumah dengan kondisi permanen sedangkan rumah dengan kondisi semi dan non permanen kondisi kakus/klosetnya tidak terhubung dengan septik tank, dimana pembuangan air limbah yang langsung ke sungai, hal ini menyebabkan pengelolaan air limbah permukiman tidak sesuai standar teknis. Adapun jumlah KK dengan pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis ialah sebanyak 880 KK.	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
		Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Berdasarkan hasil survei lapangan di lokasi studi bahwasannya kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis karena terdapatnya rumah dengan kondisi struktur bangunan semi dan non permanen tidak memiliki prasarana dan sarana yang sesuai standar yaitu tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septitank, lalu kondisi struktur bangunan rumah permanen hanya tersedia sistem pengolahan limbah setempat. Oleh karena itu sebanyak 782 KK saat ini di lokasi studi dengan kondisi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis.	
6	Pengelolaan Persampahan	Prasarana Dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	Berdasarkan hasil observasi lapangan bahwasannya di lokasi studi kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis karena tidak ditemukan tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, hanya terdapat 2 (dua) TPS yang tersedia di lingkungan lokasi studi, tidak ditemukan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), hanya ada truk sampah pada skala lingkungan, dan tidak adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di lokasi studi. Adapun total KK dengan sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu tidak adanya tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga sebanyak 878 KK	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
		<p>Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Tidak Sesuai Standar Teknis</p>	<p>Berdasarkan hasil observasi ditemukan sistem pengolahan sampah di kawasan kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu ini tidak sesuai persyaratan teknis, karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapatnya pewadahan dan pemilahan domestik bagi permukiman tepi sungai yaitu dengan membuang sampah langsung ke sungai yang membuat kawasan lingkungan permukiman terlihat kumuh, sedangkan permukiman yang jauh dari tepi sungai sudah ada pewadahan tetapi belum ada pemilahan domestik. - Jenis pengumpulan sampah dalam skala lingkungan hanya terdapat 2 TPS di lokasi studi dan TPS tersebut belum mampu menampung kapasitas sampah yang ada, maka timbul TPS ilegal disekitar lokasi dengan didukung kebiasaan masyarakat mengumpulkan sampah pada tiap-tiap gang, dan tidak ditemukannya TPS 3R yaitu reduce, reuse, recycle. - Jenis pengangkutan sampah yaitu terdapat truk sampah yang hanya melayani pengangkutan sampah yang berada di jalan kolektor, dan tidak adanya gerobak sampah yang melayani pengangkutan sampah di jalan lingkungan pada tiap rumah tangga. - Tidak ditemukan pengolahan sampah lingkungan berdasarkan reduce, reuse, recycle. <p>Oleh karena itu jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan</p>	

No	Aspek Kekumuhan	Kriteria Kekumuhan	Hasil Observasi Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Tembilahan Hulu	Dokumentasi
		Tidak Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	<p>teknis ialah sebanyak 912 KK</p> <p>Berdasarkan hasil observasi bahwasannya di lokasi penelitian memiliki jumlah KK yang tidak terpelihara sarana dan prasarana pengelolaan sampahnya sebanyak 899 KK karena tidak adanya bentuk pemeliharaan pengolahan persampahan baik secara rutin maupun berkala.</p>	
7	Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	Berdasarkan hasil observasi tidak ditemukan prasarana proteksi kebakaran seperti bangunan pos kebakaran, pasokan air yang lebih, jalan lingkungan yang tidak bisa dilalui mobil kebakaran, dan tidak adanya data sistem proteksi kebakaran lingkungan.	-
		Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	Berdasarkan hasil observasi lapangan tidak ditemukan sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR), mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya, sehingga dapat di simpulkan bahwasannya tidak ada sarana dan prasarana kebakaran.	-

Sumber : Hasil Observasi 2019

5.1.8 Identifikasi Legalitas Tanah

Berdasarkan hasil wawancara lokasi kawasan kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu saat ini masyarakat permukiman memiliki kejelasan status penguasaan tanah yaitu milik sendiri dengan adanya surat hak milik (SHM) dengan persentase sebesar 90% di lokasi permukiman kumuh tersebut.

5.1.9 Identifikasi Pertimbangan Lain

a) Nilai Strategis Lokasi

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Tembilihan Hulu **memiliki nilai strategis** lokasi dikarenakan Kecamatan Tembilihan Hulu dalam draft RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2038 pada bab rencana struktur ruang wilayah berada di Kelurahan Tembilihan Hulu diperuntukan sebagai PKW yaitu Pusat Kegiatan Wilayah dan merupakan Ibu Kota Kecamatan Tembilihan Hulu, sedangkan dalam bab rencana pola ruang di lokasi penelitian merupakan pengembangan kawasan permukiman perkotaan.

b) Kependudukan

Berdasarkan data hasil analisis bahwasannya di lokasi penelitian memiliki kepadatan penduduk sebesar **258 Jiwa/Ha**, dimana jumlah tersebut termasuk ke dalam kategori **kepadatan penduduk sedang**.

c) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Berdasarkan wawancara tersebut kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang dimiliki kawasan di Kelurahan Tembilihan Hulu ini adalah merupakan kawasan yang terletak di pusat kota dan pusat pemerintahan kabupaten, sebagai pusat kegiatan perdagangan regional hal ini tercantum dalam draft RTRW

Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2038 pada bab rencana struktur ruang. *Keadaan sosial masyarakat Tembilahan Hulu ini masih memiliki keakraban melalui sosialisasi dengan adanya gotong royong dengan baik, dan kegiatan wirid, hal ini disampaikan oleh beberapa ketua RT di kawasan ini, sedangkan kondisi budaya dengan mayoritas penduduknya merupakan suku Melayu Riau, dan lainnya merupakan suku-suku pendatang, seperti suku Jawa, suku Banjar, dan suku Bugis, sehingga keadaan ekonomi di Kelurahan Tembilahan Hulu ini mayoritas penduduk bekerja sebagai pedagang dengan tingkat pendidikan terakhir rata-rata tamat SMP/SLTP atau SMA/SLTA.*

Berdasarkan keterangan diatas lokasi penelitian termasuk dalam kategori lokasi **memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk di kembangkan/dipelihara.**

5.2 Identifikasi Tipologi Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu

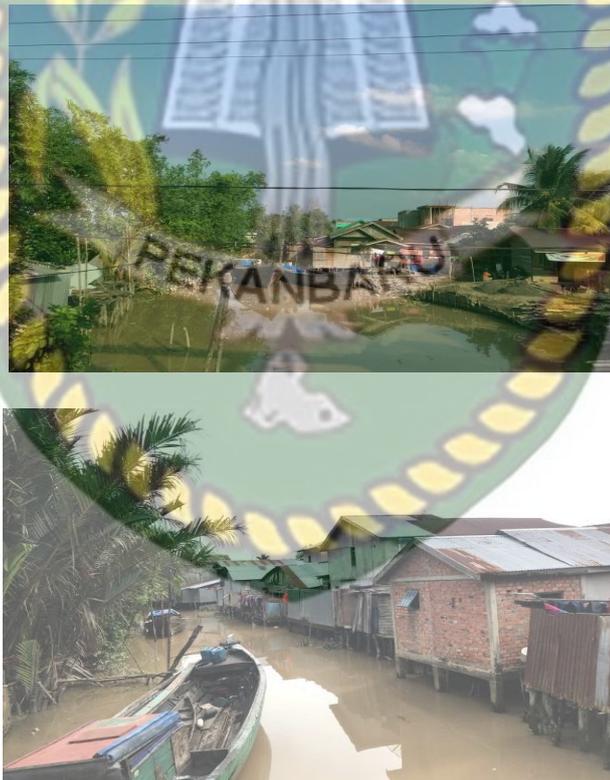
Permukiman kumuh perkotaan Kelurahan Tembilahan Hulu dicirikan sebagai kawasan perkotaan yang sedang berkembang, sehingga menyebabkan ketidakmeratanya tingkat kepadatan penduduk dan bangunan pada suatu kawasan dengan kawasan lainnya yang menandakan bahwa telah terjadi disparitas atau kesenjangan dalam pergerakan ekonomi yang berbeda pada suatu kawasan yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak terencana. Berdasarkan hasil survei primer melalui observasi maka dapat diidentifikasi permukiman kumuh perkotaan Kelurahan Tembilahan Hulu mengacu pada kondisi eksisting permukiman yang ada, yaitu terdiri atas permukiman tepi

sungai dan permukiman dataran rendah, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016 sebagai berikut:

a) Permukiman Tepi Air yang berada di tepi badan air seperti sungai yang meliputi;

- Permukiman Tepian Parit terletak di RW 05, RW 07, dan RW 12.
- Permukiman Tepian Sungai terletak di RW 01, RW 02, RW 03, dan RW 12.

Berikut ini gambar 5.20 kondisi tipologi permukiman tepian sungai di Kelurahan Tembilahan Hulu, dan gambar 5.21 peta tipologi permukiman tepian sungai di Kelurahan Tembilahan Hulu.



Gambar 5.20
Kondisi Tipologi Permukiman Tepian Sungai/Parit
Sumber: Hasil Survei Primer 2019

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Gambar 5.21
Peta Tipologi Kawasan Tepi Air Permukiman Kumuh Kota Tembilahan Hulu

b) Permukiman Dataran Rendah yang berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng <10%, yang meliputi;

- Permukiman Padat Perkotaan terletak di RW 01 dan RW 02.
- Permukiman Kepadatan Sedang terletak di RW 03, RW, 05 dan RW 02.
- Permukiman Campuran terletak di RW 01, RW 02, RW 03, RW 05, RW 07, RW 10, dan RW 12.

Berikut ini gambar 5.22 kondisi tipologi permukiman dataran rendah di Kelurahan Tembilahan Hulu, dan gambar 5.23 peta tipologi permukiman dataran rendah di Kelurahan Tembilahan Hulu.



Gambar 5.22
Kondisi Tipologi Permukiman Dataran Rendah
Sumber: Hasil Survei Primer 2019



Gambar 5.23
Peta Tipologi Kawasan Dataran Rendah Permukiman Kumuh Kota Tembilahan Hulu

5.3 Analisis Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh di Tembilahan Hulu

Dalam menganalisis tingkat kekumuhan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu dilakukan terlebih dahulu penilaian lokasi perblok atau lokasi RT/RW pada lokasi studi yang terindikasikan menjadi permukiman kumuh, karena dalam satu Kelurahan Tembilahan Hulu tidak semua menjadi permukiman kumuh. Pemilihan tersebut dapat dilihat dari karakteristik indikator permukiman kumuh dan berdasarkan SK Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 133/II-HK Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh dan hasil observasi lapangan. Adapun hasil observasi lapangan yang mempertimbangkan karakteristik berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan Peraturan Menteri No 2 Tahun 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu kondisi fisik bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, legalitas lahan, dan pertimbangan lain yang meliputi kondisi kawasan strategis, kependudukan, dan kondisi sosial budaya. Maka dapat di ketahui blok RT/RW lokasi permukiman kumuh pada tabel 5.3 sebagai berikut:

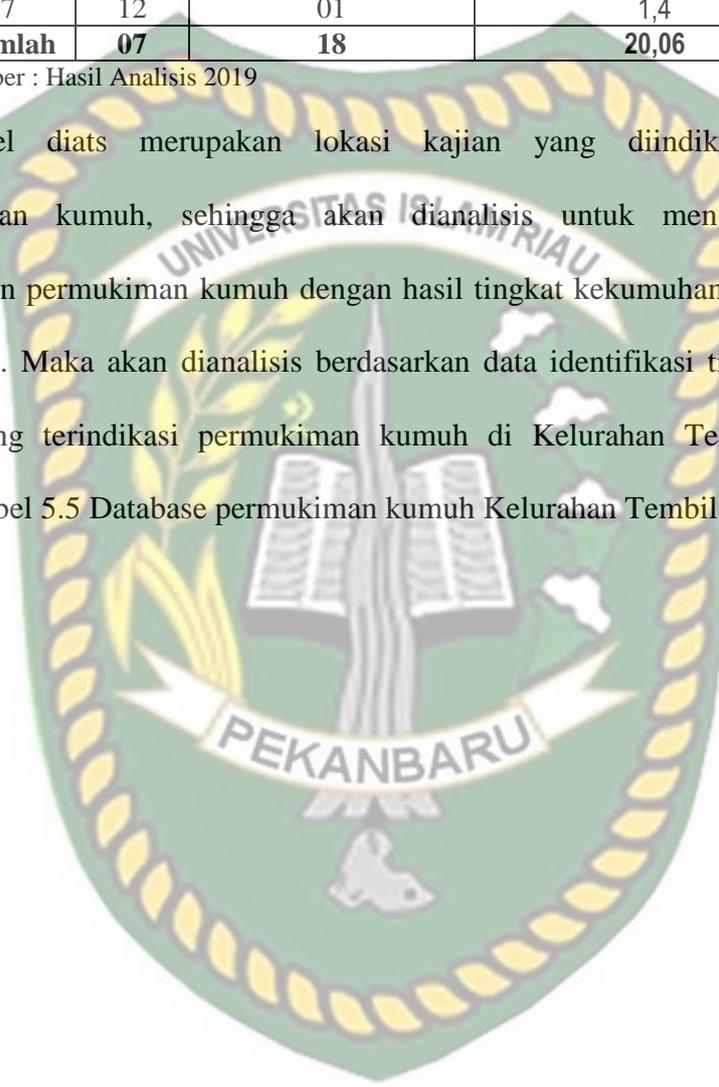
Tabel 5.3 Lokasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu

No	RW	RT	Luas (Ha)
1	01	01	0,8
		02	0,9
		03	0,9
2	02	01	0,9
		02	0,99
		03	1,2
3	03	01	1
		02	2
		03	1,6
4	05	01	0,85
		02	0,8

No	RW	RT	Luas (Ha)
		03	1,9
5	07	01	1,8
		02	0,9
		03	0,8
6	10	02	0,66
		03	0,66
7	12	01	1,4
Jumlah	07	18	20,06

Sumber : Hasil Analisis 2019

Tabel diatas merupakan lokasi kajian yang diindikasikan sebagai permukiman kumuh, sehingga akan dianalisis untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kumuh dengan hasil tingkat kekumuhan rendah, sedang dan tinggi. Maka akan dianalisis berdasarkan data identifikasi tiap-tiap RT/RW lokasi yang terindikasi permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu. Berikut tabel 5.5 Database permukiman kumuh Kelurahan Tembilihan Hulu.



Tabel 5.4
Database Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu

No.	Aspek	Kebutuhan Data	Sat	Data Baseline Per-RT / RW Kawasan Kumuh Tembilahan Hulu																	Jumlah	
				RT 01/ RW 01	RT 02/ RW 01	RT 03 / RW 01	RT 01/ RW 02	RT 02/ RW 02	RT 03 / RW 02	RT 01/ RW 03	RT 02/ RW 03	RT 03/ RW 03	RT 01/ RW 05	RT 02/ RW 05	RT 03/ RW 05	RT 01/ RW 07	RT 02/ RW 07	RT 03/ RW 07	RT 02/ RW 10	RT 03/ RW 10		RT 01/ RW 12
				Jumlah KK																		
				90	70	70	112	70	115	70	70	85	60	82	70	87	88	120	170	113	120	1662
				Luas Kawasan Kumuh (Ha)																		
				1,1	1	1	1	1,06	1,1	1	1	1,2	1,2	1,3	1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4	1	20,06
1	Kondis Bangunan Gedung	Jumlah bangunan tidak teratur	Unit	35	39	39	32	56	97	34	55	70	17	30	40	74	30	20	30	105	31	834
		Jumlah total bangunan hunian	Unit	85	60	60	100	60	101	65	70	70	50	80	70	82	85	102	165	110	110	1525
		Jumlah tidak sesuai persyaratan teknis	Unit	44	35	45	26	29	52	32	40	42	25	22	20	36	35	20	20	49	79	651
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Ideal	M ¹	190	180	180	350	170	600	146	150	200	450	310	400	450	300	350	300	300	490	5516
		Panjang Jalan Eksisting	M ¹	185	160	170	340	160	590	140	130	175	440	300	300	440	280	330	250	280	420	5090
		Panjang Jalan Rusak	M ¹	0	0	0	0	0	365	0	40	15	450	200	100	0	100	0	0	200	340	1810

No.	Aspek	Kebutuhan Data	Sat	Data Baseline Per-RT / RW Kawasan Kumuh Tembilahan Hulu																			Jumlah
				RT 01/ RW 01	RT 02/ RW 01	RT 03 / RW 01	RT 01/ RW 02	RT 02/ RW 02	RT 03 / RW 02	RT 01/ RW 03	RT 02/ RW 03	RT 03/ RW 03	RT 01/ RW 05	RT 02/ RW 05	RT 03/ RW 05	RT 01/ RW 07	RT 02/ RW 07	RT 03/ RW 07	RT 02/ RW 10	RT 03/ RW 10	RT 01/ RW 12		
				Jumlah KK																			
				90	70	70	112	70	115	70	70	85	60	82	70	87	88	120	170	113	120	1662	
				Luas Kawasan Kumuh (Ha)																			
				1,1	1	1	1	1,06	1,1	1	1	1,2	1,2	1,3	1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4	1	20,06	
3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Jumlah KK tidak terlayani akses air minum yang aman	KK	40	30	50	90	50	80	49	55	55	40	30	33	40	40	40	60	50	60	892	
		Jumlah KK tidak terakses kecukupan air minum	KK	50	40	20	22	20	35	21	15	30	20	52	37	48	47	80	110	63	60	770	
4	Kondisi Drainase Lingkungan	Luas kawasan yang terkena genangan	Ha	0,8	0,5	0,3	0,9	0,8	0,5	0,5	0,5	0,8	0,7	0,8	1	1	0,9	0,4	0,6	0,4	1	12,4	
		Panjang drainase ideal	M ¹	380	350	360	650	170	1200	219	200	190	450	400	400	450	400	250	500	900	490	7959	
		Panjang drainase eksisting	M ¹	0	0	0	200	0	100	73	0	20	0	100	0	150	200	100	400	450	0	1793	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No.	Aspek	Kebutuhan Data	Sat	Data Baseline Per-RT / RW Kawasan Kumuh Tembilahan Hulu																			Jumlah
				RT 01/ RW 01	RT 02/ RW 01	RT 03 / RW 01	RT 01/ RW 02	RT 02/ RW 02	RT 03 / RW 02	RT 01/ RW 03	RT 02/ RW 03	RT 03/ RW 03	RT 01/ RW 05	RT 02/ RW 05	RT 03/ RW 05	RT 01/ RW 07	RT 02/ RW 07	RT 03/ RW 07	RT 02/ RW 10	RT 03/ RW 10	RT 01/ RW 12		
				Jumlah KK																			
				90	70	70	112	70	115	70	70	85	60	82	70	87	88	120	170	113	120	1662	
				Luas Kawasan Kumuh (Ha)																			
				1,1	1	1	1	1,06	1,1	1	1	1,2	1,2	1,3	1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4	1	20,06	
		Panjang drainase tidak terhubung dengan sistem drainase utama	M ¹	0	0	0	200	0	100	73	0	20	0	100	0	150	200	100	400	450	0	1793	
		Panjang drainase tidak terpelihara	M ¹	0	0	0	0	0	100	73	0	20	0	0	0	0	0	100	400	450	0	1143	
		Panjang drainase kualitas buruk	M ¹	0	0	0	150	0	100	0	0	20	0	20	0	0	0	10	0	0	0	300	
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar	KK	35	55	40	80	45	70	40	35	30	45	38	20	25	14	70	88	80	70	880	

No.	Aspek	Kebutuhan Data	Sat	Data Baseline Per-RT / RW Kawasan Kumuh Tembilahan Hulu																			Jumlah
				RT 01/ RW 01	RT 02/ RW 01	RT 03 / RW 01	RT 01/ RW 02	RT 02/ RW 02	RT 03 / RW 02	RT 01/ RW 03	RT 02/ RW 03	RT 03/ RW 03	RT 01/ RW 05	RT 02/ RW 05	RT 03/ RW 05	RT 01/ RW 07	RT 02/ RW 07	RT 03/ RW 07	RT 02/ RW 10	RT 03/ RW 10	RT 01/ RW 12		
				Jumlah KK																			
			KK	90	70	70	112	70	115	70	70	85	60	82	70	87	88	120	170	113	120	1662	
			Ha	Luas Kawasan Kumuh (Ha)																			
				1,1	1	1	1	1,06	1,1	1	1	1,2	1,2	1,3	1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4	1	20,06	
		Jumlah KK dengan sarana dan prasarana air limbah tidak sesuai standar teknis	KK	55	15	30	32	25	45	30	35	55	15	44	50	62	74	50	82	33	50	782	
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Jumlah KK dengan sarana prasarana pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis	KK	50	40	40	30	24	35	66	55	40	50	55	60	60	48	55	40	60	70	878	
		Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	KK	50	37	30	60	40	50	30	60	45	40	50	40	60	60	50	80	50	80	912	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No.	Aspek	Kebutuhan Data	Sat	Data Baseline Per-RT / RW Kawasan Kumuh Tembilahan Hulu																			Jumlah
				RT 01/ RW 01	RT 02/ RW 01	RT 03 / RW 01	RT 01/ RW 02	RT 02/ RW 02	RT 03 / RW 02	RT 01/ RW 03	RT 02/ RW 03	RT 03/ RW 03	RT 01/ RW 05	RT 02/ RW 05	RT 03/ RW 05	RT 01/ RW 07	RT 02/ RW 07	RT 03/ RW 07	RT 02/ RW 10	RT 03/ RW 10	RT 01/ RW 12		
				Jumlah KK																			
				90	70	70	112	70	115	70	70	85	60	82	70	87	88	120	170	113	120	1662	
				Luas Kawasan Kumuh (Ha)																			
				1,1	1	1	1	1,06	1,1	1	1	1,2	1,2	1,3	1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4	1	20,06	
		Jumlah KK dengan sarana prasarana pengolahan sampah tidak terpelihara	KK	40	55	39	50	40	60	45	40	60	60		55	40	40	60	50	70	40	899	
Dokumen ini adalah Arsip Milik : 7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Unit	85	60	60	100	60	101	65	70	70	50	80	70	82	85	102	165	110	110	1525	
		Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Unit	85	60	60	100	60	101	65	70	70	50	80	70	82	85	102	165	110	110	1525	

No.	Aspek	Kebutuhan Data	Sat	Data Baseline Per-RT / RW Kawasan Kumuh Tembilahan Hulu																	Jumlah	
				RT 01/RW 01	RT 02/RW 01	RT 03/RW 01	RT 01/RW 02	RT 02/RW 02	RT 03/RW 02	RT 01/RW 03	RT 02/RW 03	RT 03/RW 03	RT 01/RW 05	RT 02/RW 05	RT 03/RW 05	RT 01/RW 07	RT 02/RW 07	RT 03/RW 07	RT 02/RW 10	RT 03/RW 10		RT 01/RW 12
				Jumlah KK																		
			KK	90	70	70	112	70	115	70	70	85	60	82	70	87	88	120	170	113	120	1662
			Ha	Luas Kawasan Kumuh (Ha)																		
				1,1	1	1	1	1,06	1,1	1	1	1,2	1,2	1,3	1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4	1	20,06
8	Legalitas Tanah	Kejelasan Status Penguasaan Tanah	Dok/ Wawancara	Jelas Tanah Milik Masyarakat																		
		Kesesuaian RTR		<p>Sesuai dikarenakan dalam Draft RTRW Kabupaten Indragiri Hilir lokasi penelitian merupakan kawasan budidaya dengan peruntukan sebagai kawasan permukiman perkotaan dan pengembangan perumahan perkotaan.</p>																		
9	Pertimbangan Lain	Nilai Strategis Lokasi	Dok/ Wawancara	<p>Dalam draft RTRW Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2038 pada bab rencana struktur ruang wilayah berada di Kelurahan Tembilahan Hulu yang juga merupakan ibukota Kecamatan Tembilahan Hulu, sedangkan dalam bab rencana pola ruang merupakan maka kawasan permukiman perkotaannya meliputi Kelurahan Tembilahan Hulu, sehingga berdasarkan draf RTRW Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2038 tersebut Kecamatan Tembilahan Hulu memiliki nilai strategis lokasi.</p>																	Strategis	
		Kependudukan		5184 (Jumlah penduduk permukiman kumuh)/20,06 (Luas kawasan permukiman kumuh)																	258 Jiwa/Ha	
		Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya		<p>Lokasi penelitian memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk di kembangkan/dipelihara dikarenakan dalam RTRW lokasi tersebut letaknya yang strategis berada pada kawasan pusat kota dan pusat pemerintahan kabupaten, sebagai pusat kegiatan perdagangan regional, sehingga sebagian besar masyarakat bermata pencaharian dibidang perikanan (nelayan),perkebunan, dan perdagangan jasa.</p>																	Ada	

Sumber : Hasil Observasi dan Data Sekunder 2019

Berdasarkan data baseline diatas maka akan dilakukan analisis tingkat kekumuh di kawasan kumuh Tembilahan Hulu melalui data umum yaitu :

- Provinsi : Riau
- Kab/Kota : Indragiri Hilir
- Kecamatan : Tembilahan Hulu
- Kawasan : Tembilahan Hulu
- Luas SK : 20,06 Ha
- Luas Verifikasi : 20,06 Ha
- Jumlah Bangunan : 1.525 Unit
- Jumlah Penduduk : 5.184 Jiwa
- Jumlah Bangunan : 1.662 KK

Maka berikut hasil perhitungan tingkat kekumuhan kawasan kumuh Tembilahan Hulu pada tabel 5.5 perhitungan tingkat kekumuhan kawasan Kelurahan Tembilahan Hulu.

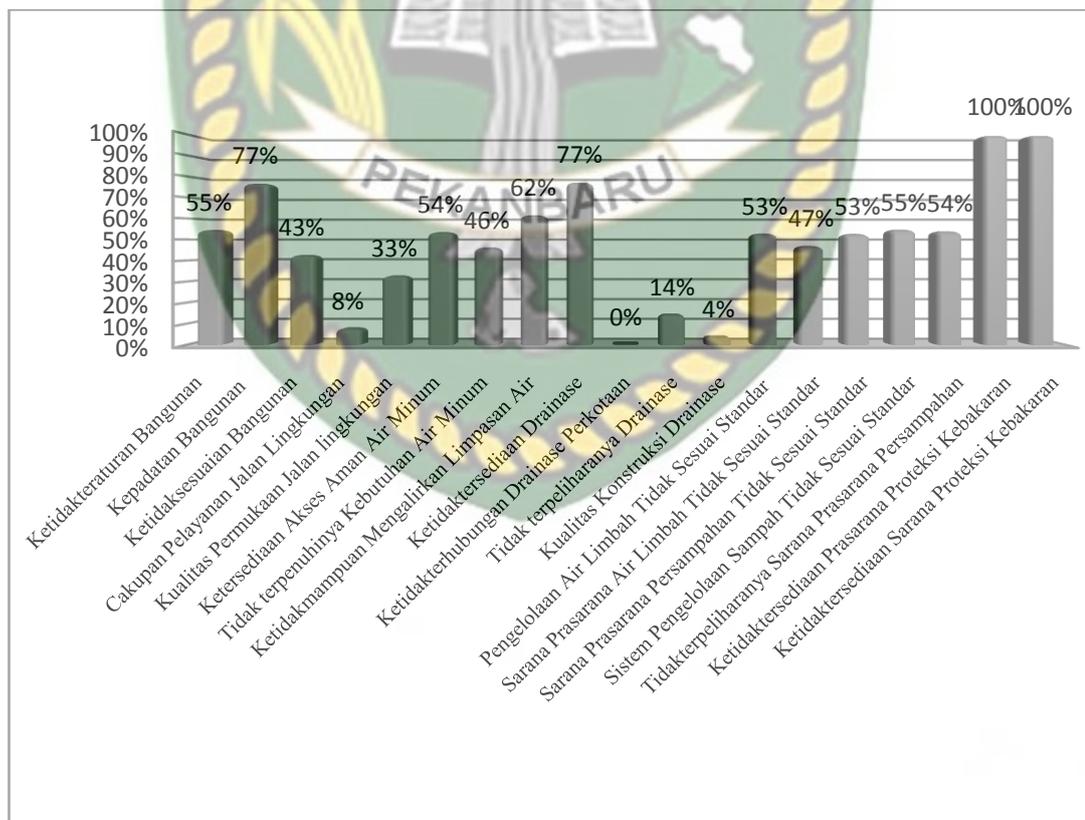
Tabel 5.5 Perhitungan Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh di Kawasan Kelurahan Tembilahan Hulu

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Satuan	Prosen (%)	Nilai
Kondisi Bangunan Gedung	Ketidakteraturan Bangunan	834,00	Unit	64,35%	3
	Kepadatan Bangunan	20,06	Ha	76%	5
	Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	651,00	Unit	50,23%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				58,13%	9
Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	426,00	Meter	7,72%	0
	Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	1.810,00	Meter	32,81%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				16,41%	1
Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketersediaan Akses Aman Air Minum	892,00	KK	53,67%	3
	Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	770,00	KK	46,33%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				50,00%	4
Kondisi Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	12,40	Ha	61,81%	3

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Satuan	Prosen (%)	Nilai
	Ketidakterediaan Drainase	6.166,00	Meter	77,47%	5
	Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0,00%	0
	Tidak terpeliharanya Drainase	1.143,00	Meter	14,36%	0
	Kualitas Konstruksi Drainase	300,00	Meter	3,77%	0
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				27,86%	8
Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	880,00	KK	52,95%	3
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	782,00	KK	47,05%	1
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				50,00%	4
Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	878,00	KK	52,83%	3
	Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	912,00	KK	54,87%	3
	Tidakterpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	899,00	KK	54,09%	3
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				53,93%	9
Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	1.525,00	Unit	100,00%	5
	Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	1.525,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				100,00%	10
Total Nilai					45
Tingkat Kekumuhan					KUMUH SEDANG

Aspek	Kriteria	Kondisi Awal (Baseline)			
		Numerik	Satuan	Prosen (%)	Nilai
Rata2 Kekumuhan Sektoral					50,90%
Kontribusi Penanganan					0,00%
ASPEK	KRITERIA				NILAI
Legalitas Tanah	Kejelasan status penguasaan tanah				+
	Kesesuaian RTR				+
(Status Tanah Legal)					+
Pertimbangan Lain	Nilai Strategis lokasi				5
	Kependudukan				3
	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya				5
(Pertimbangan Lain Tinggi)					13

Sumber : Hasil Analisis 2019



Gambar 5.24
Grafik Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu

Sumber : Hasil Analisis 2019

Berdasarkan tabel dan grafik diatas bahwasannya hasil perhitungan tingkat kekumuhan kawasan di Kelurahan Tembilaan Hulu ini dengan hasil total nilai sebesar **45** yaitu tingkat kekumuhan **Kumuh Sedang**, rata-rata kekumuhan sektoran sebesar **50,90%** dan kontribusi penanganan sebesar **0,00%**, sedangkan dari aspek legalitas tanah yaitu **positif (+)** dengan status **Tanah Legal** dan hasil dari aspek pertimbangan lain yaitu sebesar **13** dengan **Pertimbangan Lain Tinggi**.

5.4 Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tembilaan Hulu

Berdasarkan hasil dari sasaran 1 sampai 3 yaitu telah di ketahui kondisi eksisting permukiman kumuh Kelurahan Tembilaan Hulu, kondisi tipologi kawasan permukiman kumuh Kelurahan Tembilaan Hulu, dan tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Tembilaan Hulu, sehingga dapat di rumuskan strategi apa yang tepat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilaan Hulu melalui pedoman permukiman kumuh bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016. Maka berdasarkan hasil identifikasi tipologi permukiman kumuh Kelurahan Tembilaan Hulu saat ini lokasi penelitian termasuk dalam **tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air**, maka *penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah*, sedangkan dalam hal lokasi termasuk dalam **tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah**, maka *penanganan yang dilakukan harus memperhatikan*

karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bagaimana pola penangannya sesuai tipologinya seperti dalam tabel 5.6 penanganan bangunan dan infrastruktur pendukung pada permukiman kumuh menurut tipologinya sebagai berikut:



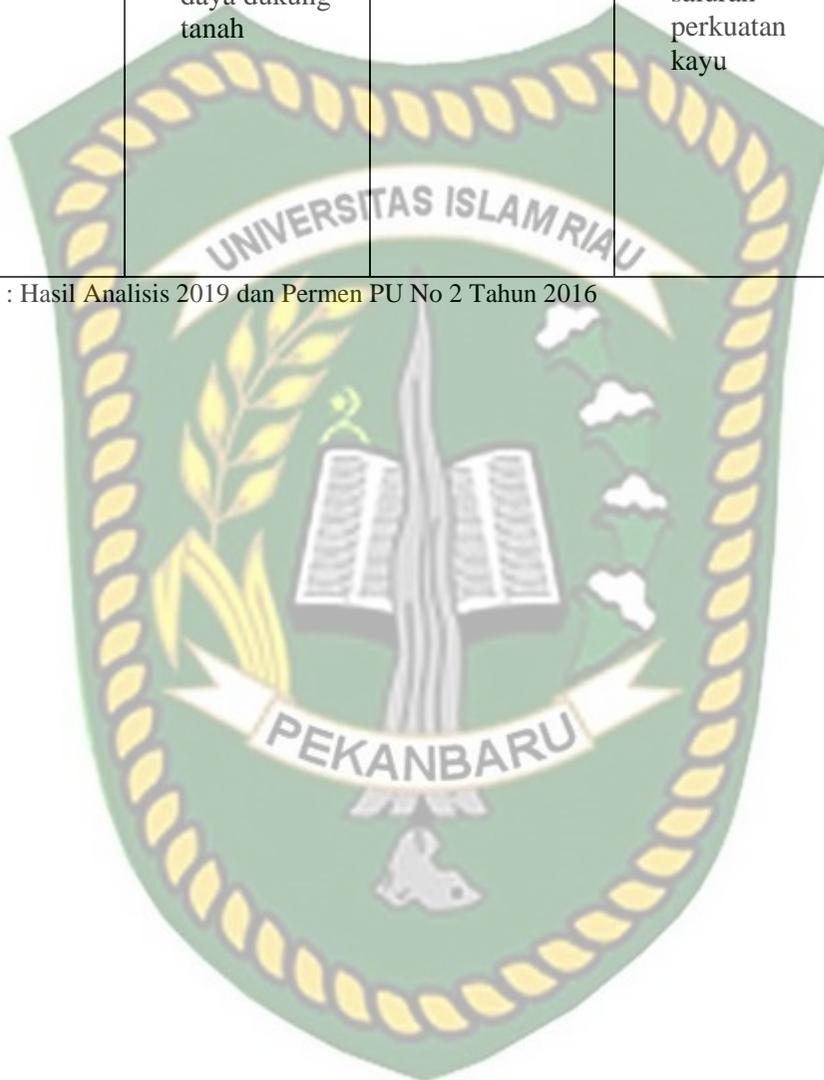
Tabel 5.6 Pola Penanganan Bangunan dan Infrastruktur Pendukung Pada Permukiman Kumuh Menurut Tipologinya

No	Tipologi Permukiman Kumuh	Bangunan Dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran
1	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	<ul style="list-style-type: none"> Membangun rumah dengan konsep <i>waterfront housing</i>, menjadikan kawasan perairan sebagai halaman depan Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku Memanfaatkan bahan bangunan, khususnya untuk pondasi, yang punya ketahanan terhadap daya 	<ul style="list-style-type: none"> Pondasi jalan: <ul style="list-style-type: none"> Pada sisi perairan dengan sistem cerucuk Pada sisi daratan dengan sistem konvensional Memanfaatkan material jalan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa tanpa perkerasan (kayu, bambu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal Pada jalan yang berbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem drainase lokal Jika permukaan daratan lebih tinggi dari air, maka dilengkapi dengan pintu air; atau Jika permukaan daratan lebih rendah dari air, maka dilengkapi pula oleh pompa air Memanfaatkan material saluran drainase yang punya ketahanan terhadap daya rusak air, bisa 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat Sistem distribusi jika menggunakan perpipaan, maka: <ul style="list-style-type: none"> Pada sisi perairan, pipa sambungan dipasang menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau Pada sisi daratan, pipa sambungan 	<ul style="list-style-type: none"> Unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan: <ul style="list-style-type: none"> Secara <i>floating</i> memanfaatkan material yang punya ketahanan terhadap daya rusak air; atau Di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah Unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka: <ul style="list-style-type: none"> Pada sisi perairan, pipa sambungan 	<ul style="list-style-type: none"> Unit pengumpulan sampah seperti tps dapat ditempatkan di atas air Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi air 	<ul style="list-style-type: none"> Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi air

No	Tipologi Permukiman Kumuh	Bangunan Dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran
		rusak air	dengan perairan dilengkapi dengan bangunan: <ul style="list-style-type: none"> • Bronjong • Bangunan pemecah ombak 	tanpa perkerasan (kayu, pasangan batu) atau dengan perkerasan kaku (beton) sesuai dengan karakteristik lokal	berada di bawah tanah	dipasang menempel pada konstruksi jalan / drainase di atas air; atau <ul style="list-style-type: none"> • Pada sisi daratan pipa sambungan berada di bawah tanah 		
2	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pondasi dangkal untuk bangunan sederhana dan pondasi dalam untuk bangunan tingkat • Intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Pondasi jalan dengan sistem konvensional • Memanfaatkan konstruksi perkerasan yang sesuai dengan daya dukung tanah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem drainase lokal dapat dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa • Memanfaatkan material saluran drainase <ul style="list-style-type: none"> • Pada tekstur tanah keras adalah saluran tanah • Pada tekstur 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air baku diusahakan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam • Sistem distribusi jika menggunakan perpipaian, maka pipa sambungan berada di 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengolahan air limbah setempat ditempatkan di bawah tanah memanfaatkan material sesuai daya dukung tanah • Unit pemipaan jika menggunakan sistem pengolahan air limbah terpusat, maka pipa sambungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengumpulan sampah seperti TPS dapat ditempatkan di atas atas tanah • Unit pengangkutan sampah dapat menggunakan moda transportasi darat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasokan air memanfaatkan sumber air setempat • Kendaraan pemadam kebakaran dapat menggunakan moda transportasi darat

No	Tipologi Permukiman Kumuh	Bangunan Dan Lingkungan	Jalan Lingkungan	Drainase	Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Persampahan	Kebakaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan bahan bangunan sesuai dengan daya dukung tanah 		tanah yang sangat jelek (gambut) adalah saluran perkuatan kayu	bawah tanah	berada di bawah tanah		

Sumber : Hasil Analisis 2019 dan Permen PU No 2 Tahun 2016



Sedangkan berdasarkan hasil tingkat kekumuhan menghasilkan klasifikasi dan skala prioritas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu yaitu merupakan **prioritas penanganan ke dua (2)**. Berikut tabel 5.7 hasil formulasi penilaian penentuan klasifikasi dan skala prioritas penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu.



Tabel 5.7 Hasil Formulasi Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu

Nilai	Keterangan	Kalsifikasi																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
7195	Kumuh Berat	x	x	x	x	x	x												
4570	Kumuh sedang							x	x	x	x	x	x						
1944	Kumuh Ringan													x	x	x	x	x	x
Legalitas Tanah																			
(+)	Status Tanah Legal	x		x		x		x		x		x		x		x		x	
(-)	Status Tanah Tidak Legal		x		x		x		x		x		x		x		x		x
Pertimbangan Lain																			
1115	Pertimbangan Tinggi	xx			xx		xx				xx			xx			xx		
610	Pertimbangan Sedang		xx			xx			xx			xx			xx			xx	
15	Pertimbangan Rendah			xx			xx			xx			xx			xx			xx
Skala Prioritas Penanganan =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016

Berdasarkan penilaian diatas maka klasifikasi kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu yaitu **B1** yang merupakan kondisi kekumuhan sedang, dengan status tanah legal dan pertimbangan lain tinggi maka dapat ditentukan skala prioritas penangannya yaitu **Prioritas Ke 2 (Dua)**, sehingga pola penanganan yang sesuai dilakukan adalah **Peremajaan**.

Dalam Peraturan Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016 telah dijelaskan bahwasannya peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Adapun tahapan dalam proses peremajaan permukiman kumuh yaitu : a) pra konstruksi; b) konstruksi; dan c) pasca konstruksi.

- Peremajaan pada tahap pra konstruksi meliputi:
 - a. Identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. Penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. Sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. Pendataan masyarakat terdampak;
 - e. Penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. Musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- Peremajaan pada tahap konstruksi meliputi:
 - a. Proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. Penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

- c. Proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. Proses penghunian kembali masyarakat terdampak
- Peremajaan pada tahap pasca konstruksi meliputi:
- a. Pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan.

Adapun bentuk-bentuk peremajaan dalam program penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilaan Hulu seperti pada tabel 5.8 Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai berikut:



Tabel 5.8 Penanganan Fisik Infrastruktur Menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

No	Program Penanganan Fisik Infrastruktur	Bentuk-Bentuk Peremajaan
1	Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun - Peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung
2	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan - Peningkatan kapasitas jalan lingkungan, seperti: penambahan lajur dan/atau pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama namun belum tersambung
3	Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan komponen pada unit-unit air baku dan unit produksi • Peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum, seperti penambahan/ perluasan jaringan unit distribusi dan unit pelayanan
4	Drainase Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase, seperti penambahan gorong-gorong, penambahan pompa, penambahan kapasitas kolam tandon, dan lainnya yang sejenis. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase, seperti pelebaran saluran atau dan/atau menghubungkan jaringan drainase pada lokasi yang sama namun belum tersambung
5	Pengelolaan Air Limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan air limbah, seperti penambahan komponen pada SPAL-S • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan pada SPAL-T
6	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, seperti penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengolahan. • Peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah
7	Proteksi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, seperti penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran • Peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran seperti lingkup pelayanan dari alat dan kendaraan pemadam kebakaran

Sumber : Hasil Analisis 2019 dan Permen PU No 2 Tahun 2016

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1) **Kondisi Eksisting Kawasan Permukiman Kumuh Tembilahan Hulu**

a. **Bangunan Gedung**

Kondisi eksisting bangunan gedung ditinjau dari ketidakteraturan bangunan terdapat ketidaksesuaian yang ditinjau dari bentuk dan peletakan bangunan dimana seharusnya bangunan rumah tunggal peletakkannya di kawasan kepadatan rendah, sedangkan kondisi eksisting nya bentuk bangunan rumah tunggal terletak di kepadatan tinggi, sehingga menyebabkan bangunan rumah memiliki ketidakteraturan sebanyak 834 unit bangunan. Sedangkan untuk kepadatan bangunan berdasarkan hasil perhitungan menghasilkan kepadatan tinggi sebesar 76% dan KDB dan KLB di lokasi penelitian tidak sesuai dalam ketentuan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kemudian kesesuaian standar teknis bangunan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan diatas ialah sebanyak 681 unit bangunan.

b. Jalan Lingkungan

Cakupan pelayanan jalan lingkungan yang ada di lingkungan kawasan Kelurahan Tembilahan Hulu masih ada yang tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan dengan persentase selisih panjang jalan tersebut ialah sepanjang 8%. Jalan lingkungan di tinjau dari kualitas jalan lingkungan saat ini berupa aspal, beton dan semenisasi tetapi masih terdapatnya jalan lingkungan dengan kondisi permukaan jalan papan yang terletak khusus permukiman tepi sungai, sehingga persentase jalan yang rusak dengan total jalan yang ada ialah 35%.

c. Penyediaan Air Minum

Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu belum terpenuhinya akses aman air minum karena hanya minoritas masyarakat yang menggunakan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan (SPAM) melalui PDAM yaitu sebanyak 633 KK, akan tetapi akses aman air minum tersebut belum sesuai standar kesehatan karena kualitas air PDAM yaitu berbau, berwarna, dan keruh. Sedangkan mayoritas masyarakat di lokasi studi masih menggunakan air bersumber dari sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) yaitu sumur bor, air sungai, dan air hujan dengan jumlah KK sebanyak sebanyak 892 KK, kemudian tidak terpenuhinya air minum dengan jumlah KK yaitu sebanyak 770 KK.

d. Drainase Lingkungan

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air dikarenakan kondisi drainase yang ada banyak tersumbat disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah, dan sedimentasi saluran, sehingga luas kawasan yang terkena genangan ialah sebesar 12,4 Ha. Kemudian tidak tersedianya drainase karena jarak antar bangunan rapat dan membantasi ruang untuk drainase dengan persentase selisih drainase yang ada dengan drainase ideal ialah 77%. Sedangkan dilokasi studi tidak terhubungnya drainase perkotaan karena banyak jaringan jalan yang tidak tersedianya saluran drainase sehingga menyebabkan menimbulkan genangan. Dan saluran drainase yang sudah terbangun saat ini sangat tidak terawat dengan selisih persentase saluran drainase tidak terpelihara dengan drainase eksisiting ialah 26%. Lalu kualitas kontruksi saluran drainase saat ini buruk yaitu dimana kualitas kontruksi drainase berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup dan sebagian adanya kerusakan lapisan meterial drainaseny.

e. Pengelolaan Air Limbah

Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis karena rumah dengan kondisi struktur bangunan semi dan non permanen tidak memiliki prasarana dan sarana yang sesuai standar yaitu tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septitank, lalu kondisi struktur bangunan rumah permenen hanya tersedia sistem pengolahan limbah setempat, dengan jumlah KK sarana

dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar sebanyak 782 KK. Kemudian sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis sebanyak 880 KK.

f. Pengelolaan Persampahan

Kondisi prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai persyaratan teknis karena tidak ditemukan tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, hanya terdapat 2 (dua) TPS yang tersedia di lingkungan lokasi studi, tidak ditemukan TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), hanya ada truk sampah pada skala lingkungan, dan tidak adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Adapun total KK dengan sarana dan prasarana yang tidak sesuai standar teknis yaitu sebanyak 878 KK, sedangkan jumlah KK dengan sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis ialah sebanyak 912 KK, dan sarana dan prasarana persampahan yang tidak terdapatnya pemeliharaan pengolahan persampahan baik secara rutin maupun berkala sebanyak 899 KK.

g. Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran tidak ditemukan prasarana proteksi kebakaran seperti bangunan pos kebakaran, pasokan air yang lebih, jalan lingkungan yang tidak bisa dilalui mobil kebakaran, dan tidak adanya data sistem proteksi kebakaran lingkungan serta tidak ditemukan sarana proteksi kebakaran seperti alat pemadam api ringan (APAR), mobil pompa, mobil tangga sesuai kebutuhan, dan peralatan pendukung lainnya.

h. Identifikasi Legalitas Tanah

Legalitas tanah di lokasi kawasan kumuh di Kelurahan Tembilahan Hulu saat ini masyarakat permukiman memiliki kejelasan status penguasaan tanah yaitu milik sendiri dengan adanya surat hak milik (SHM) dengan persentase sebesar 90% di lokasi permukiman kumuh tersebut.

i. Identifikasi Pertimbangan Lain

Kecamatan Tembilahan Hulu memiliki nilai strategis lokasi karena merupakan Ibu Kota Kecamatan Tembilahan Hulu dan kawasan permukiman perkotaan tercantum dalam bab rencana pola ruang draft RTRW, adapun kepadatan penduduk di lokasi studi sebesar 258 Jiwa/Ha dengan kategori kepadatan penduduk sedang. Kemudian kategori lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk di kembangkan/dipelihara.

2) Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh Tembilahan Hulu

a. Permukiman Tepi Air yang berada di tepi badan air seperti sungai, yang meliputi;

- Permukiman Tepian Parit
- Permukiman Tepian Sungai

b. Permukiman Dataran Rendah yang berada didaerah dataran rendah dengan kemiringan lereng <10%, yang meliputi;

- Permukiman Padat Perkotaan
- Permukiman Kepadatan Sedang
- Permukiman Campuran

3) Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Tembilahan Hulu

Hasil perhitungan tingkat kekumuhan kawasan di Kelurahan Tembilahan Hulu ini dengan hasil total nilai sebesar 45 yaitu tingkat kekumuhan kumuh sedang, rata-rata kekumuhan sektoran sebesar 50,90%, dan kontribusi penanganan sebesar 0,00%, sedangkan dari aspek legalitas tanah yaitu (+) positif dengan status tanah legal dan hasil dari aspek pertimbangan lain yaitu sebesar 13 dengan pertimbangan lain tinggi.

4) Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Tembilahan Hulu

Hasil sasaran 1 sampai 3 melalui pedoman permukiman kumuh yang bersumber dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 2 Tahun 2016 yaitu menghasilkan strategi berdasarkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus

memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah, sedangkan dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. Sedangkan berdasarkan hasil tingkat kekumuhan sedang, tanah legal, dan pertimbangan lain tinggi menghasilkan strategi penanganan yang tepat adalah peremajaan. Dimana peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

6.2 Saran

Dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh Kelurahan Tembilihan Hulu saat ini saran yang dapat dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan revisi SK Permukiman Kumuh Tembilihan Hulu saat ini adanya penambahan lokasi RT/RW sesuai deliniasi lokasi kawasan kumuh.
2. Pemerintah di harapkan segera melakukan penganggaran pembiayaan penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.
3. Masyarakat diharapkan adanya partisipasi dalam program yang pemerintah laksanakan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu.
4. Diperlukan suatu kajian atau penelitian lebih lanjut terkait penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Tembilihan Hulu dengan arahan penataan permukiman berbasis *design visual*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, J.W, 2013, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ketiga. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Ekadinata, A. 2008. *Sistem Informasi Geografis untuk Pengelolaan Bentang Alam Berbasis Sumber Daya Alam*. Bogor: Penerbit: World Agroforestry Cente.
- Farida, Rina. 2016. *Penyusunan Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh*. Jakarta : Penerbit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Hagget. 2001. *Geography A Global Synthesis*. Pearson Education Llt, Prentice Hall, NY.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Muta'ali, Luthfi., dan Nugrofo, Arif. 2016. *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press Prahasa, edyy. 2009. *Sistem Informasi Geografis Konsep-konsep Dasar*. Bandung: Penerbit Informatika Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitataif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Jurnal :

- Asteriani Febby, 2011 “Preferensi Penghuni Perumahan Di Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Lokasi Perumahan”. *Ekonomi Pembangunan*. 12, (1) : 77-91.
- Bintang Cihe Aprilia, 2014”Analisa Strategi Penataan Permukiman dan Infrastruktur di Kabupaten Pelalawan”. *Saintis*. 14, (1) : 70-81.
- Dahlan Eka. 2016. Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon. *Fikratuna*. 8, (2) : 127-144.
- Dwi A. dan Antariksa, 2005, “ Studi Karakteristik Pola Permukiman Di Kecamatan Labang Madura”. *ASPI*. 4, (2) : 78-93.
- Edsadova Donata, dkk. 2016. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Nagari Painan Selatan Kecamatan Iv Jurai. *Perencanaan Wilayah dan Kota*. 1, (3) : 1-9.
- Elpidia Agatha Crysta. 2016. Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penanganannya (Studi Kasus: Kelurahan Keputih, Surabaya). *Teknik Geomatika*. 2016. 13, (2) : 109-114
- Mingki Gerald, dkk. 2015. Analisis Tingkat Kekumuhan Permukiman Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Merah Kota Bitung. *Perencanaan Wilayah dan Kota*. 7, (2) : 430-435.
- Nursyahbani Raisya dan Bitta Pigawati. 2015. Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang). *Perencanaan Wilayah Dan Kota*. 4, (2) : 267-281.

Purnaweni, Hartuti. 2017. Revitalization Of Slum Area In Semarang City With Thematic Village Program A Case Study In Bandarharjo Village, Indonesia.

Economics, Business and Management. 43, (1) : 32-42.

Pedro Alexandra Aguiara, Alfredo Pereira Queiroz. 2019 “Slum: Comparing municipal and census basemaps”. *Habitat International*. 83, (1) : 1-146.

Rahman Febri, dkk. 2015. Identifikasi dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Upaya Peremajaan (Studi Kasus Kelurahan Pasar Baru Dan Kelurahan Balai-Balai Kota Padang Panjang)”. *Perencanaan Wilayah dan Kota*. 6, (2) : 1-10.

Setiadi Amos. 2014. Tipologi dan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Bontang. *Tata Loka*. 16, (4). 220-233.



Skripsi/Tugas Akhir :

Crysta Elpidia Agatha, 2017 “Analisis Tingkat Kekumuhan dan Pola Penanganannya Pada Lokasi Permukiman (Studi Kasus: Kelurahan Keputih, Surabaya)” *Skripsi*. Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh November.

Syam Muhajir, 2017, “Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene” *Tugas Akhir*. Makassar. UIN Alauddin Makassar.

Wijaya Arie Ramadhan, 2018. “Kajian Penanganan Permukiman Kumuh Kelurahan Babakan Surabaya Kota Bandung” *Tugas Akhir*. Bandung. Universitas Pasundan Bandung.

Dokumen dan Peraturan (Regulasi) :

Anonim. 2019. *Monografi Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu*. Indragiri Hilir.

Al-Qur’an. *Surat An Nahl Ayat 80*, Departemen Agama RI.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2019. *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka Tahun 2018*, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2019. *Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka Tahun 2018*, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

2 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 2018. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2038. Indragiri Hilir.

Badan Standar Indonesia, 2004. SNI 03-6981-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan, Indonesia.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 28 Tahun 2015 tentang *Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.*

Program Pemerintah Daerah, “Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: Kpts.402.a/VIII/1999”.

Program Pemerintah Daerah “Surat Keputusan (SK) Gubernur Propinsi Riau Nomor: 218 Tahun 1997 dan Keputusan Mendagri Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan”

Program Pemerintah Daerah “Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts.583/VIII-HK Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir”

Program Pemerintah Daerah Surat Keputusan (SK) Bupati Indragiri Hilir Nomor Kpts. 133/II-HK Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir”

Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang *Penataan Ruang.*

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2011 tentang *Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 *tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undangundang*

Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang *Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75).*

Lainnya (Internet) :

KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/strategi>. (30 Maret 2019)

Rindrojono. 2013. *Permukiman Kumuh*. <https://elib.unikom.ac.id/>. (26 Maret 2019)

